

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH

FEBRUARI 2020





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya “Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Februari 2020” dapat dipublikasikan. Buku ini menyajikan berbagai informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah khususnya bidang moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan keuangan daerah, yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal Bank Indonesia juga sebagai bahan informasi bagi pihak eksternal.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi penyusunan buku ini. Harapan kami, hubungan kerja sama yang baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Kami juga mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kualitas buku kajian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya serta kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya.

Semarang, Februari 2020
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ttd

Soekowardojo
Direktur Eksekutif

Daftar Isi



Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	vii
Daftar Tabel	xii
Tabel Indikator	xiv
Ringkasan Eksekutif	01

BAB I **PERKEMBANGAN** **EKONOMI MAKRO** **REGIONAL**

1.1 Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan IV 2019	3
1.1.1 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran	5
1.1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	18
1.2 <i>Tracking</i> Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan I 2019	27
1.2.1 <i>Tracking</i> Perkembangan Ekonomi Triwulan I 2020 Sisi Pengeluaran	27
1.2.2 <i>Tracking</i> Perkembangan Ekonomi Triwulan I 2019 Sisi Lapangan Usaha	28

BAB II **KEUANGAN PEMERINTAH**

2.1 Gambaran Umum APBD 2019	37
2.2 Realisasi APBD Triwulan IV 2019	37
2.2.1 Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2019	38
2.2.2 Realisasi Belanja Triwulan IV 2019	39
2.3 Struktur APBN Provinsi Jawa Tengah 2019	40



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH NOVEMBER 2019

BAB III PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

3.1 Inflasi Secara Umum	45
3.2 Inflasi Berdasarkan Kelompok	46
3.2.1 Kelompok Bahan Makanan	47
3.2.2 Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	48
3.2.3 Kelompok Kesehatan	49
3.2.4 Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	49
3.2.5 Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	50
3.2.6 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	50
3.2.7 Kelompok Sandang	50
3.3 Inflasi Kota – Kota di Provinsi Jawa Tengah	51
3.3.1 Disagregasi Inflasi Kota Semarang	52
3.3.2 Disagregasi Inflasi Kota Surakarta	53
3.3.3 Disagregasi Inflasi Kota Cilacap	53
3.3.4 Disagregasi Inflasi Kota Kudus	54
3.3.5 Disagregasi Inflasi Kota Tegal	55
3.3.6 Disagregasi Inflasi Kota Purwokerto	55
3.4 Tracking dan Proyeksi Inflasi	56
3.4.1 Inflasi Januari 2020	56
3.4.2 Inflasi Februari 2020	57
3.4.3 Proyeksi Inflasi Provinsi Jawa Tengah Triwulan I 2020	58
3.5 Program Pengendalian Inflasi Daerah	58

BAB IV STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

4.1 Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan Jawa Tengah	65
4.1.1 Ketahanan Lapangan Usaha Jawa Tengah Triwulan IV 2019	65
4.1.2 Ketahanan Sektor Korporasi Jawa Tengah Pada Triwulan IV 2019	67
4.1.3 Kerentanan Sektor Rumah Tangga Pada Triwulan IV 2019	68
4.2 Kondisi Umum Perbankan Jawa Tengah	71
4.2.1 Perkembangan Bank Umum	73
4.3 Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Provinsi Jawa Tengah	77

BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

5.1 Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	85
5.2 Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah	86
5.3 Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing	88
5.4 Perkembangan Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif	89



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH FEBRUARI 2020



BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

6.1 Ketenagakerjaan	93
6.2 Pengangguran	96
6.3 Nilai Tukar Petani	97
6.4 Tingkat Kemiskinan	99
6.5 Pembangunan Manusia	100
6.6 Pemerataan Kesejahteraan Penduduk	101

BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2020 dan Tahun 2020	103
7.1.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran	105
7.1.2 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	107
7.2 Prospek Inflasi Triwulan II 2020 dan Keseluruhan Tahun 2020	107

Grafik



Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah	3	Grafik 1.18 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga Kredit Investasi	10
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional	3	Grafik 1.19 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi	11
Grafik 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi	3	Grafik 1.20 Perkembangan SBT Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha (hasil SKDU)	11
Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi	4	Grafik 1.21 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)	11
Grafik 1.5 Pertumbuhan Tahunan Outflow Uang Kartal, Rata-Rata Perputaran Kliring Harian, dan Pertumbuhan Ekonomi	4	Grafik 1.22 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri	11
Grafik 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Jawa Tengah dan Nasional	5	Grafik 1.23 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri	12
Grafik 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	6	Grafik 1.24 Komposisi Ekspor Luar Negeri Nonmigas Berdasarkan Komoditas	12
Grafik 1.8 Indeks Tendensi Konsumen	7	Grafik 1.25 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT	13
Grafik 1.9 Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	7	Grafik 1.26 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT	13
Grafik 1.10 Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK Perorangan, dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	8	Grafik 1.27 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu	13
Grafik 1.11 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi	8	Grafik 1.28 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu	13
Grafik 1.12 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT	8	Grafik 1.29 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan	14
Grafik 1.13 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	8	Grafik 1.30 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan	14
Grafik 1.14 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	9	Grafik 1.31 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri	15
Grafik 1.15 Pertumbuhan Giro Pemerintah dan PDRB Konsumsi Pemerintah	9	Grafik 1.32 Perkembangan Impor Jawa Tengah	15
Grafik 1.16 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	10	Grafik 1.33 Pertumbuhan Impor Migas dan Nonmigas Jawa Tengah	15
Grafik 1.17 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB Konstruksi, dan Konsumsi Semen	10	Grafik 1.34 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran	16
		Grafik 1.35 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran	16
		Grafik 1.36 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan	17
		Grafik 1.37 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas	17

Grafik



Grafik 1.38 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah	17	Grafik 1.54 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil berdasarkan Sektor (% , YOY)	23
Grafik 1.39 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal	17	Grafik 1.55 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor	24
Grafik 1.40 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal	17	Grafik 1.56 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil berdasarkan Sektor (% , YOY)"	24
Grafik 1.41 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah	18	Grafik 1.57 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan	25
Grafik 1.42 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20	Grafik 1.58 IPR Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok Komoditas	25
Grafik 1.43 Curah Hujan di Jawa Tengah	20	Grafik 1.59 Pertumbuhan PDRB Transportasi dan Pergudangan; serta Informasi dan Komunikasi	26
Grafik 1.44 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa Tengah	20	Grafik 1.60 Pertumbuhan PDRB Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Konsumsi Pemerintah	26
Grafik 1.45 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa Tengah	20	Grafik 1.61 Pertumbuhan PDRB Konstruksi	26
Grafik 1.46 Perkembangan Hasil Produksi Padi di Jawa Tengah	21	Grafik 1.62 SBT Kegiatan Usaha, SBT Kegiatan Investasi Bangunan dan Pertumbuhan Konsumsi Semen	26
Grafik 1.47 Perkembangan SBT Realisasi Kegiatan Usaha (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Pertanian	21	Grafik 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2018 dan T.A. 2019	38
Grafik 1.48 Pertumbuhan dan NPL Kredit Pertanian	21	Grafik 2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Triwulan II 2018 dan 2019	38
Grafik 1.49 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	22	Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah	38
Grafik 1.50 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	22	Grafik 2.4 Realisasi Belanja Daerah	38
Grafik 1.51 Pertumbuhan dan NPL Kredit Industri Pengolahan	22	Grafik 2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan IV 2019	39
Grafik 1.52 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor Industri Pengolahan (Hasil SKDU)	23	Grafik 2.6 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan IV 2019	39
Grafik 1.53 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang berdasarkan Sektor (% , YOY)	23		



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH FEBRUARI 2020

Grafik 2.7 Penggunaan Belanja APBD Jawa Tengah 2019	40	Grafik 3.16 Perbandingan Inflasi Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok	52
Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional	45	Grafik 3.17 Perbandingan Inflasi Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok	53
Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi di Kawasan Jawa	45	Grafik 3.18 Perbandingan Inflasi Kota Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok	54
Grafik 3.3 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa	45	Grafik 3.19 Perbandingan Inflasi Kota Kudus dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok	55
Grafik 3.4 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa	45	Grafik 3.20 Perbandingan Inflasi Kota Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok	55
Grafik 3.5 Perbandingan Inflasi Triwulanan Berdasarkan Kelompok	46	Grafik 3.21 Perbandingan Inflasi Kota Purwokerto dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok	56
Grafik 3.6 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Bahan Makanan	48	Grafik 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Pertanian	66
Grafik 3.7 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	48	Grafik 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Konstruksi	66
Grafik 3.8 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Kesehatan	49	Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Industri Pengolahan	66
Grafik 3.9 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	49	Grafik 4.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, serta Risiko Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	66
Grafik 3.10 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	50	Grafik 4.5 Perkembangan ROA, ROE Korporasi Jawa Tengah	67
Grafik 3.11 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	50	Grafik 4.6 Perkembangan Debt to Equity Ratio Korporasi Jawa Tengah	67
Grafik 3.12 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Sandang	51	Grafik 4.7 Perkembangan TA/TL Korporasi Jawa Tengah	68
Grafik 3.13 Inflasi Tahunan Triwulan IV 2018 pada Seluruh Kota Pantauan di Jawa Tengah	51	Grafik 4.8 Perkembangan Current Ratio Korporasi Jawa Tengah	68
Grafik 3.14 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Pantauan di Jawa Tengah	51	Grafik 4.9 Perkembangan Pertumbuhan DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah	68
Grafik 3.15 Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per Kelompok pada Tw IV 2019	52	Grafik 4.10 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Jawa Tengah Berdasarkan Komponennya	69
		Grafik 4.11 Perkembangan Ekspektasi Masyarakat terhadap Peningkatan Tabungan Berdasarkan Survei Konsumen	69

Grafik



Grafik 4.12 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah	69	Grafik 4.27 Perkembangan Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	74
Grafik 4.13 Perkembangan Pangsa Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah	69	Grafik 4.28 Perkembangan Pangsa Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	74
Grafik 4.14 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah	70	Grafik 4.29 Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	74
Grafik 4.15 Pangsa Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah	70	Grafik 4.30 Perkembangan Pangsa Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	75
Grafik 4.16 Perkembangan NPL Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah	71	Grafik 4.31 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Tengah	75
Grafik 4.17 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah	71	Grafik 4.32 Pangsa Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Lapangan Usaha	75
Grafik 4.18 Perkembangan NPL Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah	71	Grafik 4.33 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor	76
Grafik 4.19 Pangsa Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah	71	Grafik 4.34 Perkembangan Rasio NPL Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor	76
Grafik 4.20 Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan di Pulau Jawa	72	Grafik 4.35 Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan Jawa Tengah	76
Grafik 4.21 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan di Pulau Jawa	72	Grafik 4.36 Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan Jawa Tengah	77
Grafik 4.22 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan di Jawa Tengah	72	Grafik 4.37 Perkembangan Suku Bunga Sektor Ekonomi Utama di Jawa Tengah	77
Grafik 4.23 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan (NPL) Kredit Perbankan Jawa Tengah	72	Grafik 4.38 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah	77
Grafik 4.24 Perkembangan Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Perbankan Jawa Tengah	73	Grafik 4.39 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di Jawa Tengah	77
Grafik 4.25 Perkembangan Pertumbuhan Indikator Perbankan Jawa Tengah	73	Grafik 4.40 Pangsa Dana Pihak Ketiga BPR di Jawa Tengah	78
Grafik 4.26 Perkembangan DPK Perbankan Umum Jawa Tengah	74	Grafik 4.41 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa Tengah	78



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH FEBRUARI 2020

Grafik 4.42 Pangsa Kredit BPR di Jawa Tengah	78	Grafik 5.14 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengah dibandingkan 1.000 km ² Luas Wilayah	89
Grafik 4.43 Pangsa Penyaluran Kredit BPR di Jawa Tengah	78	Grafik 6.1 Perkembangan NTP Subsektor Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan dalam 4 Tahun Terakhir	94
Grafik 4.44 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa Tengah	78	Grafik 6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat Ini	97
Grafik 4.45 Perkembangan NPL BPR di Jawa Tengah	78	Grafik 6.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang	97
Grafik 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di Jawa Tengah	85	Grafik 6.4 NTP dan PDRB Lapangan Usaha Pertanian	97
Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan IPR SPE	85	Grafik 6.5 NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya	98
Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman	86	Grafik 6.6 NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa Tengah	98
Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman	86	Grafik 6.7 Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor	98
Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah	86	Grafik 6.8 Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor	98
Grafik 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah	87	Grafik 6.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah	99
Grafik 5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah	87	Grafik 6.10 Perkembangan IPM Jawa Tengah dan Nasional	100
Grafik 5.8 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar	87	Grafik 6.11 Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional	102
Grafik 5.9 Frekuensi dan Nominal Kas Keliling	87	Grafik 6.12 Perkembangan Koefisien Gini Berdasarkan Wilayah	102
Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah	88	Grafik 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah	105
Grafik 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan	88	Grafik 7.2 Proyeksi Inflasi Tahun 2020	108
Grafik 5.12 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan Kunjungan Wisatawan Asing di Jawa Tengah	88		
Grafik 5.13 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA Bukan Bank di Jawa Tengah	88		

Tabel



Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (% , yoy)	3	Tabel 2.8 Realisasi APBN berdasarkan Jenis Belanja pada Triwulan IV 2017- 2019	42
Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Pengeluaran (Rp Miliar)	5	Tabel 3.1 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan	46
Tabel 1.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Pengeluaran (Rp Miliar)	5	Tabel 3.2 Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan	46
Tabel 1.4 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ADHK menurut Pengeluaran (% , YOY)	6	Tabel 3.3 Inflasi Tahunan Kota di Provinsi Jawa Tengah	46
Tabel 1.5 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)	18	Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok	47
Tabel 1.6 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)	19	Tabel 3.5 Perkembangan Inflasi Triwulanan Berdasarkan Kelompok	47
Tabel 1.7 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ADHK menurut Lapangan Usaha (% , YOY)	19	Tabel 4.1 Pengelompokan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya	69
Tabel 2.1 APBD dan APBD-P Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	37	Tabel 4.2 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah	70
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi APBD Jawa Tengah 2019 (Rp Miliar)	38	Tabel 4.3 Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan di Jawa Tengah	73
Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan Triwulan IV Tahun 2018 dan 2019	39	Tabel 4.4 Pengelompokan DPK Berdasarkan Nilai	75
Tabel 2.4 Realisasi Belanja Triwulan IV 2018 dan 2019	40	Tabel 4.5 Pengelompokan Kredit Berdasarkan Nilai	76
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran APBN berdasarkan Jenis Belanja	41	Tabel 6.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)	93
Tabel 2.6 Alokasi Anggaran APBN berdasarkan Jenis Fungsi	41	Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)	94
Tabel 2.7 Realisasi APBN berdasarkan Fungsi pada Triwulan IV 2017-2019	42	Tabel 6.3 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (juta orang)	95
		Tabel 6.4 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)	95



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH FEBRUARI 2020

Tabel 6.5 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)	96
Tabel 6.6 Garis Kemiskinan Jawa Tengah Menurut Daerah	100
Tabel 6.7 Perbandingan IPM Provinsi di Kawasan Pulau Jawa	101
Tabel 6.8 IPM Jawa Tengah Menurut Komponen	101
Tabel 6.9 Perbandingan Koefisien Gini Provinsi Peers	102
Tabel 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan	105
Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	106

TABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH

A. PDRB & Inflasi

INDIKATOR	2017	2017	2018				2018	2019				2019
	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
EKONOMI MAKRO REGIONAL *)												
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (% , YOY)	5,40	5,26	5,37	5,43	5,21	5,28	5,32	5,15	5,56	5,66	5,34	5,41
PERTUMBUHAN BERDASARKAN SEKTOR												
- PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	0,84	1,66	0,69	4,30	3,26	2,13	2,63	1,13	4,81	-1,62	1,56	1,36
- PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	4,56	5,19	1,85	5,69	2,17	0,24	2,45	5,94	3,14	2,46	2,04	3,36
- INDUSTRI PENGOLAHAN	4,29	4,33	4,77	4,35	3,98	4,31	4,35	3,64	3,67	6,18	5,28	5,19
- PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	3,81	5,22	4,11	5,16	5,85	6,25	5,36	6,21	4,81	4,83	6,05	5,48
- PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	5,88	6,51	7,11	5,76	4,05	2,74	4,88	2,61	5,35	4,68	5,01	4,42
- KONSTRUKSI	8,33	7,13	6,56	5,34	7,57	4,85	6,07	5,31	3,45	5,67	5,43	4,95
- PERDAGANGAN BESAR-ECERAN DAN REPARASI MOBIL-SEPEDA MOTOR	3,62	6,01	5,16	5,34	5,81	6,47	5,70	6,80	6,64	6,68	4,05	5,98
- TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	4,46	6,30	4,90	8,62	6,50	10,07	7,55	9,92	8,32	8,27	7,56	8,49
- PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	8,12	6,45	10,24	8,29	7,32	6,95	8,17	12,59	19,40	18,84	10,78	9,14
- INFORMASI DAN KOMUNIKASI	18,81	13,27	17,19	11,83	11,56	9,53	12,39	12,15	12,41	11,52	10,49	11,62
- JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	3,75	5,17	6,37	3,61	1,75	2,73	3,58	2,64	0,18	4,19	6,70	3,51
- REAL ESTATE	5,76	6,48	6,72	5,69	5,26	4,69	5,58	4,27	6,26	6,22	5,38	5,53
- JASA PERUSAHAAN	11,23	8,72	11,14	11,04	9,48	6,47	9,48	8,76	9,66	13,53	10,24	10,54
- ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	7,57	2,57	4,08	4,27	2,62	6,62	4,43	2,13	3,82	3,01	3,07	3,71
- JASA PENDIDIKAN	8,92	6,97	7,08	6,26	7,87	9,75	7,76	7,35	7,19	5,78	8,96	7,59
- JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	9,99	8,60	8,82	5,99	8,84	11,49	8,80	9,01	7,89	5,11	5,12	6,72
- JASA LAINNYA	9,85	8,98	9,22	9,93	8,92	9,71	9,45	9,68	9,99	9,32	7,19	9,02
PERTUMBUHAN BERDASARKAN PERMINTAAN												
- KONSUMSI RUMAH TANGGA	4,64	4,62	4,67	5,13	4,29	4,71	4,69	4,79	5,16	4,18	4,36	4,62
- KONSUMSI LNPR	4,33	4,43	4,62	6,71	9,20	9,87	7,62	12,41	12,89	7,51	8,15	10,90
- KONSUMSI PEMERINTAH	6,33	3,07	5,11	2,44	1,77	3,17	2,98	5,71	5,56	6,23	0,10	3,98
- PMTB	7,48	7,50	6,60	8,48	9,69	5,95	7,68	6,92	4,14	5,49	2,98	4,85
- EKSPOR LUAR NEGERI	15,17	13,54	13,69	15,31	12,53	7,12	12,02	3,45	-2,50	18,78	-0,62	4,92
- IMPOR LUAR NEGERI	25,22	9,58	18,51	45,75	47,81	21,73	32,61	6,13	-11,24	-19,64	-10,10	-9,33
- NET EKSPOR ANTARDAERAH	26,71	0,60	18,92	53,02	46,07	137,59	48,66	4,82	-3,40	-39,23	-0,14	-11,75
- PERUBAHAN INVENTORI	-59,42	4,97	0,26	1,84	181,17	153,84	5,92	1,22	-17,08	-17,13	-13,78	-5,13
EKSPOR												
- NILAI EKSPOR NON MIGAS (USD JUTA)	1.908	7.186	1.975	1.903	2.153	2.036	8.068	2.116	1.956	2.101	2.052	8.224
- VOLUME EKSPOR NON MIGAS (RIBU ØN)	748	2.906	714	710	793	805	3.022	767	762	850	834	3.212
IMPOR												
- NILAI IMPOR NON MIGAS (USD JUTA)	2.158	6.889	2.022	2.311	2.585	2.733	9.652	2.280	2.201	2.214	2.082	8.777
- VOLUME IMPOR NON MIGAS (RIBU ØN)	1.371	5.003	1.179	1.242	1.443	1.577	5.441	1.357	1.336	1.331	1.352	5.376
INDEKS HARGA KONSUMEN												
PROVINSI JAWA TENGAH	129,34	129,34	130,94	131,85	131,69	132,98	132,98	133,32	135,16	135,81	136,71	136,71
KOTA PURWOKERTO	128,05	128,05	129,19	130,53	130,30	131,87	131,87	131,99	133,63	134,10	134,88	134,88
KOTA SURAKARTA	126,21	126,21	127,76	128,86	127,98	129,30	129,30	130,05	131,89	131,83	133,10	133,10
KOTA SEMARANG	129,13	129,13	130,71	131,45	131,57	132,70	132,70	132,95	134,87	135,78	136,59	136,59
KOTA TEGAL	127,43	127,43	128,62	130,17	129,95	131,35	131,35	131,44	133,53	133,77	134,71	134,71
KOTA KUDUS	136,67	136,67	138,90	139,55	139,44	140,92	140,92	141,29	142,75	144,33	145,17	145,17
KOTA CILACAP	133,45	133,45	135,58	136,35	136,12	137,73	137,73	138,27	139,93	139,93	140,75	140,75
LAJU INFLASI TAHUNAN (% , YOY)												
PROVINSI JAWA TENGAH	3,71	3,71	3,39	2,72	2,79	2,82	2,82	1,82	2,52	3,13	2,80	2,80
KOTA PURWOKERTO	3,91	3,91	3,17	2,59	2,83	2,98	2,98	2,17	2,37	2,92	2,28	2,28
KOTA SURAKARTA	3,10	3,10	2,83	2,37	2,68	2,45	2,45	1,79	2,35	3,01	2,94	2,94
KOTA SEMARANG	3,64	3,64	3,45	2,82	2,74	2,77	2,77	1,71	2,60	3,20	2,93	2,93
KOTA TEGAL	4,03	4,03	3,78	3,12	2,98	3,08	3,08	2,19	2,58	2,94	2,56	2,56
KOTA KUDUS	4,17	4,17	3,54	2,57	2,90	3,11	3,11	1,72	2,29	3,51	3,02	3,02
KOTA CILACAP	4,41	4,41	3,82	2,77	3,03	3,21	3,21	1,98	2,63	2,80	2,19	2,19

*Mulai tahun 2014 perhitungan IHK menggunakan SBH 2012
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

B. Perbankan dan Sistem Pembayaran

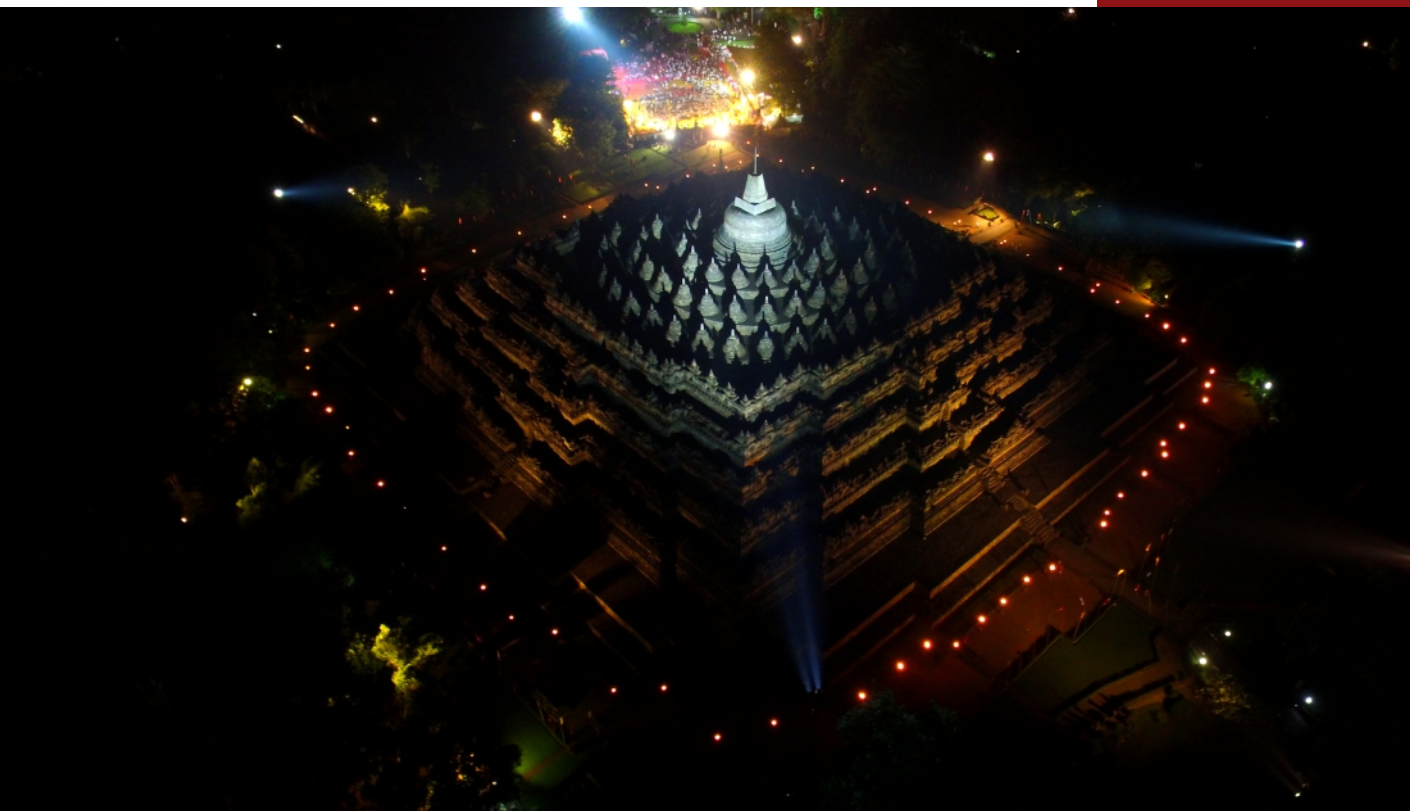
INDIKATOR	2017	2017	2018				2018	2019				2019
	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
PERBANKAN **)												
DANA PIHAK KETIGA (RP TRILIUN)	262,97	262,97	270,39	279,53	282,04	285,67	285,67	288,89	305,82	309,81	305,63	305,63
- GIRO	32,77	32,77	39,99	40,68	39,06	35,10	35,10	38,28	41,57	40,19	38,81	38,81
- TABUNGAN	138,37	138,37	135,66	142,07	144,28	152,72	152,72	148,23	154,72	159,31	168,29	168,29
- DEPOSITO	91,83	91,83	94,74	96,78	98,70	97,84	97,84	102,37	109,54	110,30	98,53	98,53
KREDIT (RP TRILIUN)	258,42	258,42	260,10	268,37	272,37	279,82	279,82	282,12	287,54	293,08	299,05	299,05
- MODAL KERJA	138,34	138,34	138,00	145,53	149,63	153,09	153,09	151,16	154,93	157,80	160,87	160,87
- KONSUMSI	41,83	41,83	42,50	43,31	41,60	43,45	43,45	47,05	47,82	48,80	50,44	50,44
- INVESTASI	78,26	78,26	79,59	79,53	81,14	83,28	83,28	83,91	84,79	86,47	87,74	87,74
LOAN TO DEPOSIT RATIO (%)	98,27	98,27	96,19	96,01	96,57	97,95	97,95	97,66	94,02	94,60	97,85	97,85
NPL GROSS (%)	2,22	2,22	2,43	2,43	2,59	2,45	2,45	2,48	2,38	2,88	4,17	4,17

**Data Perbankan merupakan data bank umum yang ada di Jawa Tengah (Lokasi Bank Pelapor)

C. Sistem Pembayaran

INDIKATOR	2017	2017	2018				2018	2019				2018
	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
SISTEM PEMBAYARAN												
TRANSAKSI KLIRING												
- RATA-RATA HARIAN NOMINAL TRANSAKSI (RP MILIAR)	679	709	653	714	702	645	2.715	574	621	609	621	2.410
- RATA-RATA HARIAN VOLUME TRANSAKSI (LEMBAR)	17.732	18.110	17.035	18.382	17.601	16.074	69.092	14.214	15.172	14.503	15.370	58.915
TRANSAKSI KAS (RP TRILIUN)												
-INFLOW	14,71	76,39	20,97	24,38	24,77	17,73	87,85	21,90	28,54	21,02	17,62	89,08
-OUTFLOW	15,98	60,34	11,34	29,85	11,41	16,81	69,40	11,04	18,61	14,63	19,86	64,14





RINGKASAN UMUM

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Pada triwulan IV 2019, perekonomian Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 5,34% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2019 yang sebesar 5,64% (yoy). Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut setara dibandingkan Kawasan Jawa (5,34%, yoy), namun lebih tinggi dibandingkan kinerja ekonomi nasional (4,97%, yoy).

Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 berasal dari komponen ekspor migas ke luar negeri, investasi dan konsumsi pemerintah. Penurunan kinerja ekspor luar negeri disebabkan proses *maintenance* kilang minyak sehingga ekspor migas Jawa Tengah tidak optimal. Perlambatan ekspor luar negeri tertahan membaiknya kinerja ekspor nonmigas. Permintaan produk ekspor nonmigas Jawa Tengah masih sangat tinggi karena berbentuk kebutuhan primer baik pangan, sandang, maupun papan. Sementara itu, perlambatan kinerja investasi disebabkan sikap *wait and see* investor terjadi pada triwulan IV 2019 yang ingin melihat bentuk realisasi kebijakan pemerintah pasca diterbitkannya Peraturan Presiden No. 79 tahun 2019..

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah disebabkan oleh melemahnya kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan. Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan mencatatkan perlambatan, yang salah satunya dipengaruhi oleh penurunan produksi industri pengilangan migas. Penurunan kinerja industri pengilangan minyak tersebut turut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan. Meski secara umum melambat, industri pengolahan nonmigas tercatat mengalami peningkatan yang disebabkan masih tingginya permintaan produk Jawa Tengah. Selain itu, kondisi lapangan usaha pertanian membaik dibanding triwulan sebelumnya yang dilanda musim kemarau berkepanjangan.



Secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mengalami perbaikan dibandingkan capaian 2018. Pada tahun 2019, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,41% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya (5,31%; yoy). Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja konsumsi pemerintah, konsumsi LNPRT, dan penurunan impor luar negeri menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada 2019. Namun, perlambatan pertumbuhan ekspor luar negeri dan konsumsi rumah tangga patut menjadi perhatian. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih ditopang oleh meningkatnya kinerja industri pengolahan dan perdagangan, sedangkan kinerja lapangan usaha pertanian pada 2019 justru menunjukkan perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh kondisi kemarau berkepanjangan yang mengganggu produksi. Dengan capaian ini, tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun laporan masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 5,02% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan mengalami peningkatan pada triwulan I 2020 dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, perbaikan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 bersumber dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi. Kinerja konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap kuat di awal tahun seiring dengan upaya penyesuaian UMK dan stabilnya *outlook* inflasi ke depan sehingga turut menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kegiatan investasi akan didorong kebijakan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Berdasarkan lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan terjadi pada lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan, perdagangan, serta pertanian. Percepatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terkait dengan upaya mengejar target produksi (*building stock*) dalam rangka persiapan pemenuhan kebutuhan momen Ramadan dan Lebaran di triwulan II.

Keuangan Pemerintah

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 mengalami peningkatan, yang masih ditopang oleh penerimaan komponen pajak daerah. Peningkatan belanja daerah yang lebih tinggi dari pendapatan menyebabkan APBD Jawa Tengah defisit pada tahun ini.

Pendorong utama realisasi pendapatan Jawa Tengah pada triwulan laporan berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (pangsa 55,83% dari pendapatan) dan dana perimbangan (pangsa 43,84% dari pendapatan). Dengan perkembangan ini, derajat otonomi fiskal Jawa Tengah sedikit meningkat dibandingkan triwulan lalu.

Realisasi belanja mengalami penurunan yang bersumber dari penurunan penyerapan tidak langsung. Komponen belanja yang mendorong rendahnya penyerapan belanja tidak langsung adalah penurunan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan penurunan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 lebih rendah dibandingkan triwulan III 2019. Berdasarkan disagregasi kelompok, penurunan inflasi tahunan Jawa Tengah terutama berasal dari kelompok transportasi, komunikasi, dan Jasa Keuangan; bahan makanan; Perumahan, Air, Listrik; serta Kesehatan. Meredanya tekanan inflasi pada kelompok transportasi bersumber dari terkendalinya tarif angkutan udara dan tarif kereta api.

Sementara, tekanan inflasi bersumber dari kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau. Utamanya sub-kelompok tembakau seiring dengan peningkatan harga komoditas rokok selama triwulan laporan.

Secara keseluruhan enam kota yang pantauan inflasi di Jawa Tengah mencatatkan penurunan tekanan inflasi. Penurunan tertinggi dicatatkan oleh Kota Purwokerto dengan tingkat inflasi tahunan sebesar 2,28% (yoy).

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan UMKM

Stabilitas sistem keuangan di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 masih relatif terjaga, walaupun kinerja intermediasi perbankan di Jawa Tengah mengalami penurunan sejalan dengan kinerja perekonomian yang tumbuh melambat. Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan bersumber dari pelemahan kinerja penjualan industri pengolahan serta lapangan usaha perdagangan besar & eceran. Namun demikian, kinerja lapangan usaha utama lainnya yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat mengalami perbaikan setelah kontraksi pada triwulan sebelumnya.

Rumah Tangga (RT) memegang peranan besar terhadap perekonomian (pangsa 60% terhadap PDRB) dan sistem keuangan (pangsa 30% terhadap kredit konsumsi) di Jawa Tengah. Pada triwulan laporan, penyaluran kredit RT masih bertumbuh dan mayoritas digunakan untuk membiayai multiguna, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB), dengan kualitas kredit yang masih terjaga.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Perkembangan indikator sistem pembayaran di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 sejalan peningkatan aktivitas perekonomian Jawa Tengah terutama dari sisi konsumsi rumah tangga. Nilai transaksi melalui SKNBI masih melanjutkan tren peningkatan dengan tumbuh 9,55% (qtq). Secara tahunan, penyelesaian nominal transaksi kliring di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya -9,12% (yoy).

Aliran uang di Jawa Tengah mencatatkan posisi net outflow sebesar Rp2,24 triliun, berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami net inflow sebesar Rp6,39 triliun. Transaksi menggunakan Uang Kertas Asing (UKA) di KUPVA BB mengalami peningkatan dari sisi pembelian UKA secara triwulanan

dan tahunan, seiring dengan meningkatnya transfer dana dari Luar Negeri ke Jawa Tengah. Untuk memperluas implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), Bank Indonesia mendorong penggunaan instrumen nontunai *Quick Response Indonesian Code* (QRIS). Perkembangan cara transaksi pembayaran ke arah non tunai berbasis elektronik tidak terlepas dari perkembangan teknologi, khususnya penetrasi internet dan telepon seluler di masyarakat. Saat ini, masyarakat di daerah pelosok dapat dengan mudah melakukan transaksi keuangan menggunakan telepon seluler melalui aplikasi mobile banking, dompet elektronik, dan *e-commerce*.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah membaik pada Agustus 2019 di mana jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan yang diiringi ketersediaan lapangan kerja yang baik. Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada triwulan III 2019 mengalami perbaikan, tercermin dari peningkatan serapan jumlah tenaga kerja yang diiringi ketersediaan lapangan kerja yang baik. Perkembangan positif aspek ketenagakerjaan di Jawa Tengah juga dilihat dari peningkatan kualitas tenaga kerja di mana terjadi peningkatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan sekolah menengah ke atas. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami perbaikan. Pada triwulan IV 2019 NTP pada seluruh subsektor mengalami peningkatan dibanding NTP pada triwulan III 2019. Peningkatan paling signifikan terjadi pada subsektor tanaman pangan yang didorong peningkatan harga komoditas pada subsektor tersebut.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan II 2019 diperkirakan masih mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode tersebut diproyeksikan berada di kisaran 5,4%-5,8% (yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran, perbaikan bersumber dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta investasi. Kinerja

ekspor luar negeri diperkirakan terhambat merebaknya virus COVID-19 yang melemahkan kinerja industri berbagai negara di dunia. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada dua lapangan usaha utama Jawa Tengah, yaitu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Momen Ramadan dan Idulfitri serta percepatan pembangunan Jawa Tengah menjadi pendorong utama peningkatan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020.

Prospek Perekonomian Daerah

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada 2020 diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan 2019, meski relatif terbatas. Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh pada rentang 5,4%-5,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 yang sebesar 5,41% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong masih kuatnya permintaan domestik, akselerasi konsumsi pemerintah dan investasi, serta permintaan produk ekspor Jawa Tengah yang masih cukup baik. Dari sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Potensi ekonomi yang tidak optimal di 2020 akibat pengaruh terbatasnya produksi global akibat virus COVID-19, diperkirakan membuat perekonomian Jawa Tengah terakselerasi di 2021.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan II 2020 diperkirakan mengalami peningkatan. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi berasal dari kelompok makanan; kelompok air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya; serta kelompok transportasi. Sesuai dengan mandatnya, Bank Indonesia akan berusaha menjaga capaian inflasi berada pada sasaran inflasi 2020, yaitu $3\pm 1\%$ (yoy). Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian tarif energi sejalan dengan kebijakan

lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan komoditas pangan strategis, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah sudah mempersiapkan berbagai program pengendalian inflasi di tahun 2020.





PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

Perekonomian Provinsi Jawa Tengah triwulan IV 2019 tumbuh melambat dibandingkan triwulan III 2019. Sementara pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding 2018.

- Pada triwulan IV 2019, perlambatan terjadi pada ekspor luar negeri, investasi, dan konsumsi pemerintah. Lapangan usaha yang melambat yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Ketika kondisi ekonomi mengalami perlambatan, ekspor nonmigas ke luar negeri masih mencatatkan pertumbuhan positif.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 yang meningkat didorong peningkatan konsumsi pemerintah dan penurunan defisit neraca perdagangan luar negeri. Secara sektoral, peningkatan terlihat dari industri pengolahan dan perdagangan. Pengilangan minyak yang telah memproduksi bahan bakar berkualitas tinggi menjadi salah satu pendorong peningkatan pertumbuhan ekonom.



1.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL TRIWULAN IV 2019¹

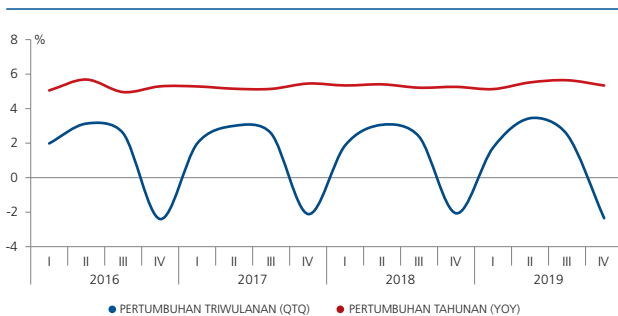
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 tercatat sebesar 5,34% (yoy).

Capaian tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (5,64%; yoy). Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat pada level 4,97% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif sama dengan kondisi di Kawasan Jawa sebesar 5,34% (yoy). Lebih lanjut, secara triwulanan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan sebesar -2,35% (qtq), atau lebih dalam dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh negatif 2,07% (qtq).

Perlambatan pertumbuhan yang terjadi di Jawa Tengah sejalan dengan perekonomian kawasan Jawa yang tercatat juga melambat. Selain Jawa Tengah, perlambatan di kawasan Jawa juga terjadi di Provinsi Jawa Barat, yang

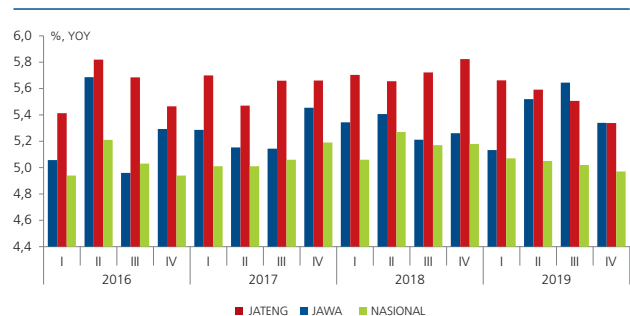
tumbuh melambat menjadi 4,11% (yoy). Sementara provinsi lain terpantau tumbuh terakselerasi pada periode laporan, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (6,16%), DKI Jakarta (5,96%), Banten (5,90%), dan Jawa Timur (5,54%).

Pada triwulan IV 2019, perekonomian Provinsi Jawa Tengah menyumbang 8,55% terhadap perekonomian Nasional, atau 14,19% terhadap perekonomian kawasan Jawa. Nilai ini tidak banyak berubah dibandingkan periode sebelumnya. Dengan sumbangan tersebut, Jawa Tengah menjadi provinsi penyumbang keempat terbesar dalam perekonomian nasional maupun kawasan Jawa, setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Perekonomian kawasan Jawa secara dominan masih disumbang oleh Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur dengan kedua daerah ini mencapai pangsa lebih dari 50%.



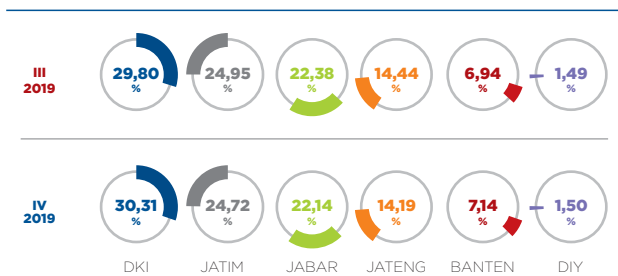
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

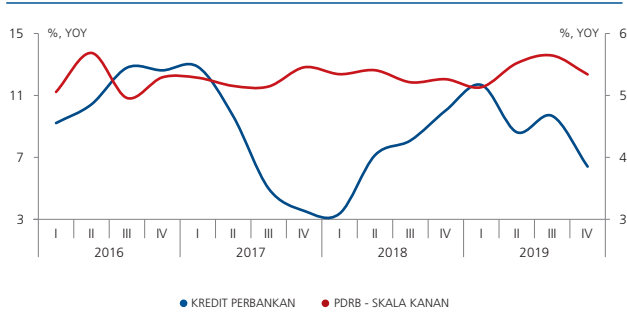
Grafik 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (% yoy)

PROVINSI	TW III 2019	TW IV 2019
DKI JAKARTA	5.89	5.96
BANTEN	5.41	5.90
JABAR	5.15	4.11
JATENG	5.64	5.34
DIY	6.01	6.16
JATIM	5.32	5.54
JAWA	5.51	5.34

Sumber: BPS, diolah

1. Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah diambil dari Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV 2018 dengan menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008 yang dikeluarkan BPS Provinsi Jawa Tengah. Apabila terdapat perbedaan angka pertumbuhan tahunan yang tertera pada BRS periode saat ini dengan perhitungan ADHK rilis periode ini dengan periode sebelumnya, yang menjadi acuan dalam penulisan LPP adalah angka PDRB ADHK berdasarkan BRS pada saat periode laporan. Hal ini dimungkinkan mengingat besaran PDRB tahun 2018, 2017, dan 2016 masih bersifat sementara.

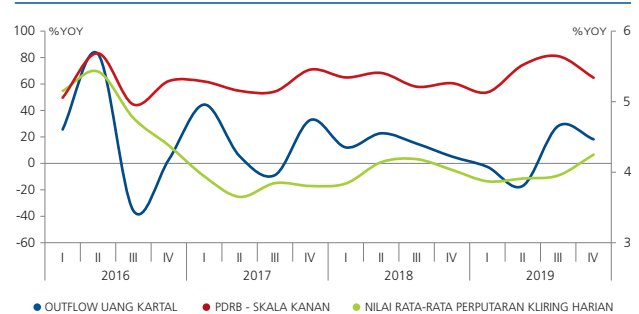


Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi

Kegiatan ekonomi dapat tercermin dari beberapa sarana pendukung, seperti kebutuhan akan pembiayaan. Seiring dengan aktivitas ekonomi Jawa Tengah yang melambat pada triwulan IV 2019, kebutuhan akan pembiayaan juga terpantau melambat. Hal tersebut tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang tumbuh lebih rendah pada periode tersebut. Pada triwulan laporan, pertumbuhan kredit perbankan yang disalurkan di Jawa Tengah tercatat 6,41% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 9,68% (yoy).² Selanjutnya, aktivitas sistem pembayaran juga sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan laporan. Aliran keluar (*outflow*) uang kartal tercatat tumbuh lebih tinggi dibanding aliran masuk (*inflow*) uang kartal. Hal ini menyebabkan terjadi netoutflow sebesar Rp2,24 triliun, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan aliran masuk uang masyarakat ke perbankan dari hasil produksi berkurang seiring dengan perlambatan kegiatan perekonomian di Jawa Tengah.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 berasal dari komponen ekspor luar negeri, investasi dan konsumsi pemerintah. Sementara konsumsi rumah tangga mengalami akselerasi dari triwulan sebelumnya. Impor luar negeri Jawa Tengah masih tercatat tumbuh negatif, meskipun dengan level pertumbuhan yang lebih rendah dibanding dua triwulan sebelumnya. Sebagai komponen pengurang PDRB, tingginya pertumbuhan impor menahan perekonomian Jawa Tengah untuk tumbuh lebih tinggi.



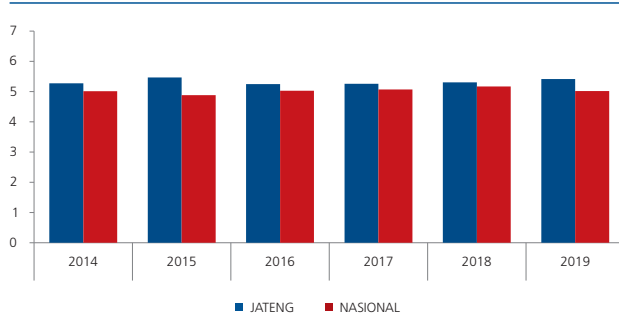
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.5 Pertumbuhan Tahunan Outflow Uang Kartal, Rata-Rata Perputaran Kliring Harian, dan Pertumbuhan Ekonomi

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan, serta konstruksi menjadi penahan laju pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, perlambatan pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta informasi dan komunikasi turut menahan pertumbuhan pada triwulan laporan. Namun demikian, meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dibanding triwulan sebelumnya mampu menjadi faktor penahan perlambatan pertumbuhan ekonomi lebih dalam.

Secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mengalami perbaikan dibandingkan capaian 2018, meski terjadi perlambatan di triwulan akhir 2019. Pada tahun 2019, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,41% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya (5,31%; yoy). Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja konsumsi pemerintah, konsumsi LNPRT, dan penurunan impor luar negeri menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada 2019. Akan tetapi, komponen ekspor luar negeri dan konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan pertumbuhan selama tahun 2019. Sementara dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih ditopang oleh meningkatnya kinerja industri pengolahan dan perdagangan. Sementara itu, kinerja lapangan usaha pertanian pada 2019 justru menunjukkan perlambatan pertumbuhan akibat musim kemarau berkepanjangan yang mengganggu produksi. Dengan capaian ini, tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun laporan masih

2. Pertumbuhan kredit pada Bab I menggunakan lokasi proyek Jawa Tengah, yang berarti kredit yang disalurkan oleh bank se-Indonesia ke debitur atau proyek di Jawa Tengah.



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Jawa Tengah dan Nasional

lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 5,02% (yoy).

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran
Berdasarkan sisi pengeluaran, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan pangsa 61,57%. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi juga memberikan kontribusi signifikan, yaitu sebesar 33,72%. Lebih lanjut, pangsa pengeluaran konsumsi

pemerintah sebesar 10,98%, ekspor luar negeri sebesar 9,18%, dan net ekspor antardaerah sebesar 0,88%. Pangsa impor luar negeri, sebagai elemen pengurang dalam perekonomian Jawa Tengah, juga berkontribusi cukup besar, yaitu 15,54%. Pangsa impor luar negeri mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah karena lebih rendah dibanding rata-rata periode yang sama dalam tiga tahun terakhir (16,36%).

Pertumbuhan ekonomi yang melambat pada periode laporan terutama didorong oleh penurunan kinerja investasi, konsumsi pemerintah, dan ekspor luar negeri. Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen pengeluaran dengan pangsa terbesar mengalami peningkatan pertumbuhan dibanding triwulan sebelumnya. Sedangkan, impor luar negeri yang merupakan komponen pengurang PDRB menunjukkan pertumbuhan negatif melanjutkan tren pada periode dua triwulan terakhir.

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018**				2018**	2019**				2019**
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
KONSUMSI RUMAH TANGGA	185.074	190.091	193.483	196.161	764.808	198.652	205.112	206.664	211.520	821.948
KONSUMSI LNPRT	3.418	3.630	3.651	3.793	14.492	3.990	4.207	4.050	4.196	16.443
KONSUMSI PEMERINTAH	15.460	21.619	23.847	37.792	98.717	16.376	23.332	26.002	37.729	103.440
INVESTASI	93.577	101.074	108.660	110.438	413.749	105.188	109.855	118.594	115.849	449.486
EKSPOR LUAR NEGERI	29.182	29.090	33.267	32.329	123.868	31.599	29.422	35.988	31.547	128.555
IMPOR LUAR NEGERI	47.989	56.169	66.100	64.725	234.981	51.454	49.719	49.370	53.403	203.947
NET EKSPOR ANTARDAERAH	18.601	19.629	22.109	10.262	70.600	15.058	12.153	4.939	3.020	35.171
PERUBAHAN INVENTORI	7.617	6.895	8.104	-5.414	17.202	8.490	5.243	4.539	-6.910	11.362
P D R B	304.939	315.858	327.021	320.636	1.268.455	327.899	339.605	351.406	343.548	1.362.457

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018**				2018**	2019**				2019**
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
KONSUMSI RUMAH TANGGA	135.931	138.997	140.425	141.189	556.541	142.435	146.169	146.301	147.349	582.253
KONSUMSI LNPRT	2.278	2.392	2.402	2.479	9.551	2.593	2.718	2.600	2.681	10.593
KONSUMSI PEMERINTAH	9.794	13.188	14.712	23.638	61.331	10.242	14.016	15.852	23.661	63.771
INVESTASI	65.883	70.280	74.464	74.418	285.045	70.442	73.210	78.592	76.634	298.877
EKSPOR LUAR NEGERI	20.558	20.244	22.250	21.527	84.578	21.329	19.792	26.226	21.394	88.741
IMPOR LUAR NEGERI	29.986	33.699	37.707	37.424	138.817	31.824	29.911	30.491	33.644	125.871
NET EKSPOR ANTARDAERAH	19.510	20.650	21.438	13.012	74.611	20.268	19.593	12.989	12.994	65.845
PERUBAHAN INVENTORI	4.525	3.446	3.095	-2.743	8.323	4.734	2.909	2.619	-2.365	7.897
P D R B	228.492	235.495	241.079	236.097	941.164	240.219	248.495	254.687	248.704	992.106

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.4 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ADHK menurut Pengeluaran (% , YOY)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018**				2018**	2019**				2019**
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
KONSUMSI RUMAH TANGGA	4,67	5,13	4,29	4,71	4,69	4,79	5,16	4,18	4,36	4,62
KONSUMSI LNPRT	4,62	6,71	9,20	9,87	7,62	13,85	13,64	8,23	8,15	10,90
KONSUMSI PEMERINTAH	5,66	3,57	3,25	1,44	2,98	4,57	6,28	7,75	0,10	3,98
INVESTASI	6,60	8,48	9,69	5,95	7,68	6,92	4,17	5,54	2,98	4,85
EKSPOR LUAR NEGERI	13,27	14,85	12,40	7,10	11,77	3,75	(2,23)	17,87	(0,62)	4,92
IMPOR LUAR NEGERI	18,51	45,75	47,81	21,73	32,61	6,13	(11,24)	(19,14)	(10,10)	(9,33)
NET EKSPOR ANTARDAERAH	18,83	52,39	45,56	142,01	49,00	3,89	(5,12)	(39,41)	(0,14)	(11,75)
PERUBAHAN INVENTORI	0,26	1,84	172,37	153,84	4,66	4,62	(15,58)	(15,40)	(13,78)	(5,13)
P D R B	5,34	5,41	5,21	5,26	5,31	5,13	5,52	5,64	5,34	5,41

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

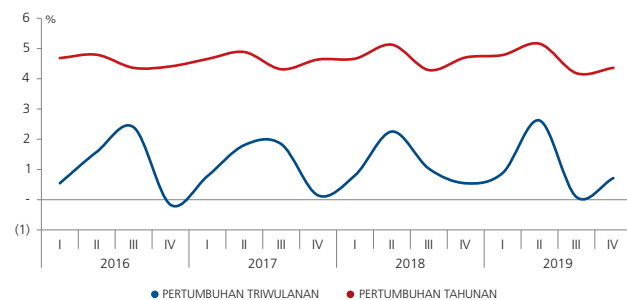
1.1.1.1 Pengeluaran Konsumsi

Secara keseluruhan, pengeluaran konsumsi mencatatkan perlambatan pertumbuhan pada triwulan laporan. Perlambatan pertumbuhan terutama terjadi komponen konsumsi pemerintah. Sementara, konsumsi rumah tangga menjadi komponen yang mengalami peningkatan sehingga berperan menahan agar perlambatan konsumsi lebih jauh.

Konsumsi rumah tangga sebagai komponen pengeluaran dengan pangsa terbesar tumbuh 4,36% (yoy) pada triwulan IV 2019, meningkat dibandingkan triwulan IV 2018 yang sebesar 4,18% (yoy). Secara triwulanan, konsumsi rumah tangga triwulan laporan tumbuh 0,72% (qtq), juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 0,54% (qtq).

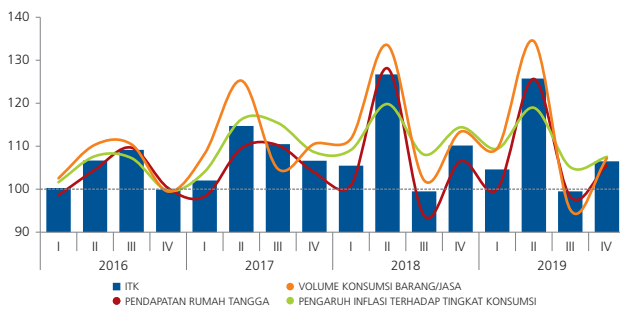
Percepatan konsumsi rumah tangga terjadi seiring dengan pola konsumsi masyarakat pada akhir tahun, di mana terdapat banyak promosi menjelang libur Hari Raya Natal, Tahun Baru, serta libur anak sekolah sehingga masyarakat banyak mengalokasikan pendapatannya untuk melakukan konsumsi pada triwulan IV. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) menunjukkan bahwa berdasarkan jenis konsumsi, penguatan pengeluaran konsumsi rumah tangga terutama terjadi pada pengeluaran untuk pendidikan dan rekreasi budaya. Pangsa konsumsi rumah tangga yang hampir mencapai 60% dari total PDRB menyebabkan penguatan kinerja konsumsi rumah tangga berpengaruh besar terhadap tingginya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan.

Penguatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini terkonfirmasi dari hasil Survei Tendensi Konsumen yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan survei tersebut, optimisme rumah tangga terhadap kondisi ekonomi rumah tangga triwulan laporan meningkat. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh nilai Indeks Tendensi Konsumen (ITK) triwulan IV 2019 yang sebesar 106,48; lebih tinggi dari ITK triwulan III 2019 sebesar 99,48. Perbaikan optimisme terhadap kondisi ekonomi rumah tangga ini terutama bersumber dari peningkatan volume konsumsi barang/jasa, yang tercermin dari indeks 107,54, lebih tinggi dibanding indeks triwulan sebelumnya (95,22). Meningkatnya volume konsumsi barang/jasa pada triwulan IV 2019 disebabkan oleh kenaikan konsumsi makanan dan non-makanan sejalan dengan adanya momen Natal dan Tahun Baru serta liburan sekolah. Konsumsi non-makanan yang meningkat antara lain pakaian, pembelian pulsa ponsel, pendidikan, rekreasi, transportasi, serta perawatan kesehatan dan kecantikan. Lebih lanjut, peningkatan pendapatan rumah tangga dibandingkan triwulan sebelumnya juga turut



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga



Grafik 1.8 Indeks Tendensi Konsumen

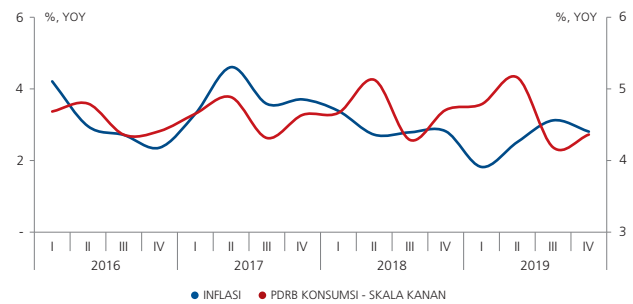
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

mendorong ekonomi konsumen, tercermin dari indeks pendapatan rumah tangga sebesar 105,60. Optimisme terhadap pendapatan rumah tangga di periode laporan kembali meningkat, setelah tercatat di bawah angka 100 yaitu sebesar 98,27 pada triwulan III 2019.

Percepatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini juga terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, indeks penjualan riil pada triwulan laporan meningkat menjadi sebesar 169,63 dari triwulan III 2019 sebesar 160,02. Peningkatan indeks penjualan riil terutama didorong oleh kenaikan penjualan kelompok komoditas peralatan dan komunikasi, peralatan rumah tangga, barang budaya dan rekreasi.

Faktor kestabilan harga juga mendukung peningkatan kinerja konsumsi masyarakat. Pada triwulan IV 2019 Jawa Tengah mencatatkan inflasi sebesar 2,80% (yoy) atau masih berada di bawah rentang sasaran inflasi tahun 2019 sebesar 3,5%±1%. Lebih lanjut, peningkatan kegiatan konsumsi rumah tangga juga tercermin dari konsumsi listrik kelompok rumah tangga yang tumbuh 6,34% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibanding triwulan III 2019 (4,88%; yoy).

Kinerja konsumsi yang meningkat juga terindikasi dari kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) milik perseorangan. Masyarakat ditengarai meningkatkan pengeluaran konsumsinya pada periode laporan dan mengurangi simpanan di bank. Hal tersebut tercermin dari dana pihak ketiga (DPK) rumah tangga di perbankan Jawa Tengah pada triwulan laporan yang tumbuh melambat

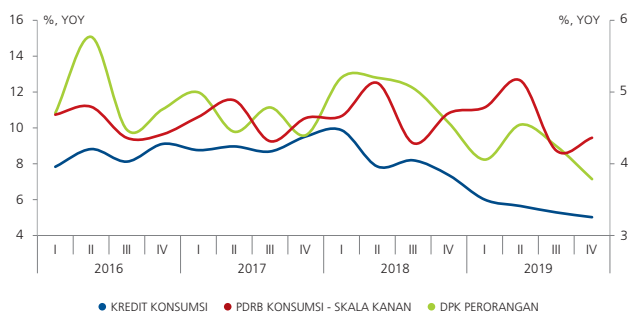


Grafik 1.9 Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan DPK oleh golongan nasabah perorangan menunjukkan perlambatan dari 8,99% (yoy) menjadi 7,14% (yoy) pada periode laporan. Sementara itu, penyaluran kredit konsumsi di Jawa Tengah oleh perbankan tumbuh 5,02% (yoy); melambat dibanding pertumbuhan pada triwulan III 2019 sebesar 5,29% (yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat menghindari menambahkan porsi cicilan dalam pengeluaran. Berdasarkan jenis, pelemahan penyaluran kredit konsumsi ini terutama didorong oleh kredit multiguna lainnya. Sementara itu, kinerja penyaluran Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) mengalami pelemahan. Kinerja penyaluran KKB hanya tumbuh 1,98% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan III 2019 4,34% (yoy), sedangkan KPR melambat dari 9,02% (yoy) menjadi 6,61% (yoy). Peningkatan terjadi pada Kredit Multiguna (KMG) yang meningkat dari 4,35% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 6,40% (yoy) pada periode laporan. Kredit pembelian peralatan rumah tangga juga terpantau tumbuh meningkat pada periode ini.

Secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan menjadi 4,62% (yoy), dari pertumbuhan 4,69% (yoy) pada tahun 2018. Beberapa kebijakan seperti penyaluran stimulus fiskal misalnya bansos, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan, serta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), turut membantu menjaga daya beli masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap masih kuatnya konsumsi pada 2019. Konsumsi rumah tangga



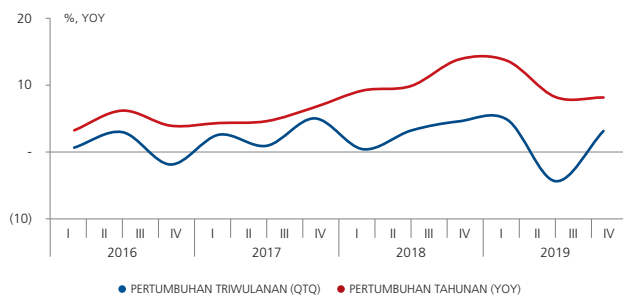
Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.10 Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK Perorangan, dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

Jawa Tengah didominasi oleh pengeluaran dalam bentuk makanan dan minuman; transportasi dan komunikasi; serta perumahan dan perlengkapan rumah tangga. Ketiga komponen tersebut memiliki pangsa mencapai 77,10% dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2019.

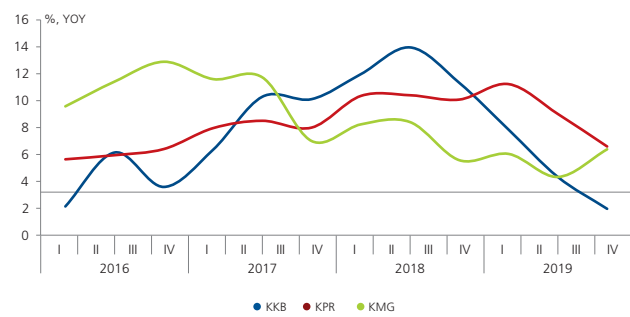
Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRRT) pada triwulan IV 2019 tumbuh 8,15% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2019 yang tercatat 8,23% (yoy). Perlambatan pertumbuhan pada triwulan laporan terutama dipengaruhi oleh telah usainya kegiatan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang berlangsung pada semester pertama 2019. Dinamika kegiatan ormas dan partai politik mulai meningkat di periode laporan seiring dengan awal masa kampanye pasca penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta pencalonan presiden dan wakil presiden tanggal 21 September 2018.

Secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan konsumsi LNPRRT terakselerasi menjadi 10,90% (yoy),



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.12 Pertumbuhan Konsumsi LNPRRT



Grafik 1.11 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi

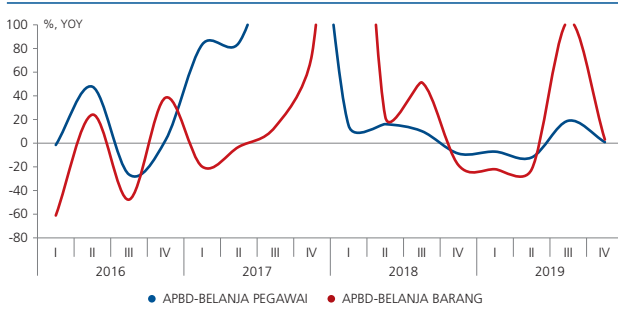
lebih tinggi dibanding tahun 2018 yang tumbuh 7,62% (yoy). Dinamika kegiatan ormas dan partai politik meningkat di tahun 2019 seiring dengan berlangsungnya aktivitas politik secara nasional dalam rangka pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta presiden dan wakil presiden. Meskipun kembali terakselerasi, komponen ini hanya menyumbang 1,21% dari total perekonomian Jawa Tengah tahun 2019, sehingga penguatan pertumbuhan komponen ini tidak memberikan dampak signifikan secara langsung. Namun demikian, dampak tidak langsung perbaikan kinerja komponen ini terhadap perekonomian terutama melalui peningkatan konsumsi rumah tangga.

Berbeda dengan sisi swasta, pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan IV 2019. Konsumsi pemerintah tumbuh 0,10% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,75% (yoy). Secara triwulanan, komponen pengeluaran ini tercatat tumbuh 49,26% (qtq) pada triwulan laporan, juga lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 60,68% (qtq).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.13 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah

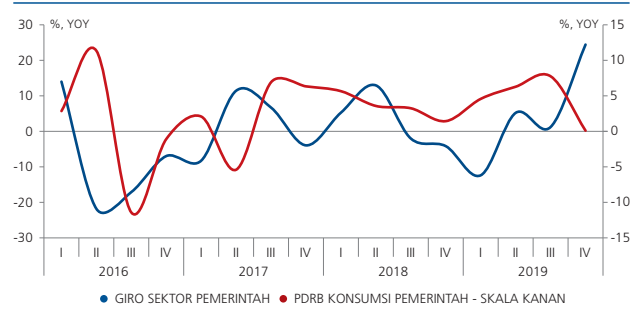


Grafik 1.14 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Perkembangan konsumsi pemerintah mengindikasikan hal positif bagi kondisi fiskal Jawa Tengah. Perlambatan yang terjadi lebih disebabkan proses belanja barang yang lebih banyak terjadi pada triwulan III 2019 sehingga realisasi sepanjang triwulan IV tidak terlalu banyak. Belanja barang yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah tumbuh 3,07% (yoy), lebih rendah dibanding 103,26% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Realisasi belanja barang yang bersumber dari APBN juga mengalami perlambatan dari 21,44% (yoy) pada triwulan III 2019 menjadi 8,09% pada triwulan laporan. Instruksi Presiden Republik Indonesia agar Jawa Tengah meningkatkan kapasitas ekonominya turut mendorong aktivitas belanja lebih cepat diselesaikan sebelum akhir tahun. Perlambatan realisasi belanja pada triwulan laporan tercermin dari peningkatan simpanan giro pemerintah yang terdapat di perbankan yang berada di Jawa Tengah, yaitu menjadi tumbuh sebesar 24,43% (yoy), lebih tinggi dibanding 1,22% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan jumlah dana pemerintah yang berada di perbankan menandakan pemerintah telah lebih aktif dalam melakukan pengeluaran belanja pemerintah pada periode sebelumnya sehingga pendapatan yang masuk merupakan sisa anggaran.

Kinerja pengeluaran konsumsi pemerintah secara keseluruhan tahun 2019 tumbuh sebesar 3,98% (yoy), meningkat dibanding tahun 2018 yang tumbuh 2,98% (yoy). Dari sisi penyaluran APBN, peningkatan terjadi pada komponen belanja pegawai dan dana desa. Kedua komponen tersebut masing-masing



Grafik 1.15 Pertumbuhan Giro Pemerintah dan PDRB Konsumsi Pemerintah

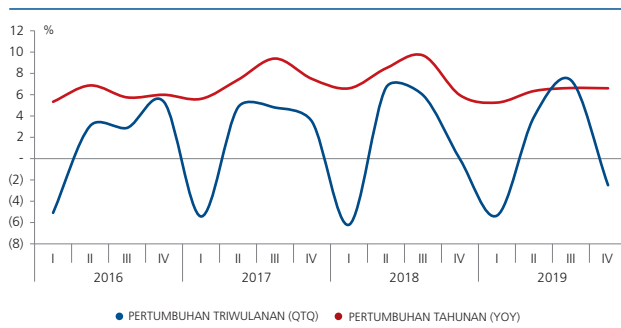
Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

tumbuh 6,23% (yoy) dan 17,08% (yoy), atau lebih tinggi dibanding tahun 2018 yang sebesar 1,38% (yoy) dan 5,46% (yoy). Peningkatan belanja pegawai didorong kenaikan gaji guru sekolah di Jawa Tengah sebagai bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara, belanja barang mengalami perlambatan dari 33,54% (yoy) menjadi 8,0% (yoy).

Seperti halnya konsumsi LNPRT, sumbangan konsumsi pemerintah tidak terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi, namun komponen pengeluaran ini memberikan dampak secara tidak langsung yang dapat memicu pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi lebih tinggi. Sebagai contoh adalah pembayaran gaji, hibah, dan bantuan sosial pada konsumsi pemerintah. Kegiatan tersebut dapat memberikan pendapatan tambahan bagi rumah tangga dan membantu daya beli masyarakat yang terlibat sehingga berpotensi mendorong pengeluaran konsumsi rumah tangga.

1.1.1.2 Pengeluaran Investasi

Pada triwulan IV 2019, investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 6,60% (yoy), sedikit lebih rendah dibanding triwulan lalu yang tumbuh 6,63% (yoy). Secara triwulanan, investasi tercatat tumbuh negatif 2,49% (qtq), lebih dalam dibanding triwulan IV 2018 yang tercatat tumbuh -0,06% (qtq). Perlambatan kinerja ini diindikasikan bersumber dari melemahnya investasi bangunan.

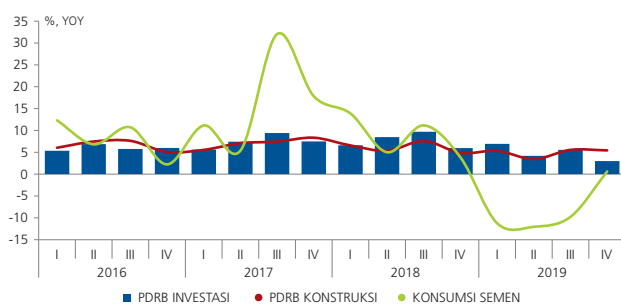


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.16 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Melambatnya pertumbuhan investasi pada triwulan laporan terutama dipengaruhi oleh investasi bangunan dikarenakan proyek infrastruktur strategis sebagian telah usai di Jawa Tengah. Beberapa proyek infrastruktur pemerintah telah memasuki tahap finalisasi pada triwulan sebelumnya, seperti peningkatan konektivitas jalur darat dan beberapa proyek bendungan di Jawa Tengah. Hal ini dikonfirmasi oleh melambatnya alokasi dan realisasi belanja modal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke Provinsi Jawa Tengah triwulan IV 2019. Realisasi belanja modal tersebut meningkat 6,46% (yoy) atau lebih rendah dibanding pencapaian periode yang sama tahun 2018 sebesar 19,92% (yoy).

Melemahnya kinerja investasi juga tercermin pertumbuhan PDRB lapangan usaha konstruksi yang juga melambat menjadi 5,43% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dari triwulan III 2019 (5,55%; yoy). Kinerja investasi yang melambat juga diindikasikan dalam bentuk nonbangunan, yang tercermin dari impor barang modal yang mulai mengalami pertumbuhan negatif



Sumber: Kemenperin, Kemendag, BPS Provinsi Jawa Tengah

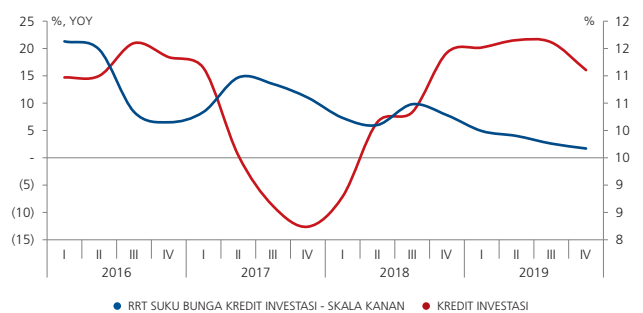
Grafik 1.17 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB Konstruksi, dan Konsumsi Semen

24,19% (yoy) dari pertumbuhan 3,51% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Melambatnya impor barang modal terutama berupa impor mesin, perlengkapan transportasi, dan bahan bakar industri.

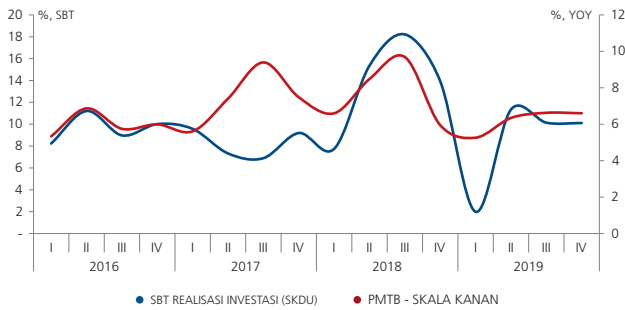
Selain itu, kebutuhan pembiayaan untuk kegiatan investasi mengalami perlambatan pada triwulan IV 2019. Pertumbuhan kredit yang disalurkan bank umum untuk kegiatan investasi di Jawa Tengah mengalami perlambatan menjadi 16,04% (yoy), dari tumbuh 21,12% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, rata-rata tertimbang suku bunga kredit investasi cenderung turun dari 9,76% menjadi 9,67% pada periode laporan, menyesuaikan penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

Pada sisi swasta, melemahnya kegiatan investasi terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil SKDU, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) realisasi investasi pada triwulan laporan tercatat 10,11%; lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 10,14%. Hasil survei menunjukkan bahwa perlambatan terjadi pada lapangan usaha konstruksi, perdagangan, transportasi, dan komunikasi.

Perlambatan kegiatan investasi juga tercermin dari hasil kegiatan *liaison* pada triwulan laporan. Nilai *likert scale* (LS) realisasi investasi triwulan laporan sebesar 0,97, cenderung *stagnan* dibanding LS triwulan sebelumnya sebesar 0,96. Meskipun terdapat pelemahan kegiatan investasi, optimisme pelaku usaha terhadap kondisi perekonomian ke depan masih terjaga dengan baik. Hal



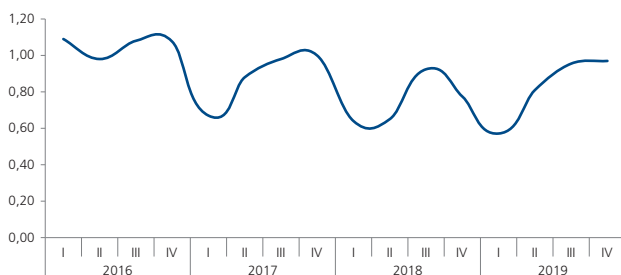
Grafik 1.18 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga Kredit Investasi



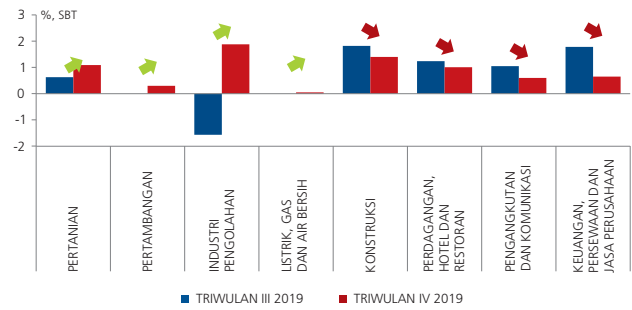
Grafik 1.19 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi

tersebut tercermin dari investasi rutin maupun *multiyears* yang masih dilakukan oleh pelaku usaha. Investasi rutin yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas pabrik melalui perawatan dan peremajaan mesin. Sementara investasi *multiyears* yang dilakukan antara lain pembangunan kantor dan pabrik baru melalui penambahan lahan, perluasan pabrik, penambahan lini produksi, penambahan dan perluasan *outlet* penjualan, pembelian mesin baik untuk efisiensi produksi, dan infrastruktur jaringan pada industri telekomunikasi. Meski tidak melakukan investasi yang besar, pihak swasta berupaya mempertahankan keberlangsungan usaha sembari menunggu perkembangan dukungan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Perilaku *wait and see* investor sebagaimana disebutkan di atas, tercermin dari perlambatan realisasi penanaman modal yang terjadi mulai triwulan II 2019. Perlambatan realisasi penanaman modal terjadi pada investasi yang berasal dari pihak asing maupun dari dalam negeri. Pada triwulan IV 2019 penanaman modal asing di Jawa Tengah



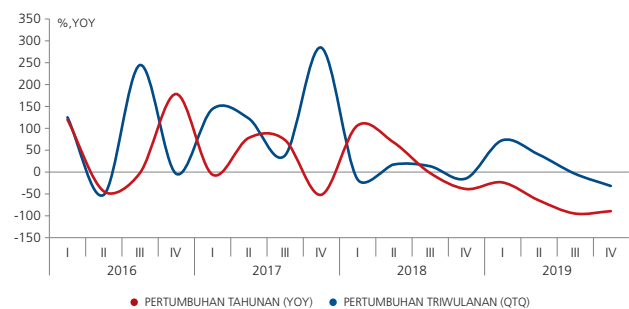
Grafik 1.21 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)



Grafik 1.20 Perkembangan SBT Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha (hasil SKDU)

adalah sebesar USD510,25 juta; atau tumbuh negatif 31,73% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan III 2019 yang tumbuh -3,42% (yoy). Sementara itu, nilai penanaman modal dalam negeri pada triwulan laporan sebesar Rp444,64 miliar; terkontraksi 89,34% (yoy), melanjutkan tren negatif triwulan sebelumnya yang sebesar -94,65% (yoy).

Investasi Jawa Tengah secara kumulatif tercatat tumbuh 4,85% (yoy) pada 2019, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang sebesar 7,68% (yoy). Perlambatan ini terjadi baik dalam bentuk bangunan maupun nonbangunan yang mengalami penurunan tingkat pertumbuhan. Investasi bangunan tumbuh 4,68% (yoy), lebih rendah dibanding tahun sebelumnya 6,29% (yoy). Sedangkan investasi nonbangunan mengalami perlambatan yang cukup dalam menjadi 5,84% (yoy) pada 2019 dari 16,46% (yoy) pada 2018. Investasi bernilai besar memasuki tahap finalisasi pada tahun 2019 dimana beberapa proyek telah mulai beroperasi. PLTU Batang, Tol Trans Jawa, Bendungan Gondang, Bendungan Logung, dan pembangkit listrik



Grafik 1.22 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri

Cilacap merupakan beberapa hasil investasi yang telah beroperasi pada 2019.

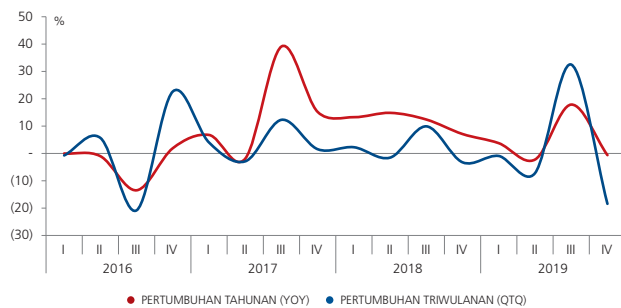
Penyelesaian proyek infrastruktur konektivitas dan infrastruktur lainnya di Jawa Tengah berdampak positif dalam menarik minat investasi swasta di Jawa Tengah. Namun, sikap *wait and see* investor selama 2019 disebabkan Peraturan Presiden No. 79 tahun 2019 yang mengatur tentang percepatan pembangunan di Jawa Tengah, baru dikeluarkan pada November 2019. Bentuk kebijakan baik infrastruktur maupun kebijakan teknis lain akan ditunggu realisasinya mulai dari 2020 sehingga pelaku usaha dapat menentukan strategi produksi dan pemasaran yang akan dilakukan.

1.1.1.3 Ekspor dan Impor Luar Negeri

1.1.1.3.1 Ekspor Luar Negeri

Pada triwulan IV 2019, kinerja ekspor luar negeri mencatatkan pertumbuhan sebesar -0,62% (yoy).

Kinerja ekspor luar negeri mengalami penurunan jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 17,87% (yoy). Secara triwulanan, ekspor luar negeri pada triwulan IV 2019 tumbuh negatif 18,43% (qtq), atau lebih dalam dibanding pertumbuhan pada triwulan yang sama tahun sebelumnya (-3,25%; qtq). Penurunan kinerja ekspor didorong pelemahan ekspor migas dari Jawa Tengah yang tidak lebih baik dibanding triwulan sebelumnya. Sedangkan, ekspor nonmigas justru mengalami peningkatan yang positif meski dibayangi permintaan domestik global yang cenderung melandai serta risiko ketegangan hubungan dagang antarnegara khususnya Amerika Serikat dan Tiongkok.

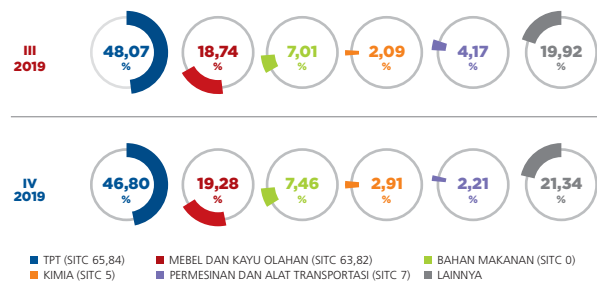


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.23 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

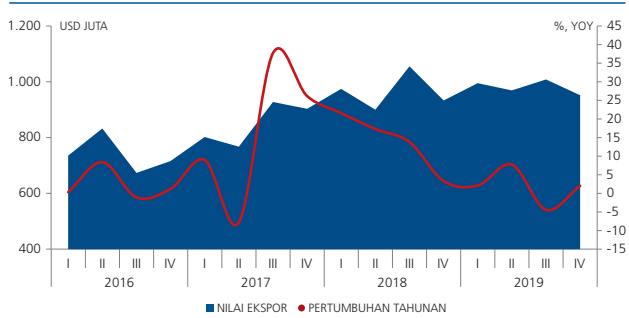
Ekspor luar negeri nonmigas Jawa Tengah didominasi oleh ekspor komoditas tekstil dan produk tekstil atau TPT (SITC kode 26, 65, dan 84) dengan pangsa pada triwulan laporan mencapai 46,80%, serta kayu dan barang dari kayu (SITC 63 dan 82) dengan pangsa 19,28%. Selain kedua komoditas tersebut, ekspor bahan makanan (SITC 0), ekspor permesinan dan alat transportasi (SITC 7), serta ekspor kimia (SITC 5) juga turut berperan walaupun dengan pangsa masing-masing yang berada di bawah 10%. Komposisi ini relatif persisten selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan jenis komoditas, tekstil dan produk tekstil (TPT), kimia, dan bahan makanan mencatatkan pertumbuhan yang meningkat pada triwulan IV 2019. Sementara, komoditas yang tergabung dalam mebel dan kayu olahan serta mesin-mesin, mengalami pelemahan kinerja ekspor.

Sebagai komoditas ekspor dengan nilai pangsa terbesar di Jawa Tengah, pertumbuhan ekspor TPT mengalami peningkatan. Pada triwulan IV 2019, ekspor TPT tercatat tumbuh 2,01% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya (-4,42%; yoy). Peningkatan tersebut terutama berasal dari membaiknya ekspor tekstil berupa benang dan kain, yaitu 13,09% (yoy) pada triwulan laporan, lebih baik dibanding pertumbuhan triwulan III 2019 (-11,18%; yoy). Selain itu, ekspor pakaian jadi juga membaik dengan tumbuh -1,36% (yoy), lebih baik dibanding triwulan sebelumnya sebesar -2,09% (yoy). Produk-produk pakaian Jawa Tengah banyak dipakai *brand-brand* ternama dunia meski akan lebih baik jika terdapat *brand* lokal dengan pasar yang meluas ke seluruh dunia.



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.24 Komposisi Ekspor Luar Negeri Nonmigas Berdasarkan Komoditas

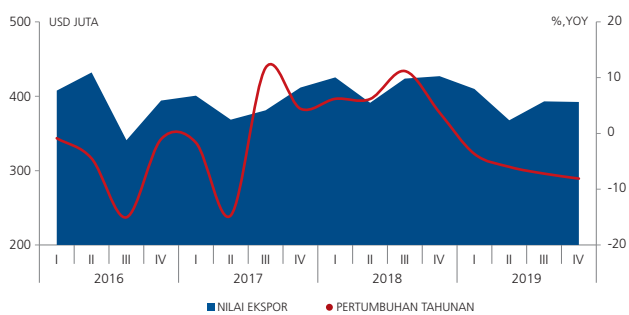


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.25 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT

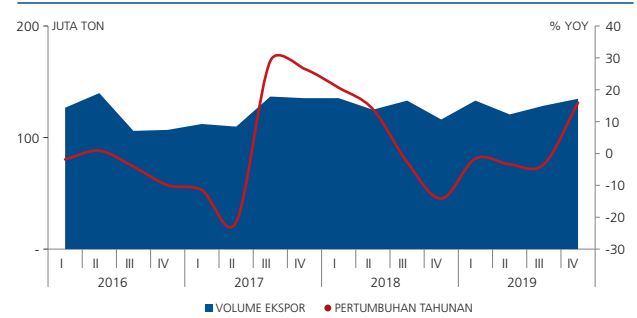
Meskipun nilai ekspor benang dan kain tidak sebesar nilai ekspor pakaian jadi, pertumbuhan pada komoditas benang dan kain mampu mendorong kinerja ekspor TPT di periode laporan. Ekspor benang dan kain mengalami peningkatan ekspor pada pasar di wilayah Asia baik Tiongkok, Jepang, Rep. Korea, maupun ASEAN. Berbeda dengan komoditas benang dan kain, ekspor komoditas pakaian jadi dimana peningkatan ekspor terjadi pada negara selain Asia seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Hasil *liaison* Bank Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan penjualan ekspor nonmigas disebabkan oleh tingkat permintaan yang masih cukup baik terutama dari negara Amerika Serikat dan Eropa. Perkembangan selera *fashion* yang selalu berganti setiap tahun menjadikan permintaan produk tekstil dan pakaian jadi meningkat di akhir tahun. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) juga optimis permintaan produk TPT selalu meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Pelaku usaha di bidang TPT mengakui kekurangan tenaga kerja untuk memproduksi sehingga harus mencari tenaga kerja hingga luar Jawa Tengah.



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.27 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu

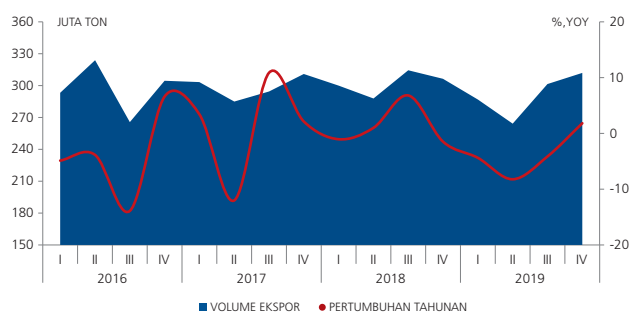


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.26 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT

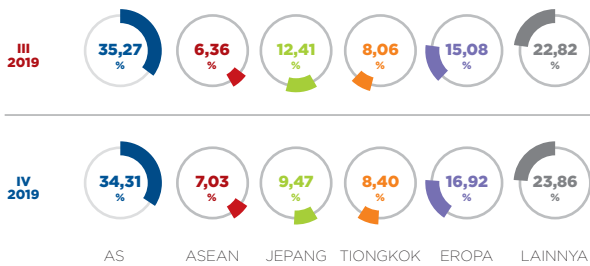
Berbeda dengan TPT, kinerja ekspor kayu dan barang dari kayu Jawa Tengah pada triwulan laporan tumbuh melambat dibandingkan triwulan lalu. Secara nilai, ekspor komoditas tersebut masih mencatatkan pertumbuhan negatif 8,10% (yoy), lebih dalam dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar -7,21% (yoy). Perlambatan tersebut terjadi baik pada ekspor komoditas mebel. Secara nilai, ekspor komoditas mebel tumbuh sebesar -0,74% (yoy), turun dibanding triwulan sebelumnya sebesar 3,93% (yoy). Sementara ekspor komoditas barang olahan kayu dan gabus tumbuh negatif 11,95% (yoy). Meski tidak mengalami pertumbuhan, pertumbuhan ekspor barang olahan kayu dan gabus pada triwulan IV 2019 masih lebih baik dibanding -12,58% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Ditinjau lebih jauh, ekspor komoditas kayu dan barang dari kayu terutama ditujukan untuk negara kawasan Eropa (26,04%), Amerika Serikat (23,13%), Tiongkok (10,15%), Jepang (9,33%), Rep. Korea (5,15%), serta ASEAN (6,68%). Pada triwulan laporan, ekspor komoditas ini hampir terjadi pada seluruh negara tujuan utama seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Rep. Korea, dan ASEAN.



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.28 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

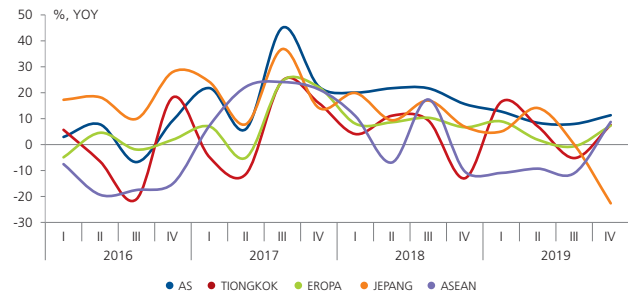
Grafik 1.29 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

Sementara, untuk pasar Tiongkok membaik jika dibandingkan triwulan sebelumnya.

Secara keseluruhan, mitra dagang utama Jawa Tengah untuk ekspor nonmigas masih belum mengalami perubahan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu Amerika Serikat dan Eropa, dengan pangsa masing-masing 34,31% dan 16,92%. Setelah kedua mitra tersebut, ekspor dengan negara-negara tujuan ke Asia juga memegang peran cukup besar, yaitu Jepang (9,47%), Tiongkok (8,40%), dan ASEAN (7,03%). Pada triwulan laporan, peningkatan kinerja ekspor terjadi pada hampir seluruh negara mitra dagang utama Jawa Tengah yaitu Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan ASEAN. Penurunan ekspor nonmigas dari Jawa Tengah terjadi pada negara Jepang.

Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat yang merupakan negara tujuan dengan pangsa terbesar masih tercatat tumbuh dua digit pada triwulan laporan sebesar 11,33% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan III 2019 (7,97%; yoy). Pertumbuhan ekspor nonmigas Jawa Tengah ke Tiongkok dan Eropa juga menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing menjadi tumbuh 7,57% (yoy) dan 7,36% (yoy); lebih tinggi dibanding -5,20% (yoy) dan -0,66% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara ekspor nonmigas ke negara mitra dagang utama lain seperti Jepang mengalami penurunan dan tercatat kontraksi -22,64% (yoy), berbalik arah setelah pada triwulan III 2019 tumbuh positif 0,02% (yoy).

Secara keseluruhan selama tahun 2019, ekspor luar negeri Jawa Tengah tumbuh 4,92% (yoy), melambat



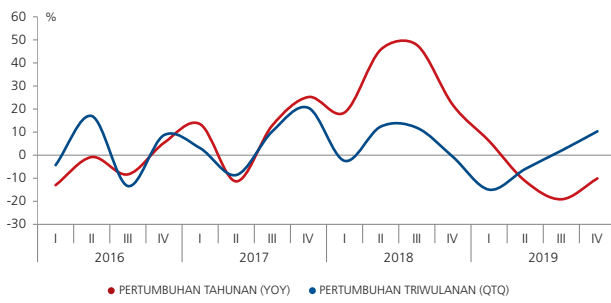
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.30 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 11,77% (yoy). Perlambatan tersebut terjadi pada ekspor barang sedangkan ekspor jasa mengalami peningkatan. Kinerja ekspor Jawa Tengah pada 2019 melemah seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang melandai serta adanya pengaruh ketegangan hubungan dagang antarnegara khususnya Amerika Serikat-Tiongkok. Sebagai negara tujuan ekspor utama Jawa Tengah, perekonomian Amerika Serikat (AS) tumbuh melambat akibat menurunnya keyakinan pelaku usaha, padahal AS memiliki pangsa ekspor terbesar Jawa Tengah (33,92%). Lebih lanjut, negara mitra dagang utama Jawa Tengah lainnya yaitu Eropa dan Jepang juga mengalami perlambatan pertumbuhan, sehingga menahan pertumbuhan volume ekspor. Pengaruh ketidakpastian perekonomian dan keuangan global berpotensi mendorong perlambatan volume perdagangan dunia dan harga komoditas, yang selanjutnya memberikan tantangan terhadap kinerja ekspor Jawa Tengah.

Sementara dari sisi jasa, peningkatan ekspor jasa salah satunya ditengarai terpengaruh oleh penutupan rute penerbangan internasional dari/ke Kunming (Tiongkok) di Bandar Udara Adi Sumarmo sejak Agustus 2019. Dengan menggunakan pesawat jenis Airbus 320 Neo, rute penerbangan tersebut berhasil meningkatkan aktivitas angkutan udara di Solo dengan rata-rata jumlah penumpang 1.200 setiap bulannya. Selain itu, animo wisatawan asing ke Candi Borobudur dan daerah wisata lain di Jawa Tengah masih cukup tinggi meski lebih banyak mendarat di bandara daerah lain sehingga belanja wisatawan belum optimal.

1.1.1.3.2 Impor Luar Negeri



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.31 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri

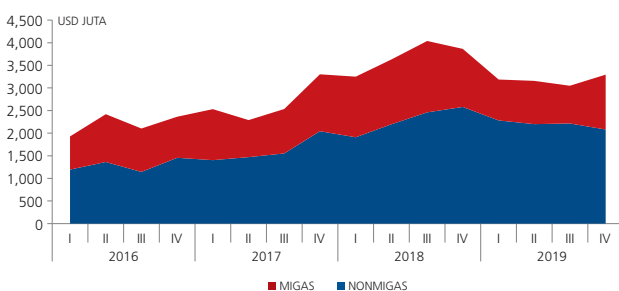
Kinerja impor luar negeri Jawa Tengah mengalami peningkatan pada triwulan IV 2019, meskipun masih tumbuh negatif seperti triwulan sebelumnya. Pada periode laporan, impor luar negeri Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar -10,10% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -19,14% (yoy). Walaupun mengalami tumbuh negatif, tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi mendorong pelebaran defisit neraca perdagangan luar negeri Jawa Tengah. Secara triwulanan, impor luar negeri mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,34% (qtq), lebih tinggi dibanding triwulan yang sama tahun 2018 yang tumbuh -0,75% (qtq).

Pada triwulan laporan, kinerja impor luar negeri terutama didorong oleh peningkatan impor migas. Lebih lanjut, pertumbuhan impor nonmigas pada triwulan laporan justru mengalami perlambatan. Impor migas Jawa Tengah pada triwulan laporan mencatatkan pangsa sebesar 36,38% dari total impor Jawa Tengah, sedangkan pangsa

impor komoditas nonmigas yaitu 62,54%. Impor komoditas migas masih memiliki peran signifikan terhadap total impor di Jawa Tengah. Hal tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pengilangan minyak di Cilacap, yang merupakan salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi 348.000 barel/hari. Unit pengolahan ini bernilai strategis karena memasok 33,3% kebutuhan BBM nasional, atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa.

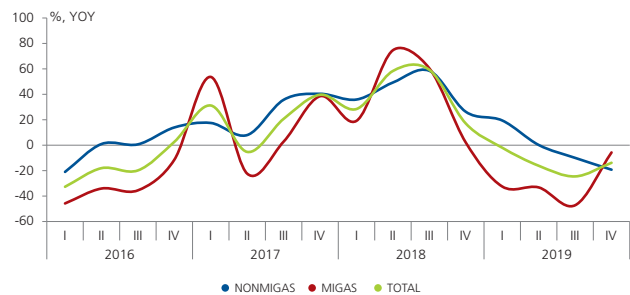
Impor luar negeri Jawa Tengah untuk komoditas migas mengalami peningkatan secara nominal pada triwulan IV 2019. Pada periode laporan, impor migas tercatat tumbuh -5,71% (yoy), meski negatif angka tersebut masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan impor migas triwulan III 2019 sebesar -47,21% (yoy). Penambahan impor migas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik dikarenakan produksi kilang minyak di Cilacap tidak setinggi triwulan sebelumnya.

Harga minyak dunia menunjukkan peningkatan di akhir 2019. Rata-rata harga minyak WTI dan Minas masing-masing naik menjadi USD56,95 dan USD62,05 per barel, dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar USD56,44 dan USD60,60 per barel. Kenaikan harga minyak di akhir tahun disebabkan pengurangan pasokan minyak dunia. Sementara itu, kebutuhan minyak mengalami peningkatan saat musim dingin di belahan bumi utara pada periode akhir tahun.



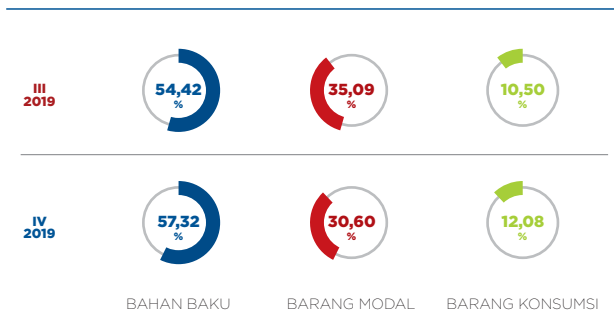
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.32 Perkembangan Impor Jawa Tengah



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.33 Pertumbuhan Impor Migas dan Nonmigas Jawa Tengah

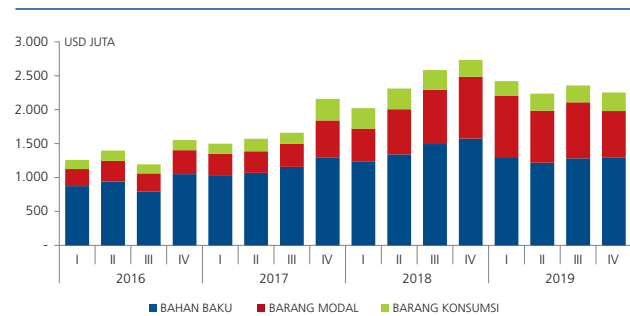


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.34 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran

Lain halnya dengan impor migas yang tumbuh meningkat, pada triwulan laporan komoditas nonmigas mencatatkan perlambatan pertumbuhan sehingga menahan laju pertumbuhan impor luar negeri secara keseluruhan. Pada triwulan IV 2019, impor nonmigas Jawa Tengah tercatat tumbuh negatif 19,27% (yoy), jauh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh -9,97% (yoy). Impor komoditas nonmigas Jawa Tengah dapat dikatakan cukup produktif. Impor tersebut utamanya ditujukan untuk kegiatan produktif, yaitu bahan baku dengan pangsa mencapai 57,32% dari total impor nonmigas Jawa Tengah, dan impor barang modal dengan pangsa 30,60%. Sementara itu, impor barang konsumsi memiliki pangsa 12,08%. Komposisi ini tidak banyak berubah dari periode sebelumnya, meskipun terdapat peningkatan pangsa impor barang konsumsi yang lebih tinggi dibanding rata-rata pangsa historis tahun 2016-2018(11,42%).

Secara nilai, melambatnya pertumbuhan impor nonmigas triwulan laporan terutama didorong oleh pelemahan impor barang modal dan bahan baku. Sementara impor barang konsumsi mengalami peningkatan. Impor barang modal yang memiliki pangsa terbesar kedua mencatatkan pertumbuhan negatif yang tergolong dalam sebesar -24,19% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,51% (yoy). Perlambatan impor tersebut terutama dalam bentuk perlengkapan pengangkutan untuk keperluan industri serta barang modal selain perlengkapan transportasi. Hal tersebut juga tercermin dari melemahnya impor komoditas mesin dan alat transportasi yang tumbuh -13,23% (yoy) pada periode



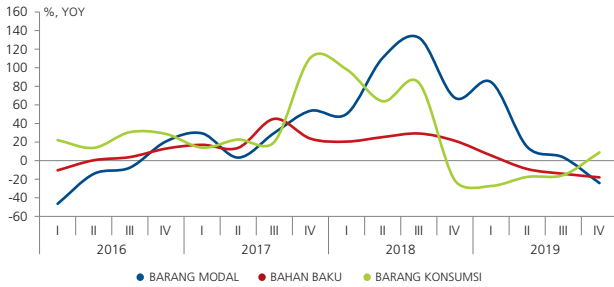
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.35 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran

laporan, turun dibanding triwulan III 2019 (3,02%; yoy). Berdasarkan komoditasnya, perlambatan impor permesinan terutama berupa mesin industri dan perlengkapan, mesin listrik, dan mesin perkantoran termasuk pemrosesan data. Pelemahan kinerja impor barang modal ini sejalan dengan deselerasi kinerja investasi pada triwulan laporan, seiring dengan beberapa proyek infrastruktur yang telah memasuki tahap finalisasi di semester pertama 2019.

Sementara itu, impor bahan baku yang memiliki pangsa terbesar juga menunjukkan pertumbuhan yang melandai, meskipun tidak sedalam perlambatan impor barang modal. Impor bahan baku tumbuh -18,03% (yoy) pada triwulan laporan, meneruskan tren pertumbuhan negatif dari -14,16% (yoy) pada triwulan III 2019. Impor bahan baku terutama mencatatkan pelemahan untuk komoditas bahan makanan-minuman mentah dan setengah jadi serta barang kebutuhan industri setengah jadi. Sementara, barang mentah untuk industri tercatat mengalami perbaikan pertumbuhan. Jika ditelusuri lebih lanjut, impor bahan makanan yang mengalami pelemahan, di antaranya hewan ternak hidup, ikan, buah-buahan, minyak nabati dan hewani.

Selanjutnya, impor barang konsumsi yang memiliki pangsa terkecil terhadap total impor Jawa Tengah, tercatat mengalami peningkatan. Pada triwulan laporan, impor barang konsumsi tercatat tumbuh 8,90% (yoy), berbalik arah dari triwulan III yang tumbuh negatif 15,53% (yoy). Peningkatan terjadi setelah kontraksi yang terjadi dalam empat triwulan terakhir dengan rata-rata sebesar

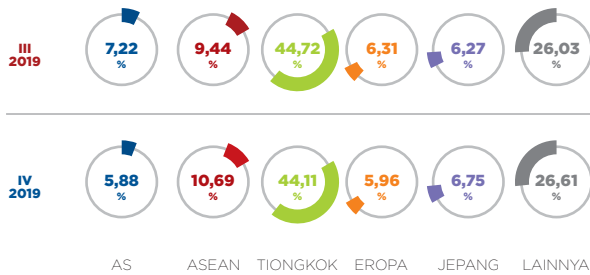


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.36 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan

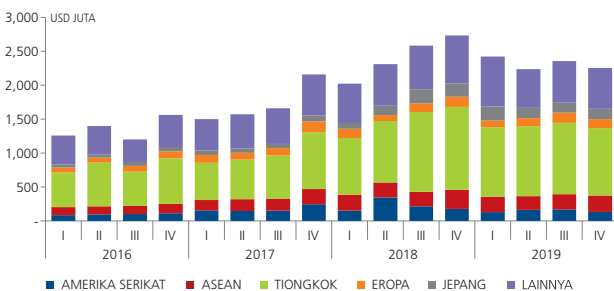
-20,44% (yoy). Peningkatan impor barang konsumsi utamanya dipengaruhi oleh peningkatan impor bahan pangan dan perlengkapan kendaraan. Impor tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meningkat pada akhir tahun.

Secara keseluruhan, impor nonmigas Jawa Tengah terutama berasal dari Tiongkok dengan pangsa 44,11%. Selain Tiongkok, negara asal impor utama lainnya yaitu ASEAN (10,69%), Jepang (6,75%), Amerika Serikat (5,88%), dan Eropa (5,96%). Mitra dagang utama ini tidak mengalami perubahan yang signifikan sepanjang waktu.



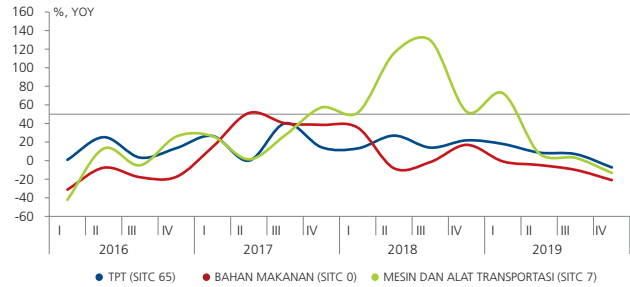
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.38 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.39 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal

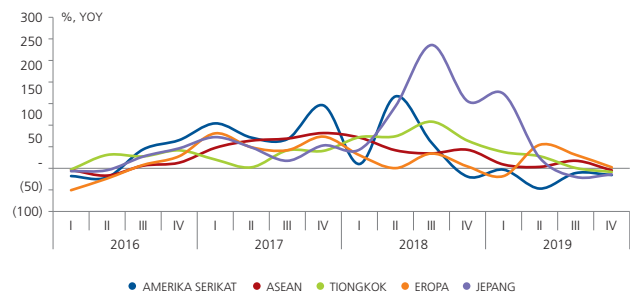


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.37 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas

Pada periode laporan, perlambatan pertumbuhan impor luar negeri terutama bersumber dari Tiongkok, ASEAN, Eropa, dan Amerika Serikat. Sementara itu, impor dari kawasan Jepang mengalami perbaikan pertumbuhan pada triwulan laporan.

Impor luar negeri Jawa Tengah secara keseluruhan tahun 2019 mencatatkan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, kinerja impor luar negeri tercatat tumbuh -9,33% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya 32,61% (yoy). Perlambatan pertumbuhan impor terjadi baik untuk impor barang maupun jasa. Meredanya kegiatan investasi seiring dengan sejumlah proyek infrastruktur strategis yang telah usai di tahun 2019 mendorong pertumbuhan impor barang modal rendah. Lebih lanjut kebijakan kenaikan cukai impor barang konsumsi mendorong perlambatan permintaan barang konsumsi dari luar negeri. Pertumbuhan negatif dari impor luar negeri mendorong defisit neraca perdagangan luar negeri Jawa Tengah lebih sempit dibanding tahun sebelumnya.



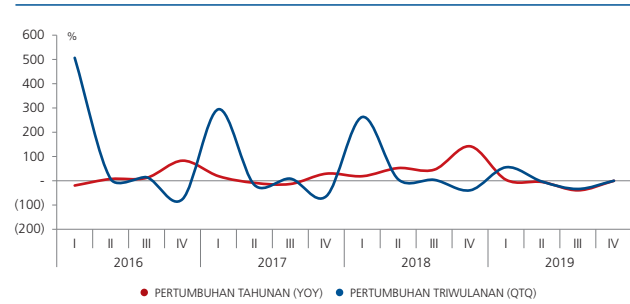
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.40 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal

1.1.1.4 Net Ekspor Antardaerah

Pada triwulan laporan, pertumbuhan net ekspor antardaerah bergerak ke arah yang positif dengan tumbuh sebesar **-0,14% (yoy)**, naik signifikan dibanding triwulan III 2019 yang tumbuh **-39,41% (yoy)**. Perbaikan tersebut diindikasikan berasal dari penurunan impor antardaerah yang lebih tinggi dibanding penurunan ekspor antardaerah.

Kinerja ekspor komoditas nonmigas Jawa Tengah ke daerah lain diindikasikan menurun, sejalan dengan kinerja lapangan usaha pertanian yang melemah. Kondisi kemarau panjang yang terjadi pada 2019 mengganggu jumlah produksi yang dihasilkan pertanian sehingga volume ekspor barang hasil produksi ke luar provinsi menjadi terbatas. Lebih lanjut, masih kuatnya konsumsi masyarakat diperkirakan mendorong permintaan domestik dari daerah lain terhadap produk ekspor Jawa Tengah. Namun, sebagai dampaknya tingkat inflasi komoditas yang bersumber dari pertanian mengalami kenaikan karena keterbatasan pasokan. Peningkatan permintaan domestik diindikasikan oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang masih cukup kuat sebesar 4,97% (yoy) pada triwulan IV 2019, stabil dibanding triwulan sebelumnya (5,01%; yoy). Sementara itu, keterbatasan pasokan barang pertanian mendorong terbatasnya impor



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.41 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah

antardaerah Jawa Tengah. Kebutuhan bahan pangan dari daerah lain juga terganggu iklim *El-Nino* yang tidak terjadi setiap tahun.

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Perekonomian Jawa Tengah masih bersumber dari **tiga lapangan usaha utama**, yaitu industri pengolahan (35,04%); perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (13,76%); serta pertanian, kehutanan dan perikanan (11,64%). Komposisi ini tidak banyak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.

Pada triwulan IV 2019, perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terutama terjadi pada dua lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran. Lebih lanjut, peningkatan pertumbuhan

Tabel 1.5 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

LAPANGAN USAHA	2018**	2018**	2019**				2019**
	IV	IV	I	II	III	IV	IV
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	38,348	178,359	45,904	47,057	51,293	39,999	184,253
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	8,323	32,321	8,270	8,548	8,352	8,557	33,728
C INDUSTRI PENGOLAHAN	112,127	436,477	112,495	116,613	119,520	120,364	468,992
D PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	321	1,225	312	313	325	344	1,294
E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	187	744	190	196	195	210	791
F KONSTRUKSI	36,001	136,154	34,940	35,463	38,331	38,472	147,206
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	44,477	172,954	44,919	47,087	47,900	47,275	187,181
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	10,414	39,593	10,417	11,030	11,043	11,380	43,869
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	10,132	39,507	10,414	10,849	11,018	11,388	43,670
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI	11,564	43,964	11,997	12,293	12,470	12,827	49,587
K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	9,599	37,488	9,636	9,542	9,898	10,331	39,406
L REAL ESTATE	5,474	21,450	5,582	5,721	5,789	5,829	22,920
M.N JASA PERUSAHAAN	1,289	5,022	1,355	1,439	1,458	1,461	5,712
O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	9,216	34,653	8,519	9,320	9,041	9,557	36,436
P JASA PENDIDIKAN	14,927	57,041	14,686	15,490	16,070	16,693	62,940
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	3,002	11,301	2,946	3,048	3,068	3,234	12,295
R.S.T.U JASA LAINNYA	5,237	20,201	5,318	5,596	5,635	5,627	22,177
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	320,636	1,268,455	327,899	339,605	351,406	343,548	1,362,457

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.6 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

LAPANGAN USAHA	2018**	2018**	2019**				2019**
	IV		I	II	III	IV	
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	25.825	121.557	30.762	32.447	33.776	26.229	123.214
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	5.331	20.856	5.317	5.457	5.343	5.440	21.557
C INDUSTRI PENGOLAHAN	81.876	322.201	81.795	84.665	86.278	86.199	338.938
D PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	270	1.029	262	265	272	287	1.085
E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	166	659	168	173	173	174	688
F KONSTRUKSI	25.521	98.394	24.594	24.899	26.864	26.906	103.262
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	34.902	136.588	35.067	36.464	36.912	36.316	144.758
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	8.378	32.121	8.371	8.719	8.748	9.011	34.848
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	7.840	30.667	8.039	8.311	8.436	8.684	33.470
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI	11.874	45.501	12.324	12.601	12.745	13.120	50.789
K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	6.497	25.636	6.510	6.422	6.670	6.933	26.535
L REAL ESTATE	4.522	17.798	4.584	4.692	4.741	4.765	18.782
M,N JASA PERUSAHAAN	918	3.609	959	1.009	1.010	1.011	3.990
O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	6.492	24.138	5.975	6.204	6.163	6.691	25.034
P JASA PENDIDIKAN	9.406	36.286	9.203	9.618	9.971	10.249	39.041
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	2.163	8.188	2.122	2.167	2.175	2.274	8.738
R,S,T,U JASA LAINNYA	4.118	15.937	4.168	4.383	4.411	4.414	17.376
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	236.097	941.164	240.219	248.495	254.687	248.704	992.106

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.7 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ADHK menurut Lapangan Usaha (% YOY)

LAPANGAN USAHA	2018**	2018**	2019**				2019**
	IV		I	II	III	IV	
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	2,12	2,62	1,13	4,65	-1,55	1,56	1,36
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0,24	2,45	5,94	3,14	2,46	2,04	3,36
C INDUSTRI PENGOLAHAN	4,31	4,35	4,16	4,53	6,78	5,28	5,19
D PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	6,25	5,36	6,21	4,81	4,83	6,05	5,48
E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	2,74	4,88	2,61	5,35	4,68	5,01	4,42
F KONSTRUKSI	4,85	6,07	5,31	3,45	5,55	5,43	4,95
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	6,56	5,77	6,80	6,55	6,59	4,05	5,98
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	10,07	7,55	9,92	8,32	8,27	7,56	8,49
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	6,95	8,17	5,99	9,39	10,33	10,78	9,14
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9,53	12,39	12,15	12,41	11,52	10,49	11,62
K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	2,73	3,58	2,64	0,18	4,47	6,70	3,51
L REAL ESTATE	4,69	5,58	4,27	6,26	6,22	5,38	5,53
M,N JASA PERUSAHAAN	6,47	9,48	8,76	9,66	13,53	10,24	10,54
O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	5,74	3,58	2,98	4,68	4,16	3,07	3,71
P JASA PENDIDIKAN	9,75	7,76	7,35	7,19	6,82	8,96	7,59
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	11,49	8,80	9,01	7,89	5,11	5,12	6,72
R,S,T,U JASA LAINNYA	9,71	9,45	9,68	9,99	9,32	7,19	9,02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,26	5,31	5,13	5,52	5,64	5,34	5,41

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

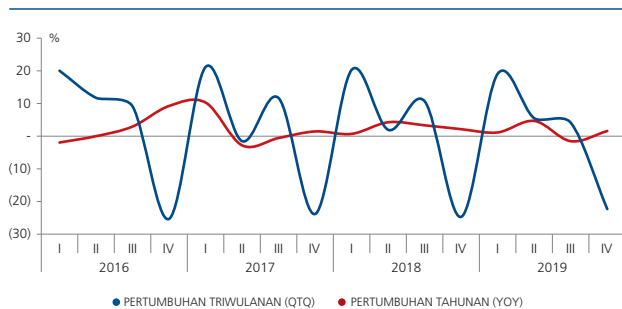
lapangan usaha jasa pendidikan dan akomodasi, makanan, dan minuman belum mampu menahan perlambatan pada dua sektor besar di Jawa Tengah. Sementara itu pada triwulan laporan, kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya.

1.1.2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 1,56% (yoy), berbalik arah dari triwulan III 2019 yang tercatat tumbuh -1,55% (yoy).

Secara triwulanan, lapangan usaha ini menunjukkan kontraksi -22,34% (qtq), lebih baik dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar -24,73% (qtq).

Kinerja lapangan usaha pertanian yang tumbuh meningkat pada triwulan laporan terutama dipengaruhi oleh subsektor perkebunan. Berdasarkan hasil FGD, perlambatan di triwulan IV 2019 disebabkan oleh produksi perkebunan lebih optimal dengan musim kemarau yang panjang. Sementara itu, komoditas pertanian lain seperti

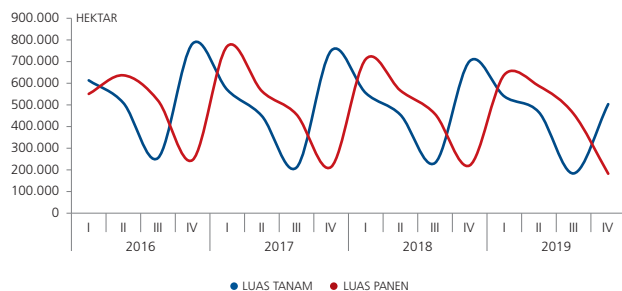


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.42 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

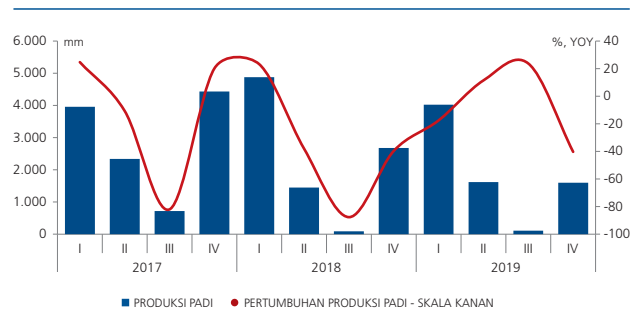
hortikultura dan tanaman pangan mengalami gangguan produksi karena kekurangan air pada masa tanam. Selain itu, panen raya komoditas dimaksud dari musim tanam sebelumnya telah berakhir pada bulan September 2019.

Berdasarkan monitoring BMKG selama triwulan IV 2019, curah hujan di Jawa Tengah mulai terlihat ada peningkatan dibanding triwulan sebelumnya. Meskipun demikian pertumbuhan curah hujan masih lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun 2018. BMKG memprakirakan musim hujan yang terjadi sejak November 2019 akan terus berlangsung hingga Maret 2020. Musim kemarau yang panjang menyebabkan lahan pertanian berpotensi bera atau tidak bisa ditanami untuk musim tanam berikutnya, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Sragen dan Wonogiri. Meskipun kondisi cuaca triwulan IV 2019 kurang baik bagi perkembangan tanaman pangan khususnya padi, kondisi cuaca ini sangat mendukung perkembangan tanaman hortikultura serta tanaman perkebunan semusim seperti tembakau dan tebu.



Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.44 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa Tengah

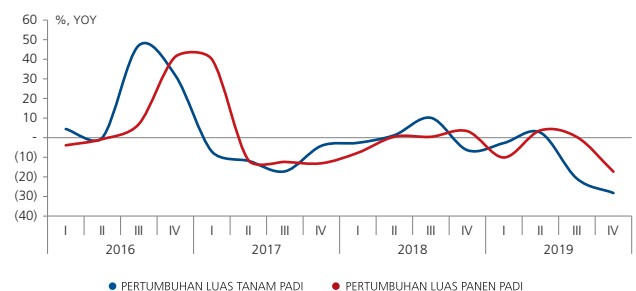


Sumber: BMKG, diolah

Grafik 1.43 Curah Hujani di Jawa Tengah

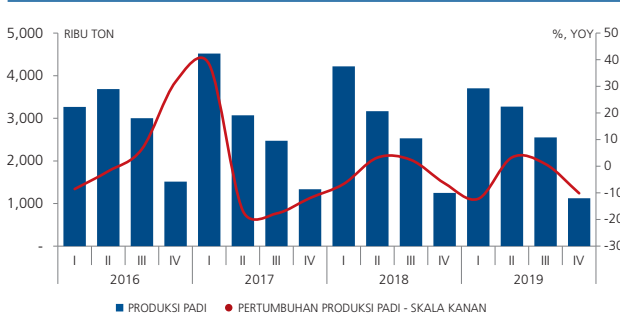
Pada triwulan laporan, hasil panen komoditas padi yang merupakan komoditas pertanian utama Jawa Tengah mengalami penurunan. Luas panen padi pada triwulan IV 2019 diperkirakan menjadi sekitar 182,2 ribu hektar, atau menurun dari perkiraan luas panen triwulan sebelumnya seluas 459,0 ribu hektar. Berkurangnya luas panen berdampak terhadap angka produksi padi yang diperkirakan juga menurun menjadi ±1,1 juta ton GKG, lebih rendah dari triwulan III 2019 yang sekitar 2,6 juta ton GKG. Sejalan dengan penurunan pasokan produksi padi akibat berakhirnya masa panen raya, sejak September 2019 komoditas beras mencatatkan inflasi. Inflasi komoditas beras tersebut menunjukkan tren yang semakin meningkat sampai dengan akhir tahun 2019.

Perkembangan di lapangan usaha ini juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi terpakai di sektor pertanian. Dari hasil SKDU, kapasitas produksi terpakai di sektor pertanian tercatat naik dari 69,29% pada triwulan III 2019 menjadi



Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, diolah

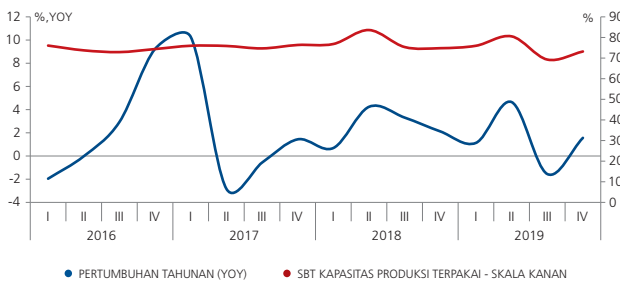
Grafik 1.45 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa Tengah



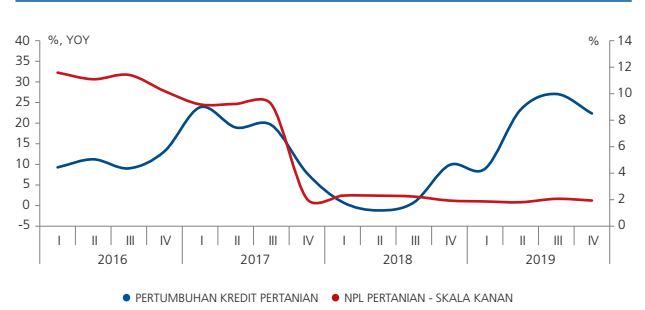
Grafik 1.46 Perkembangan Hasil Produksi Padi di Jawa Tengah

73,20% pada periode laporan. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kapasitas produksi di subsektor tanaman pangan, peternakan, serta tanaman perkebunan. Tingkat kapasitas terendah terpantau pada subsektor hortikultura (58,57%), diikuti tanaman pangan (72,52%) dan peternakan (74,22%). Meskipun kinerja sektor pertanian mengalami peningkatan, penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian masih tercatat melambat. Pada triwulan laporan, penyaluran kredit ke sektor pertanian Jawa Tengah tumbuh 22,23% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya (26,99%; yoy).

Meskipun menunjukkan peningkatan pada triwulan akhir 2019, secara keseluruhan tahun 2019 lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat tumbuh pada level 1,36% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 2018 yang sebesar 2,62% (yoy). Secara tahunan, perlambatan pertumbuhan terjadi pada subsektor antara lain tanaman pangan, hortikultura, dan kehutanan. Sementara itu, perbaikan pertumbuhan terjadi pada subsektor perkebunan dan



Grafik 1.47 Perkembangan SBT Realisasi Kegiatan Usaha (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Pertanian



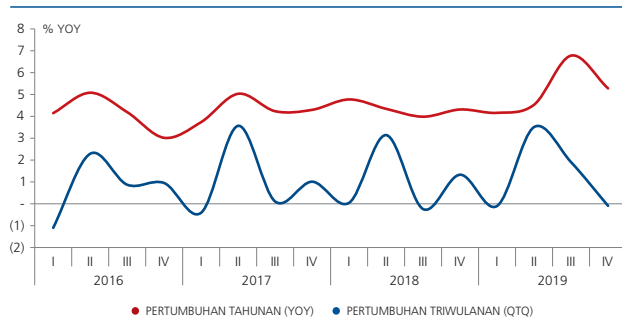
Grafik 1.48 Pertumbuhan dan NPL Kredit Pertanian

perikanan. Peningkatan pertumbuhan yang paling tinggi dibanding tahun 2018 dicatatkan oleh subsektor peternakan dan perkebunan.

Perlambatan kinerja lapangan usaha pertanian pada tahun 2019 ditengarai tidak terlepas dari kondisi cuaca tahun 2019 yang mengalami anomali cuaca El Nino. Hal ini mengganggu produksi sektor pertanian terutama pada subsektor yang mengandalkan curah hujan seperti tanaman pangan, hortikultura, dan kehutanan. Sementara itu, anomali cuaca yang terjadi menyebabkan pertumbuhan subsektor perkebunan meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

1.1.2.2 Industri Pengolahan

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah utamanya didorong kondisi yang terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan. Pada triwulan IV 2019, kinerja industri pengolahan tercatat tumbuh melambat dari 6,78% (yoy) pada triwulan III 2019 menjadi 5,28% (yoy) pada triwulan IV 2019. Secara triwulanan, lapangan usaha ini tercatat mengalami pertumbuhan -0,09% (qtq), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada periode triwulan IV 2018 sebesar 1,33% (qtq). Berdasarkan hasil FGD, perlambatan kinerja industri pengolahan utamanya didorong industri pengilangan migas, sedangkan industri nonmigas mengalami pertumbuhan yang positif.

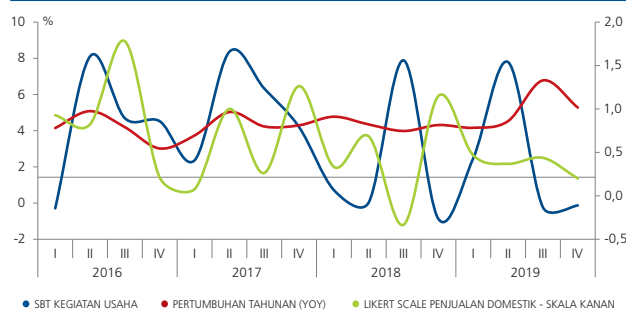


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.49 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Normalisasi pertumbuhan terjadi lapangan usaha industri pengolahan tumbuh lebih lambat pada periode laporan. Pertumbuhan industri pengolahan pada triwulan III 2019 disebabkan mulai berproduksinya bahan bakar minyak berkualitas tinggi di Cilacap. Namun, pada triwulan IV 2019, produksi pengilangan migas tersebut tidak setinggi periode sebelumnya.

Selain itu, peningkatan kinerja industri pengolahan nonmigas didorong oleh masih kuatnya permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga nasional tumbuh sebesar 4,97% (yoy) pada triwulan IV 2019, relatif stabil dibanding triwulan sebelumnya (5,02%; yoy). Permintaan dari dalam provinsi sendiri ditengarai juga menunjukkan peningkatan. Hal tersebut diindikasikan oleh penguatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga Jawa Tengah dari 4,36% (yoy) menjadi 4,18% (yoy) pada periode laporan. Penguatan kinerja industri pengolahan nonmigas ini juga sesuai dengan pola konsumsi pada akhir tahun, dimana permintaan barang dan jasa oleh masyarakat cenderung meningkat saat Hari Raya Natal, Tahun Baru dan liburan akhir tahun. Sementara dari sisi pelaku usaha, pelaku



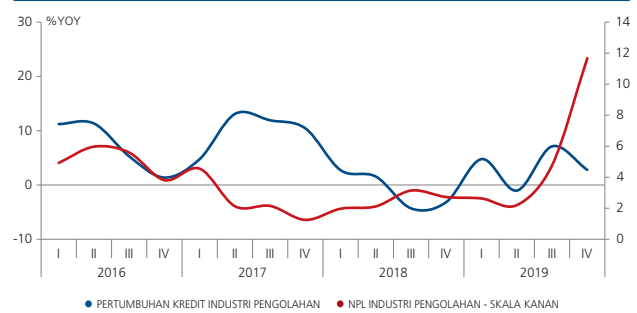
Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

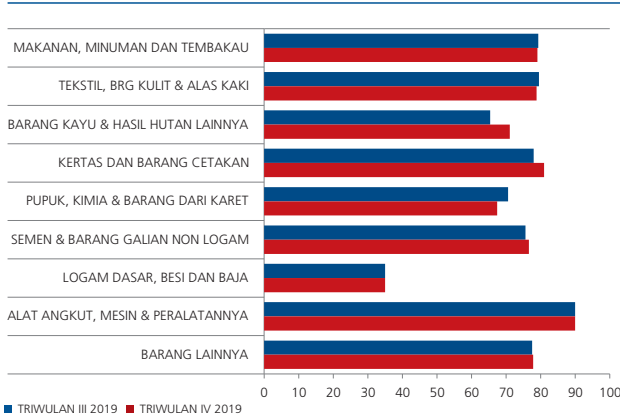
Grafik 1.50 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

usaha juga berupaya untuk mengejar kegiatan produksi seiring dengan upaya pemenuhan target produksi akhir tahun. Permintaan global akan produk nonmigas Jawa Tengah pun masih kuat. Hal ini tercermin dari peningkatan ekspor luar negeri Jawa Tengah, terutama ekspor komoditas unggulan Jawa Tengah seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) serta kayu dan barang dari kayu.

Perkembangan industri pengolahan secara keseluruhan sejalan dengan hasil kegiatan liaison yang dilakukan Bank Indonesia, yang juga menunjukkan perlambatan penjualan domestik di sektor industri pengolahan. *Likert scale* penjualan domestik industri pengolahan melambat dari 0,44 pada triwulan III 2019 menjadi 0,20 pada triwulan laporan. Pelaku usaha yang mengkonfirmasi terdapat penurunan yaitu dari subsektor kimia, farmasi, dan obat tradisional serta pengolahan tembakau. Selain itu, industri tekstil dan pakaian jadi serta furnitur mengalami peningkatan kinerja. Peningkatan penjualan pada industri tekstil dan pakaian jadi didorong oleh tingginya permintaan berupa seragam dan peningkatan kualitas produk. Pada industri furnitur, peningkatan permintaan bersumber dari kebutuhan akan desain interior apartemen dan hotel yang meningkat seiring pengembangan pariwisata di Indonesia.

Kinerja industri pengolahan juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, terindikasi adanya penurunan kapasitas produksi terpakai di industri pengolahan, yaitu dari 73,83% pada triwulan III 2019 menjadi 73,57% pada periode laporan. Penurunan

**Grafik 1.51** Pertumbuhan dan NPL Kredit Industri Pengolahan

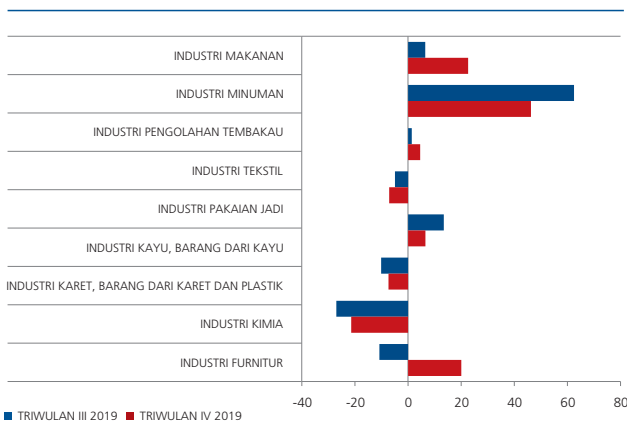


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.52 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor Industri Pengolahan (Hasil SKDU)

kapasitas produksi terpakai yang paling besar terjadi pada subsektor pengolahan tembakau dan kimia, farmasi, dan obat tradisional. Lebih lanjut, indikator industri pengolahan nonmigas lainnya yaitu *Prompt Manufacturing Index* (PMI) yang dihasilkan dari SKDU menunjukkan peningkatan menjadi 53,30%; dari triwulan III 2019 sebesar 52,56%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya indikator volume produksi, volume persediaan barang jadi, serta volume total pesanan pada periode laporan.

Sisi perbankan mengkonfirmasi perlambatan kinerja industri pengolahan pada triwulan laporan. Penyaluran kredit kepada sektor industri pengolahan di Jawa Tengah mengalami perlambatan. Penyaluran kredit perbankan ke lapangan usaha ini tercatat 2,78% (yoy); atau lebih rendah dari triwulan III 2019 yang tumbuh 7,12% (yoy). Seiring



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

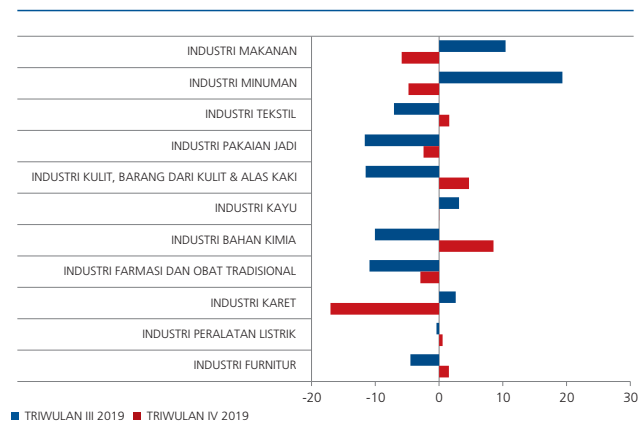
Grafik 1.53 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang berdasarkan Sektor (%YOY)

dengan perlambatan kredit, terjadi penurunan kualitas kredit pada industri pengolahan. Pada triwulan IV 2019, penyaluran kredit di industri pengolahan mencatatkan rasio *Non Performing Loan* (NPL) 11,76%; menurun dari rasio NPL triwulan sebelumnya sebesar 4,76%.

Berdasarkan skala, baik industri besar dan sedang maupun industri mikro dan kecil yang bergerak di sektor nonmigas secara umum menunjukkan peningkatan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan produksi industri manufaktur yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Produksi industri manufaktur besar dan sedang maupun mikro dan kecil mengalami peningkatan masing-masing menjadi tumbuh 8,50% (yoy) dan 3,97% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 1,05% (yoy) dan 3,92% (yoy).

Pada industri manufaktur skala besar dan sedang, perbaikan utamanya terjadi pada industri makanan dan furnitur. Sementara industri besar dan sedang yang mengalami perlambatan yaitu industri minuman, tekstil, dan pakaian jadi. Lebih lanjut, pada industri manufaktur skala mikro dan kecil, peningkatan kinerja terutama terjadi pada industri bahan kimia, kulit, dan tekstil. Sementara itu, beberapa subsektor mencatatkan perlambatan pertumbuhan antara lain di subsektor industri makanan, minuman, dan karet.

Selama tahun 2019, pertumbuhan industri pengolahan tercatat 5,19% (yoy), meningkat



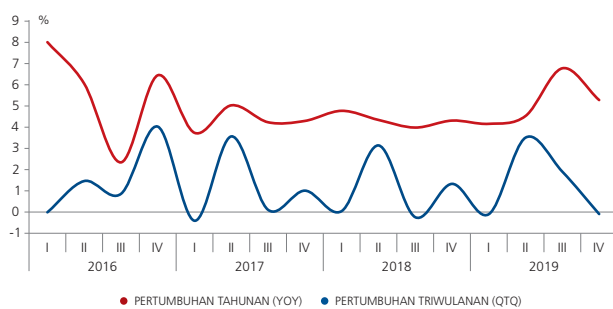
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.54 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil berdasarkan Sektor (%YOY)

dibandingkan pertumbuhan 4,35% (yoy) pada tahun 2018. Peningkatan pertumbuhan terutama didorong oleh perbaikan kinerja industri makanan dan minuman, dari tumbuh 4,87% (yoy) menjadi 8,42% (yoy); industri pengolahan tembakau, dari tumbuh 2,87% (yoy) menjadi 2,98% (yoy); industri kertas dan percetakan, dari tumbuh 3,05% (yoy) menjadi 9,59% (yoy); industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, dari tumbuh 3,58% (yoy) menjadi 12,77% (yoy); serta industri logam dasar, dari tumbuh -1,42% (yoy) menjadi 6,06% (yoy). Sementara itu, beberapa subsektor industri terpantau tumbuh melambat sehingga menjadi penahan laju pertumbuhan industri pengolahan untuk tumbuh lebih tinggi pada tahun laporan. Subsektor industri yang mengalami perlambatan di antaranya, industri tekstil dan pakaian jadi, dari tumbuh 9,15% (yoy) menjadi 8,20% (yoy); industri kulit dan barang kulit, dari tumbuh 15,26% (yoy) menjadi 6,44% (yoy); industri kayu dan barang kayu, dari tumbuh 14,00% (yoy) menjadi 1,12% (yoy); serta industri karet dan plastik, dari tumbuh 0,46% (yoy) menjadi kontraksi -9,22% (yoy).

1.1.2.3 Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

Pada triwulan laporan, lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor mencatatkan perlambatan pertumbuhan menjadi 4,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,59% (yoy). Secara triwulanan, lapangan usaha ini tercatat tumbuh -1,62% (qtq), menurun dibanding pertumbuhan triwulan IV 2018 yang sebesar 0,78% (qtq).

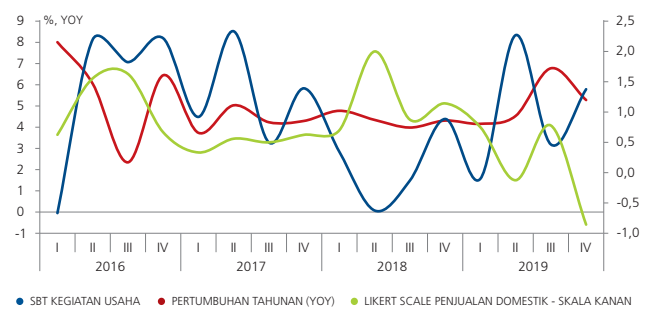


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah
Grafik 1.55 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

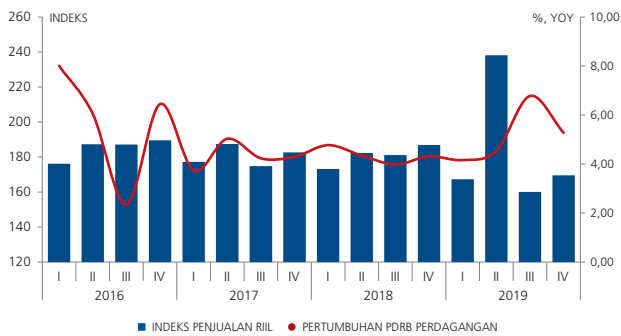
Sejalan dengan perlambatan industri pengolahan di triwulan IV 2019, kinerja lapangan usaha perdagangan juga mencatatkan perlambatan di triwulan laporan. Meski memasuki perayaan hari Natal, Tahun Baru, serta libur sekolah pada akhir tahun, volume barang yang diperdagangkan tidak setinggi triwulan sebelumnya. Produk hasil industri memiliki nilai yang besar sehingga pemberian diskon yang pada umumnya diberikan oleh pusat perbelanjaan pada momen akhir tahun, tidak mendorong perdagangan.

Kinerja lapangan usaha perdagangan yang melambat sejalan dengan perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit di lapangan usaha ini. Pada triwulan IV 2019, penyaluran kredit perdagangan tercatat tumbuh 6,08% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan III 2019 sebesar 8,76% (yoy). Lebih lanjut, kinerja penyaluran Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) juga mencatatkan perlambatan pada triwulan IV 2019. Kinerja penyaluran Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) melambat, yaitu dari 4,34% (yoy) menjadi 1,98% (yoy); Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melambat dari 9,02% (yoy) menjadi 6,61% (yoy). Kinerja penyaluran kredit yang menurun menandakan adanya penurunan aktivitas di sektor perdagangan besar dan eceran.

Hasil *liaison* yang dilakukan Bank Indonesia mengindikasikan pelemahan kinerja perdagangan pada periode laporan. *Likert scale* penjualan domestik sektor perdagangan menurun dari 0,78% pada triwulan III 2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia, diolah
Grafik 1.56 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil berdasarkan Sektor (% YOY)



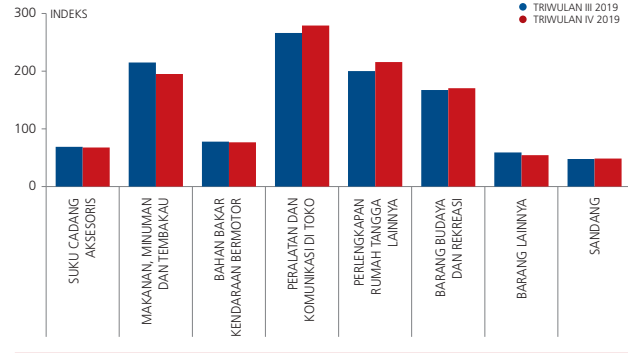
Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.57 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan

menjadi -0,86% pada triwulan IV 2019. Perlambatan kinerja perdagangan juga dikonfirmasi oleh pedagang eceran. Hal tersebut tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia, di mana indeks penjualan riil mengalami penurunan 9,2% (yoy) pada triwulan IV 2019. Kelompok yang mengalami penurunan penjualan yaitu makanan minuman dan tembakau.

Secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran lebih tinggi dibandingkan capaian 2018. Pada tahun laporan, lapangan usaha ini mencatatkan pertumbuhan 5,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 5,77% (yoy). Peningkatan pertumbuhan terutama terjadi pada perdagangan mobil, motor, dan reparasinya; sedangkan perdagangan besar dan eceran selain kendaraan bermotor mencatatkan perlambatan pertumbuhan.

Peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan sejalan dengan apa yang terjadi pada industri pengolahan. Berdasarkan hasil FGD, di samping menggunakan pendekatan *commodity flow*, kinerja lapangan usaha perdagangan juga diestimasi menggunakan pendekatan margin perdagangan, yang terdiri dari margin perdagangan untuk komoditas pertanian, industri pengolahan, pertambangan, maupun margin perdagangan untuk barang impor. Dengan demikian, aktivitas industri pengolahan akan mendorong kinerja perdagangan mengingat margin usaha industri pengolahan relatif tinggi.

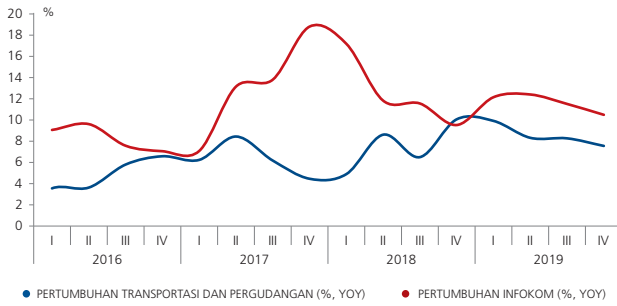


Grafik 1.58 IPR Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok Komoditas

Pada tahun 2019, margin perdagangan yang berasal dari barang impor relatif kecil karena barang impor yang masuk sebagian besar berupa barang modal yang langsung digunakan konsumen akhir untuk kegiatan investasi, atau berupa bahan baku yang langsung digunakan untuk kegiatan produksi. Sebagai contoh, impor barang modal berupa serat yang digunakan untuk industri tekstil dan pakaian jadi memberikan banyak margin perdagangan, karena produk yang dihasilkan merupakan produk akhir. Hal ini terjadi pula pada impor barang konsumsi yang peredarannya melalui beberapa pelaku ekonomi sebelum akhirnya digunakan oleh konsumen akhir. Transaksi tersebut lebih banyak menciptakan margin perdagangan karena terdapat beberapa pelaku ekonomi yang dilalui.

1.1.2.4 Lapangan Usaha Lainnya

Selain ketiga lapangan usaha utama Jawa Tengah yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa lapangan usaha turut mengalami perlambatan pertumbuhan positif pada triwulan laporan. Lapangan usaha informasi dan komunikasi yang dalam kurun enam triwulan terakhir konsisten mencatatkan pertumbuhan *double digit*, pada triwulan IV 2019 mengalami pertumbuhan 10,49% (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 11,52% (yoy). Meskipun melambat, pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tergolong tinggi mengindikasikan masih kuatnya ketergantungan terhadap teknologi informasi. Secara umum perkembangan teknologi yang diikuti

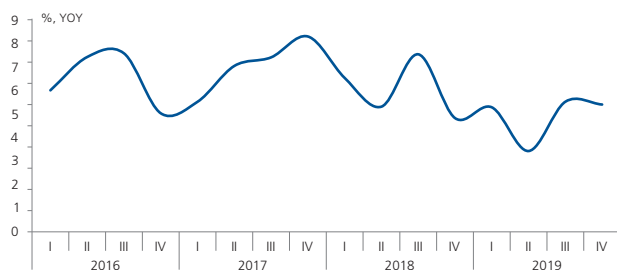


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah
Grafik 1.59 Pertumbuhan PDRB Transportasi dan Pergudangan; serta Informasi dan Komunikasi

dengan meningkatnya kesadaran teknologi masyarakat mendorong penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan usaha semakin masif. Hal tersebut dapat terlihat dari maraknya perkembangan *e-commerce*, dan *start up company* yang berbasis teknologi informasi.

Lapangan usaha lainnya yaitu transportasi dan pergudangan juga tumbuh melambat dari 8,27% (yoy) pada triwulan III 2019 menjadi 7,56% (yoy) pada triwulan laporan. Perlambatan pertumbuhan lapangan usaha ini sejalan dengan penurunan kinerja lapangan usaha perdagangan. Peningkatan volume barang dagang yang tidak setinggi triwulan sebelumnya membuat aktivitas jasa logistik dan pergudangan menjadi lebih terbatas.

Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan laporan. Pada triwulan IV 2019, lapangan usaha ini tumbuh 3,07% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan III 2019 yang tumbuh 4,16% (yoy). Perlambatan pertumbuhan lapangan usaha



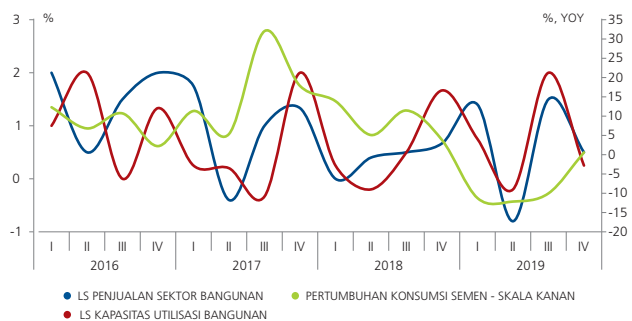
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah
Grafik 1.61 Pertumbuhan PDRB Konstruksi



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah
Grafik 1.60 Pertumbuhan PDRB Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Konsumsi Pemerintah

administrasi pemerintahan sejalan dengan kinerja pengeluaran konsumsi pemerintah yang hanya tumbuh tipis 0,10% (yoy) pada triwulan laporan, dari 7,75% (yoy) pada triwulan III 2019.

Lapangan usaha konstruksi yang merupakan lapangan usaha dengan pangsa terbesar keempat di Jawa Tengah mencatatkan pelemahan kinerja pada triwulan IV 2019. Pada periode laporan, lapangan usaha konstruksi tumbuh melambat dari 5,55% (yoy) pada triwulan III 2019 menjadi tumbuh sebesar 5,43% (yoy). Melambatnya kinerja konstruksi tercermin dari *likert scale* penjualan domestik yang menurun menjadi sebesar 0,50 dari 1,50 di triwulan III 2019. Perlambatan pada triwulan laporan terutama dipengaruhi oleh melambatnya konstruksi bangunan untuk perumahan. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan lapangan usaha real estate yang juga tumbuh melambat dari 6,22% (yoy) menjadi 5,38% (yoy) pada triwulan laporan.



Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah
Grafik 1.62 SBT Kegiatan Usaha, SBT Kegiatan Investasi Bangunan dan Pertumbuhan Konsumsi Semen

1.2 TRACKING PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL TRIWULAN I 2019

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan mengalami peningkatan pada triwulan I 2020 dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, perbaikan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2019 bersumber dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi. Kinerja konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap kuat di awal tahun seiring dengan upaya penyesuaian UMK dan stabilnya *outlook* inflasi ke depan sehingga turut menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kegiatan investasi akan didorong kebijakan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Kinerja ekspor luar negeri juga diperkirakan akan meningkat di awal tahun. Sementara itu, berdasarkan lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan terjadi pada lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan, perdagangan, serta pertanian. Percepatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terkait dengan upaya mengejar target produksi (*building stock*) dalam rangka persiapan pemenuhan kebutuhan momen Ramadan dan Lebaran di triwulan II. Selain itu, pertumbuhan sektor industri dan perdagangan diperkirakan tetap kuat yang didorong meningkatnya volume barang hasil industri. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan I 2020 diproyeksikan berada di kisaran 5,2%-5,6% (yoy).

1.2.1 Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan I 2020 Sisi Pengeluaran

Pada triwulan I 2020, pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat terutama didorong oleh kenaikan konsumsi, khususnya konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap kuat di awal tahun seiring dengan upaya penyesuaian UMK dengan tingkat pertumbuhan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dengan pangsa lebih dari 60%, akselerasi pada komponen pengeluaran tersebut akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih cepat pada triwulan I 2020. Permintaan domestik pada tahun 2020 diperkirakan tetap kuat, seiring dengan upaya menjaga daya beli masyarakat. Penyesuaian UMP Jawa Tengah yang naik 8,51% (yoy), lebih tinggi dari kenaikan UMP Jawa Tengah tahun sebelumnya sebesar 8,03% (yoy) sehingga turut menjaga daya beli. Komitmen pemerintah untuk perlindungan daya beli dan pengentasan kemiskinan melalui penyaluran bansos seperti stimulus bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan subsidi energi; diperkirakan berperan dalam menjaga daya beli masyarakat sehingga selanjutnya berdampak pada peningkatan kinerja konsumsi.

Perkiraan peningkatan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2020 sesuai dengan optimisme konsumen yang tercermin dari hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, peningkatan konsumsi juga ditunjukkan dari persentase penggunaan penghasilan dimana untuk konsumsi meningkat dari 62,6% pada triwulan IV 2019 menjadi 63,9% pada Februari 2020. Porsi penggunaan pengeluaran untuk tabungan berkurang dari 22,3% pada triwulan IV 2019 menjadi 21,1% pada periode Februari 2020. Hasil tersebut mengkonfirmasi dari Indeks Tendensi Konsumen BPS yang mencatat perkiraan pendapatan rumah tangga meningkat pada triwulan I 2020, dari 105,6 menjadi 109,63. Kredit konsumsi juga menunjukkan peningkatan di awal tahun dengan tumbuh sebesar 5,54% (yoy) per Februari 2020 atau lebih tinggi dibanding triwulan IV 2019 sebesar 5,02% (yoy). Peningkatan kredit konsumen didorong pertumbuhan pada kredit multiguna (8,29%, yoy dari 6,40% (yoy) pada triwulan sebelumnya).

Pada sisi pemerintah, konsumsi diperkirakan mengalami peningkatan pada triwulan I 2020. Pasca penetapan Peraturan Presiden No. 79 tahun 2019 mengenai percepatan pembangunan di Jawa Tengah, pemerintah daerah mulai agresif dalam merealisasikan

anggaran dan merencanakan program baru. Hal ini tercermin dari giro Pemerintah yang tumbuh negatif 15,47% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya (24,30% (yoy)), yang mengindikasikan proses realisasi anggaran berlangsung cukup intensif.

Kinerja investasi diprediksi tumbuh meningkat pada triwulan I 2020, seiring dengan percepatan pembangunan di Jawa Tengah. Pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan diperkirakan akan semakin dipercepat realisasinya, seperti Tol Semarang-Demak; Tol Bawen-Yogya; termasuk beberapa rencana investasi swasta besar yang saat ini masih dalam tahap negosiasi, antara lain: rencana investor masuk ke KEK Kendal. Adapun beberapa proyek yang masih menjadi pendorong kinerja investasi Jawa Tengah antara lain: Bandara Wirasaba/Jenderal Soedirman; Stasiun Bandara Adi Soemarmo dan Jalur Kereta Api Bandara Adi Soemarmo; SPAM Semarang Barat; serta KRL Solo-Yogyakarta. Sementara dari sisi swasta, pengembangan kawasan wisata Borobudur oleh PT Badan Otorita Borobudur (BOB) menjadi prioritas karena menjadi sumber ekspor jasa dalam mengurangi defisit neraca perdagangan. Hasil SKDU menunjukkan perkiraan investasi yang lebih tinggi pada triwulan I 2020 yaitu 11,59%, triwulan sebelumnya 10,11%.

Pertumbuhan ekspor luar negeri Jawa Tengah di awal tahun 2020 diperkirakan melambat dibanding perkiraan semula. Kondisi global yang cenderung melemah sejak kemunculan virus COVID-19 yang ditunjukkan dari PMI Manufaktur negara-negara tujuan ekspor dari Jawa Tengah seperti Eropa, AS, dan Tiongkok. Hasil liaison juga menunjukkan adanya penurunan penjualan ekspor ke luar negeri yang merupakan dampak merebaknya virus COVID-19. Data ekspor Jawa Tengah yang bersumber dari Dirjen Bea Cukai menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor nonmigas di triwulan I 2020 (data Januari) sebesar -5,02% (yoy), lebih rendah dari triwulan IV 2019 yang tumbuh -0,06% (yoy).

Impor luar negeri belum terpengaruh penyebaran virus COVID-19 di Januari 2020. Berdasarkan data Dirjen Bea Cukai, impor luar negeri nonmigas Jawa Tengah tercatat tumbuh -0,58% (yoy). Meski tumbuh negatif, perkembangan tersebut lebih baik dibanding -19,27% (yoy) pada triwulan IV 2019. Kondisi ini terjadi karena pelaku usaha masih memiliki persediaan bahan baku industri sehingga belum melakukan pemesanan kembali.

1.2.2 Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan I 2019 Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2020 diperkirakan berasal dari lapangan usaha industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kinerja industri pengolahan memiliki pangsa terbesar, yaitu lebih dari 30%, diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada triwulan I 2020, seiring dengan upaya mengejar target produksi (*building stock*) dalam rangka persiapan pemenuhan kebutuhan momen Ramadan dan Lebaran di triwulan II. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja lapangan usaha perdagangan diperkirakan turut meningkat. Di sisi lain, lapangan usaha pertanian diperkirakan mengalami percepatan pertumbuhan seiring dengan datangnya musim panen dari hasil musim tanam terakhir tahun sebelumnya.

Kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan I 2020 diperkirakan kembali menunjukkan perbaikan. Pelaku usaha diperkirakan mendorong kegiatan produksinya guna memenuhi permintaan domestik yang tetap kuat sejak awal tahun. Hal tersebut terkait dengan upaya mengejar target produksi dalam rangka persiapan pemenuhan kebutuhan momen Ramadan dan Lebaran di triwulan II 2020. Namun demikian, melemahnya permintaan ekspor pada awal tahun akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global akibat penyebaran virus COVID-19 diperkirakan akan sedikit menahan kinerja lapangan usaha industri pengolahan.

Peningkatan kegiatan usaha industri pengolahan diindikasikan oleh penyaluran kredit perbankan ke sektor ini yang tercatat membaik menjadi tumbuh 3,57% (yoy) pada triwulan I 2020 (data Januari), lebih tinggi dibanding 2,78% (yoy) pada triwulan IV 2019. Hasil SKDU Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa pelaku usaha memperkirakan kegiatan usaha di lapangan usaha industri pengolahan tumbuh lebih kuat pada triwulan I 2020. Hal ini tercermin dari perkiraan *Prompt Manufacturing Index* (PMI) hasil SKDU menunjukkan usaha sektor industri pengolahan pada triwulan I 2020 diperkirakan masih meningkat menjadi sebesar 55,94%; dari realisasi triwulan IV 2018 sebesar 52,84%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya volume produksi dan volume persediaan barang jadi.

Sejalan dengan kinerja industri pengolahan, pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diproyeksikan masih mengalami perbaikan pada triwulan I 2020. Penguatan tersebut didorong oleh meningkatnya perdagangan hasil panen komoditas pertanian serta barang hasil produksi dari aktivitas industri. Proses *re-stock* barang juga akan menjadi pendorong perdagangan menjelang bulan puasa dan hari raya Idulfitri. Selain itu, adanya perayaan Imlek di bulan Januari juga diperkirakan mendorong konsumsi. Hasil liaison dan SKDU menunjukkan adanya peningkatan penjualan domestik dari sektor perdagangan. Begitu pula, kredit perdagangan yang tumbuh 6,35% (yoy) pada Januari 2020, meningkat dibanding akhir tahun 2019 yang sebesar 5,79% (yoy).

Selanjutnya, pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan diprediksi mengalami percepatan pada triwulan I 2020, seiring dengan datangnya musim panen padi dari hasil musim tanam terakhir tahun sebelumnya. Musim panen raya didukung curah hujan yang telah meningkat 1,26% (yoy), lebih baik dibanding pertumbuhan negatif 40,30% (yoy) pada triwulan IV 2019. Hasil SKDU Bank Indonesia

menunjukkan bahwa SBT perkiraan kegiatan usaha untuk sektor pertanian pada triwulan I 2020 sebesar 8,41; lebih tinggi dari realisasi SBT di triwulan IV 2019 yang tercatat 2,44%.

SUPLEMEN I

PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI EKONOMI JAWA TENGAH

I. Pendahuluan

Perekonomian Indonesia sebelum krisis 1998 menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Bank Dunia bahkan mengategorikan Indonesia sebagai “*New Industrialized Economies*” (NIEs) pada tahun 1993 bersama dengan Malaysia dan Thailand. Krisis moneter 1998 mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi 13,1% yang diikuti pertumbuhan negatif di hampir semua lapangan usaha. Setelah krisis 1998, pertumbuhan ekonomi nasional belum mampu tumbuh ke tingkat pra krisis. Hal ini terutama disebabkan oleh melemahnya kinerja dan daya saing industri di hampir semua sektor.

Pada saat yang sama, Indonesia justru memperoleh bonus demografi, dimana dua per tiga dari total penduduk merupakan angkatan kerja yang berusia muda. Peningkatan *middle income class* di Indonesia saat ini belum diantisipasi dengan baik oleh dunia usaha sehingga peningkatan permintaan domestik tidak dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri. Konsumen kelas menengah dengan kapasitas dan kapabilitas yang lebih baik akan cenderung pula meminta produk-produk yang lebih berkualitas, bernilai tambah dan terdiferensiasi tinggi. Akibatnya terjadi impor barang konsumsi dalam skala besar untuk memenuhi permintaan tersebut yang berpotensi menyebabkan *current account deficit*.

Neraca perdagangan Indonesia yang telah mengalami defisit sejak tahun 2011, tidak terlepas dari kinerja ekspor Jawa Tengah yang relatif stagnan dalam 1 (satu) dekade terakhir. Tingginya rasio ekspor nasional yang bertumpu pada komoditas alam menyebabkan tingginya kerentanan akibat fluktuasi permintaan yang sangat terpengaruh pada dinamika perekonomian global. Selain itu, rendahnya pangsa

industri pengolahan di dalam negeri menjadi salah satu penyebab tingginya rasio ekspor barang primer serta tingginya impor barang sekunder untuk memenuhi permintaan dalam negeri.

Terkait hal tersebut, perlu disusun suatu kajian yang fokus pada upaya mendorong kinerja sektor/industri utama yang ada untuk dapat mendukung ekspor dan penyerapan tenaga kerja, sehingga secara implisit dapat dilihat dampak pada penurunan defisit transaksi berjalan, serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Bank Indonesia senantiasa menyusun kajian dalam mendukung rekomendasi kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pelaku usaha sehingga dapat mendukung pengembangan industri strategis di daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Jawa Tengah sebagai salah satu penopang utama perekonomian Indonesia, menyumbang 8,47% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, atau menjadi kontributor keempat terbesar setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Walaupun laju pertumbuhannya masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, sejak 2016, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif lebih rendah dibandingkan provinsi tetangganya, Jawa Barat dan Jawa Timur. Selanjutnya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi, Pemerintah bermaksud untuk menetapkan provinsi besar (Jawa Tengah dan Jawa Timur) untuk mencapai level pertumbuhan ekonomi 7%.

SUPLEMEN I

II. Penjelasan Rekomendasi

Melalui Rapat Terbatas tanggal 9 Juli 2019, Presiden menyepakati 3 proyek besar (*quick wins*) di Jawa Tengah yang dapat memberikan efek akselerasi pertumbuhan ekonomi, baik di lingkup provinsi, regional Jawa, maupun di tingkat nasional. Ketiga *quick wins* tersebut meliputi: Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Brebes, serta Kawasan Pariwisata Borobudur. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah telah menyampaikan kendala utama dan rekomendasi solusi 3 *quick wins* tersebut kepada Pemerintah Pusat, termasuk harapan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata, dan inklusif.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemetaan (deliniasi) dan penyesuaian bagi 3 *quick wins* tersebut terhadap rencana pengembangan wilayah di Jawa Tengah, yang secara garis besar terbagi menjadi 8 wilayah

pengembangan ekonomi. Model pendekatan pengembangan ekonomi berbasis wilayah tersebut dipilih dengan mempertimbangkan aspek pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- Wilayah Kedungsepur, Bregasmalang, serta Purwomanggung menjadi pusat pertumbuhan utama yang selama ini telah menjadi pengungkit perekonomian Jawa Tengah, yang selanjutnya dapat ditingkatkan lagi kinerjanya dengan penguatan konektivitas dan sistem logistik.
- Wilayah Wanarakuti, Banglor, Barlingmascakeb, Petanglong, serta Subosukowonosraten menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang akan memperoleh manfaat terbesar dari pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional yang telah berjalan selama ini, sesuai dengan yang tercantum pada Perpres No. 3 tahun 2016 dan Perpres No. 58 tahun 2017, tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.



Gambar 1 Arah Pengembangan Wilayah Jawa Tengah

SUPLEMEN I

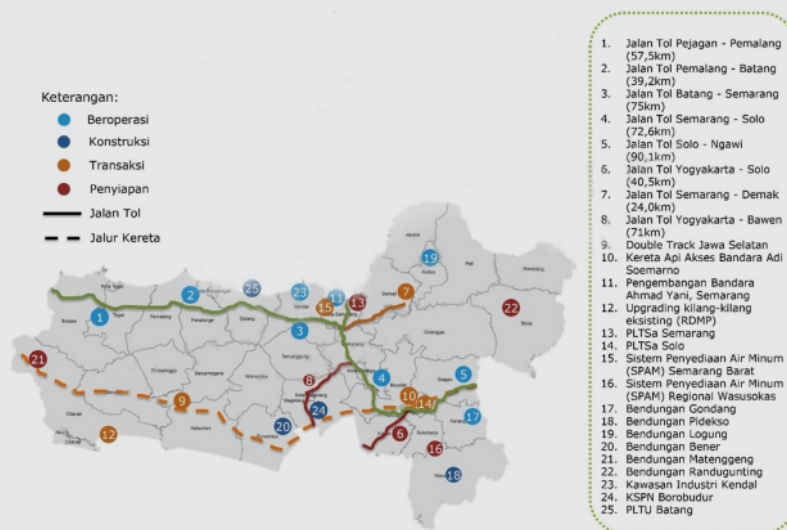
Selanjutnya, daftar (*masterlist*) infrastruktur utama telah disusun dengan memperhatikan prinsip (i) pusat pertumbuhan utama (aglomerasi) industri, serta (ii) pemerataan pembangunan:

- a. Pusat pertumbuhan utama meliputi wilayah aglomerasi industri manufaktur, sentra produksi pertanian/peternakan, serta pusat potensi pariwisata yang menjadi mesin pertumbuhan bagi wilayah sekitar. Penyusunan rekomendasi pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan :
- Pusat pertumbuhan primer yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah meliputi: Bregasmalang, Kedungsepur, Purwomanggung.
 - Pusat pertumbuhan lateral, menjadi sumber pertumbuhan baru (non-tradisional), meliputi: Wanarakuti, Banglor, Barlingmascakeb, Petanglong, Subosukowonosraten.

b. Pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan akan mendukung aktivitas ekonomi dalam waktu jangka panjang:

- Infrastruktur antar dan intra kawasan yang menghubungkan simpul pertumbuhan antar kawasan, sekaligus mendukung sistem logistik nasional, baik untuk kebutuhan domestik, maupun kegiatan ekspor-impor.
- Infrastruktur utilitas yang menjadi faktor produksi utama yaitu, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Tenaga Listrik (meliputi pembangkitan, transmisi, dan distribusi), serta jaringan pipa gas.

Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sepanjang proses penyusunan, pemilihan, dan prioritasasi proyek dan program kerja terus berlangsung hingga menghasilkan usulan sejumlah 395 buah proyek/program kerja dengan total nilai Rp368,45 triliun. Seluruh rekomendasi tersebut telah



Sumber : KPPiP (2019)

Gambar 2 Proyek Strategis Nasional di Jawa Tengah

**SUPLEMEN I**

tertuang dalam Peraturan Presiden No.79 tahun 2019 tanggal 20 November 2019. Daftar usulan proyek tersebut tersebar pada 24 sektor dengan pangsa terbesar nilai proyek berlangsung pada sektor (i) Jalan/Jembatan, (ii) Minyak, Gas Bumi, dan Energi Baru Terbarukan, serta (iii) Transportasi. Sebagian besar sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut berasal dari pelaku usaha (BUMN, BUMD, Swasta) dengan pangsa sebesar 44,37%, diikuti oleh skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public-Private Partnership* (PPP) dengan pangsa sebesar 36,33%, pembiayaan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 19,27%, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 0,03%.





KEUANGAN PEMERINTAH

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 mengalami peningkatan, yang masih ditopang oleh penerimaan komponen pajak daerah. Peningkatan belanja daerah yang lebih tinggi dari pendapatan menyebabkan APBD Jawa Tengah defisit pada tahun ini.

- Pendorong utama realisasi pendapatan Jawa Tengah pada triwulan laporan berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (pangsa 55,83% dari pendapatan) dan dana perimbangan (pangsa 43,84% dari pendapatan). Dengan perkembangan ini, derajat otonomi fiskal Jawa Tengah sedikit meningkat dibandingkan triwulan lalu.
- Realisasi belanja mengalami penurunan yang bersumber dari penurunan penyerapan tidak langsung. Komponen belanja yang mendorong rendahnya penyerapan belanja tidak langsung adalah penurunan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan penurunan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.
- Alokasi pagu APBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 di berbagai fungsi utama telah sejalan dengan program prioritas Jawa Tengah, seperti pengentasan kemiskinan dan akses terhadap pendidikan.
- Realisasi Dana Desa pada triwulan laporan relatif sama dengan tahun lalu sebesar 99,92%. Namun demikian, secara nominal terdapat peningkatan sebesar 17,08%.



2.1. GAMBARAN UMUM APBD 2019

Sesuai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah perihal APBD Jawa Tengah 2019, pendapatan daerah Jawa Tengah pada tahun 2019 pada awalnya ditargetkan sebesar Rp25,97 triliun (atau bertumbuh relatif terbatas sebesar 5,3% dari APBD-P 2018). Kemudian dalam APBD-P direvisi menjadi Rp26,34 triliun atau naik sebesar 1,42% dari anggaran pendapatan semula. Peningkatan anggaran pendapatan utamanya bersumber dari peningkatan target Pendapatan asli daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Anggaran pendapatan pajak daerah naik sebesar 2,44% menjadi Rp11,99 triliun. Sementara target lain-lain pendapatan yang sah naik sebesar 5,40% menjadi Rp1,85 triliun. Seiring dengan upaya Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jawa Tengah untuk menggenjot penerimaan PAD antara lain melalui: (1) optimalisasi pemungutan pajak saat ini melalui pemanfaatan teknologi (*monitoring online* penerimaan pajak, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan); (2) peningkatan basis Wajib Pajak (WP) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); (3) peningkatan pelayanan kepada WP dengan 212 titik pelayanan pembayaran pajak. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Kemudian pendapatan dari anggaran perimbangan tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yang telah ditetapkan dengan jumlah anggaran sebesar Rp11,76 triliun.

Belanja daerah dianggarkan meningkat 4,20% dari anggaran semula sebesar Rp26,63 triliun atau naik 5,00%, dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp25,36 triliun. Peningkatan alokasi anggaran terjadi pada jenis belanja langsung maupun tidak langsung. Kenaikan alokasi biaya langsung dibandingkan dengan APBD awal 2019 adalah sebesar 4,62% menjadi Rp8,17 triliun atau naik sebesar 15,08% dari anggaran tahun 2018. Sejalan dengan itu, kenaikan belanja tidak langsung dibandingkan APBD awal 2019 adalah sebesar 4,02% menjadi Rp19,57 triliun atau naik sebesar 7,20% dari

Tabel 2.1 APBD dan APBD-P Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	(RP MILIAR)			%
	2018	2019-P	Naik / (turun)	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	14.112	14.488	376	2,66
PAJAK DAERAH	11.713	11.999	286	2,44
RETRIBUSI DAERAH	126	121	(5)	-3,97
HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	513	513	-	0,00
LAIN-LAIN PAD YG SAH	1.760	1.855	95	5,40
DANA PERIMBANGAN	11.766	11.766	-	0,00
DANA BAGI HSL PJK/BUKAN PJK	786	786	-	0,00
DANA ALOKASI UMUM	3.784	3.784	-	0,00
DANA ALOKASI DANA KHUSUS	7.196	7.196	-	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	87	86	(1)	-1,15
HIBAH	24	23	(1)	-4,17
DANA PENY. DAN OTONOMI KHUSUS	-	-	-	-
DANA INSENTIF DAERAH	63	63	-	0,00
PENDAPATAN LAINNYA	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	25.965	26.340	375	1,44
KOMPONEN BELANJA DAERAH				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.818	19.575	757	4,02
BELANJA PEGAWAI	6.154	6.069	(85)	-1,38
BELANJA HIBAH	5.430	5.352	(78)	-1,44
BELANJA BANTUAN SOSIAL	48	45	(3)	-6,25
BLNJ BAGI HASIL KPD KAB/KOTA	5.105	5.490	385	7,54
BLNJ BANT.KEU. KPD KAB/KOTA	2.058	2.596	538	26,14
BELANJA TDK TERDUGA	23	23	-	0,00
BELANJA LANGSUNG	7.814	8.175	361	4,62
BELANJA PEGAWAI	744	798	54	7,26
BELANJA BARANG DAN JASA	4.742	4.996	254	5,36
BELANJA MODAL	2.328	2.381	53	2,28
JUMLAH BELANJA	26.632	27.750	1.118	4,20

anggaran tahun 2018. Prioritas belanja APBD 2019 ditujukan pada penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sektor pendidikan. Dengan perkembangan demikian, defisit anggaran pada APBD-P 2019 tercatat menjadi sebesar Rp1,41 triliun. Untuk menutupi defisit tersebut sudah dianggarkan penerimaan pembiayaan dari SILPA dan pinjaman daerah sebesar Rp1,70 triliun. Sisanya akan ditutupi melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp295,33 miliar.

2.2. REALISASI APBD TRIWULAN IV 2019

Ditinjau dari serapan terhadap anggaran, persentase realisasi pendapatan pada triwulan laporan lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, demikian pula dengan realisasi belanja juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Realisasi pendapatan tercatat Rp25,86 Triliun (atau 98,17% dari APBD 2019), sementara realisasi belanja tercatat Rp26,20 Triliun (realisasi 94,43% dari APBD 2019). Meskipun demikian,

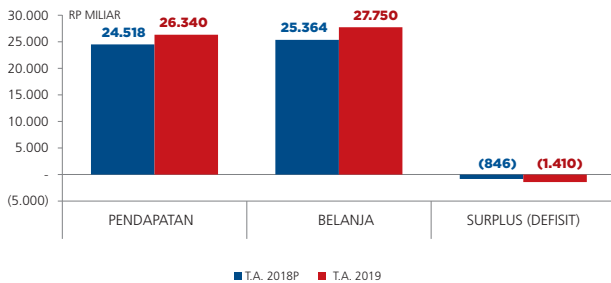
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi APBD Jawa Tengah 2019 (Rp Miliar)

URAIAN	REALISASI TW IV 2019	% REALISASI
PENDAPATAN	25,857	98.17%
PAD	14,437	99.65%
DANA PERIMBANGAN	11,335	96.34%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	85	98.84%
BELANJA	26,204	94.43%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	18,752	95.80%
BELANJA LANGSUNG	7,452	91.16%
SURPLUS/DEFISIT	(347)	

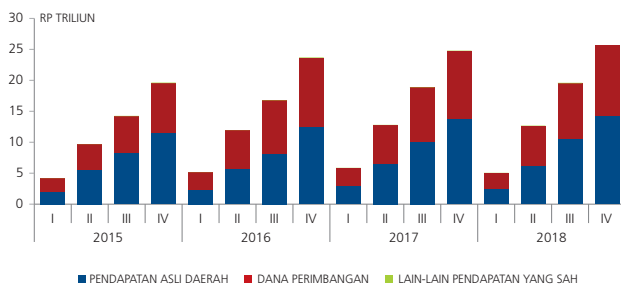
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, diolah

realisasi pendapatan tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pendapatan selama lima tahun terakhir sebesar 89,27%. Akan tetapi realisasi belanja tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata belanja selama lima tahun terakhir sebesar 95,03%.

Penurunan realisasi pendapatan disebabkan oleh menurunnya realisasi pendapatan asli daerah dari 105,71% pada triwulan IV 2018 menjadi hanya 99,65% pada triwulan IV 2019 yang bersumber dari penurunan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara, menurunnya realisasi belanja bersumber dari penurunan realisasi belanja tidak langsung dari 99,78% (triwulan IV-2018) menjadi 95,80% (triwulan IV-2019).



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

Grafik 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2018 dan T.A. 2019

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

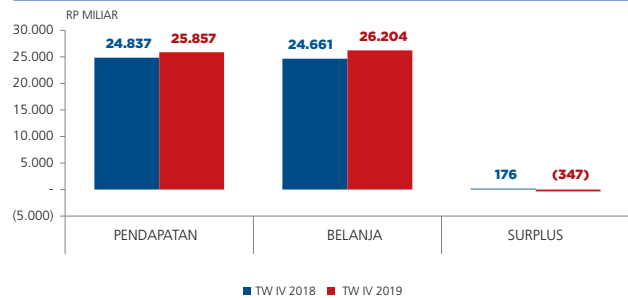
Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah

Namun demikian, secara keseluruhan **realisasi APBD Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 mencatatkan defisit sebesar Rp347 miliar.**

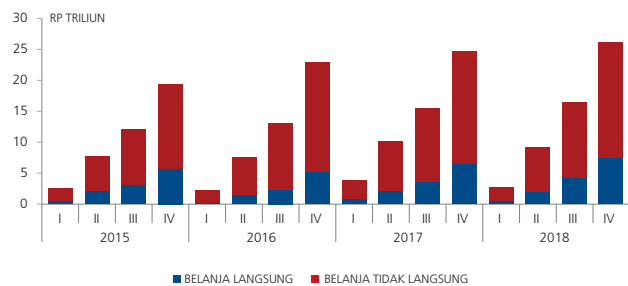
2.2.1. Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2019

Realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 adalah Rp25,85 Triliun atau secara persentase terealisasi sebesar 98,17% dari target. Persentase ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu (101,3%). Realisasi pendapatan utamanya bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah (55,83% dari pendapatan); dan dana perimbangan (43,84% dari pendapatan).

Realisasi dana pendapatan asli daerah pada triwulan laporan sebesar 99,65% dari APBD menjadi salah satu penyangga kinerja pendapatan Jawa Tengah pada triwulan laporan. Berdasarkan komponen, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama berasal dari pajak daerah (pangsa 82,79% dari realisasi PAD pada triwulan laporan), diikuti oleh Lain-Lain PAD yang Sah (pangsa 12,87%), dan hasil kekayaan daerah yang



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

Grafik 2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Triwulan II 2018 dan 2019

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

Grafik 2.4 Realisasi Belanja Daerah

Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan Triwulan IV Tahun 2018 dan 2019

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	TW IV 2018	TW IV 2019
PENDAPATAN	101.30%	98.17%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	105.71%	99.65%
PAJAK DAERAH	106.15%	99.61%
RETRIBUSI DAERAH	98.15%	94.21%
HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	102.45%	100.00%
LAIN-LAIN PAD YG SAH	104.23%	100.16%
DANA PERIMBANGAN	96.22%	96.34%
DANA BAGI HSL PJK/BUKAN PJK	80.71%	73.28%
DANA ALOKASI UMUM	99.97%	100.03%
DANA ALOKASI DANA KHUSUS	96.37%	96.91%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	101.82%	98.84%
HIBAH	100.00%	100.00%
DANA PENY. DAN OTONOMI KHUSUS		
DANA INSENTIF DAERAH	103.03%	98.41%
PENDAPATAN LAINNYA		

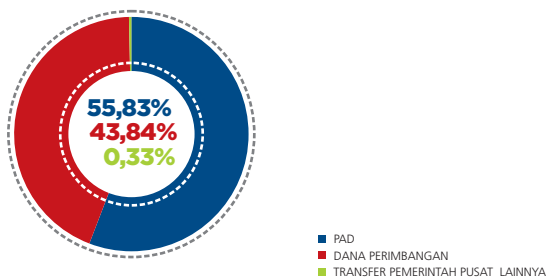
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, diolah

dipisahkan (pangsa 3,55%). Apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun lalu, nominal pendapatan Pajak daerah meningkat dari Rp11,50 triliun menjadi Rp11,95 triliun. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan pajak yang telah ditetapkan realisasi pada tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Tercatat realisasi pajak daerah hanya mencapai 99,65% sementara pada tahun lalu realisasi pajak daerah mencapai 106,15% dari anggaran. Sejalan dengan itu, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah meskipun mencapai target (100%), akan tetapi realisasinya masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 102,45%. Demikian pula komponen lain-lain PAD yang Sah pada triwulan laporan mencapai target anggaran dengan realisasi sebesar 100,16%. Namun demikian, pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 104,23%.

Selanjutnya, realisasi Dana Perimbangan tercatat sebesar 96,34% sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun lalu 96,22%. Pangsa dana perimbangan dalam postur APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar 43,84%. Komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan yang terbesar dalam dana perimbangan, yaitu 61,53% atau Rp6,97 Triliun yang diikuti oleh Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / Bukan Pajak masing-masing dengan komposisi 33,39% dan 5,08%. Dari ketiga komponen tersebut realisasi dana alokasi umum merupakan yang paling tinggi, yaitu 100,03% lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu 99,97%. Begitupun dengan realisasi dana alokasi khusus pada periode laporan juga lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, meningkat 0,54% dari 96,37%. Namun demikian, realisasi dana bagi hasil pajak / bukan pajak sebesar 73,28% lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 80,71%.

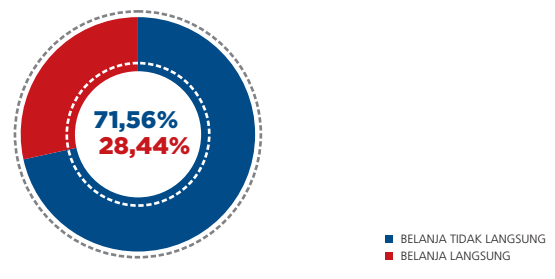
2.2.2. Realisasi Belanja Triwulan IV 2019

Realisasi belanja Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 tercatat sebesar Rp26,20 triliun atau 94,43% dari pagu anggaran belanja 2019 sebesar Rp27,75 triliun. Realisasi ini tidak lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi triwulan IV 2019 sebesar 97,23%. Postur realisasi belanja masih didominasi oleh belanja tidak langsung dengan kontribusi sebesar 71,56% dari total belanja. Komponen belanja tidak langsung yang memiliki pangsa terbesar terhadap total belanja pada triwulan



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

Grafik 2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan IV 2019



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

Grafik 2.6 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan IV 2019

Tabel 2.4 Realisasi Belanja Triwulan IV 2018 dan 2019

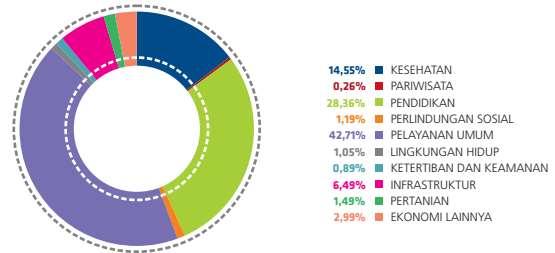
KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	TW IV 2018	TW IV 2019
BELANJA TIDAK LANGSUNG	99.78%	95.80%
BELANJA PEGAWAI	95.67%	95.70%
BELANJA HIBAH	94.26%	97.23%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	87.50%	97.78%
BLNJ BAGI HASIL KPD KAB/KOTA	108.32%	95.59%
BLNJ BANT.KEU. KPD KAB/KOTA	109.16%	94.22%
BELANJA TDK TERDUGA	65.00%	8.70%
BELANJA LANGSUNG	90.67%	91.16%
BELANJA PEGAWAI	95.45%	90.48%
BELANJA BARANG DAN JASA	90.32%	90.85%
BELANJA MODAL	89.59%	92.02%
JUMLAH BELANJA	97.23%	94.43%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, diolah

laporan adalah belanja pegawai dengan pangsa 22,16%, kemudian belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dengan pangsa sebesar 20,03%, dan belanja hibah dengan pangsa 19,86%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, pangsa komponen belanja pegawai relatif tetap karena merupakan pembayaran gaji rutin terhadap pegawai. Sementara pangsa belanja bantuan keuangan pada Kabupaten/Kota meningkat 0,78% dari 8,56% menjadi 9,33%. Sementara itu, pangsa belanja hibah mengalami penurunan sebesar 1,7% dari 21,56% menjadi hanya 19,86%.

Menurunnya realisasi anggaran belanja pada triwulan laporan bersumber dari beberapa komponen pada jenis belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada jenis belanja langsung, realisasi belanja pegawai lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, turun sebesar 4,97% dari 95,45% menjadi 90,48%. Penurunan komponen belanja pegawai pada jenis belanja langsung mengindikasikan terdapat beberapa program pemerintah daerah yang sudah direncanakan tidak berjalan sesuai rencana, karena komponen anggaran tersebut berhubungan dengan pembayaran honorarium yang berhubungan langsung dengan program pemerintah daerah.

Sementara pada jenis belanja tidak langsung, komponen belanja bagi hasil pada pemerintah kabupaten/kota dan bantuan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota menjadi sumber penahan realisasi belanja pada triwulan laporan.



Sumber: DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Grafik 2.7 Penggunaan Belanja APBD Jawa Tengah 2019

Realisasi belanja bagi hasil pada pemerintah kabupaten/kota tercatat sebesar 95,59% dari pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar 108,32%. Sejalan dengan itu, realisasi belanja bantuan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota yang tercatat sebesar 94,22% lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 109,16%. Hal ini mengindikasikan kontribusi pemerintah kabupaten/kota pada pendapatan daerah menurun dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Disamping itu, menurunnya belanja bantuan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota mengindikasikan tingkat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten/kota yang semakin membaik.

Secara garis besar, pangsa belanja APBD dan APBN Jawa Tengah 2019 relatif sama; ditujukan untuk pelayanan umum (42,7%), pendidikan (28,4%), dan kesehatan (14,6%). Alokasi yang lebih besar pada ketiga jenis belanja ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan fasilitas umum, akses pada pendidikan, dan layanan kesehatan.

2.3. STRUKTUR APBN PROVINSI JAWA TENGAH 2019

Secara keseluruhan, APBN yang dialokasikan di Provinsi Jawa Tengah tercatat Rp52,15Triliun, yang akan dianggarkan untuk 3 (tiga) fungsi utama yaitu pelayanan umum (pangsa 28,7%), ekonomi (20,9%), dan pendidikan (20,2%). Hal ini sejalan dengan tema

kebijakan fiskal 2019 yaitu “Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM” dan fokus kebijakan fiskal 2019, yaitu: (1) menjaga kesehatan fiskal agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan *sustainable*; dan (2) mendorong iklim investasi, melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas layanan publik, dan pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi dan ekspor.

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran APBN berdasarkan Jenis Belanja

BERDASARKAN JENIS BELANJA	2018P		2019	
	PAGU (Rp M)	PANGSA	PAGU (Rp M)	PANGSA
BELANJA PEGAWAI	14,991	28.48%	14,035	26.91%
BELANJA BARANG	16,206	30.79%	16,069	30.81%
BELANJA MODAL	11,335	21.53%	10,347	19.84%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	45	0.09%	75	0.14%
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	3,326	6.32%	3,734	15.13%
DANA DESA	6,735	12.80%	7,889	7.16%
TOTAL	52,637		52,149	

Sumber: DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran APBN berdasarkan Jenis Fungsi

BERDASARKAN FUNGSI	2018P		2019	
	PAGU (Rp M)	PANGSA	PAGU (Rp M)	PANGSA
PELAYANAN UMUM	13.791	26,2%	14.977	28,7%
EKONOMI	12.851	24,4%	10.912	20,9%
PENDIDIKAN	10.076	19,1%	10.556	20,2%
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	5.588	10,6%	5.371	10,3%
PERTAHANAN	3.616	6,9%	3.586	6,9%
KESEHATAN	3.536	6,7%	3.034	5,8%
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	1.389	2,6%	1.713	3,3%
LINGKUNGAN HIDUP	896	1,7%	1.107	2,1%
AGAMA	763	1,4%	745	1,4%
PERLINDUNGAN SOSIAL	117	0,2%	113	0,2%
PARIWISATA DAN BUDAYA	15	0,0%	35	0,1%
TOTAL	52.637		52.149	

Sumber: DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2023 menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 7,48%. Beberapa program utama pengentasan kemiskinan tersebut antara lain:

- Basic Life Access

- Perluasan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) menjadi sebesar 565 ribu siswa SD dan 800 ribu siswa SMA/SMK/MA/SLB.
- Perluasan Bantuan Beasiswa Siswa Miskin kepada 10 ribu siswa miskin bekerja sama dengan BUMD dan pelaku dunia usaha.

- Pendirian 15 Sekolah Menengah Kejuruan dengan skema *boarding school* di Kabupaten-kabupaten sasaran.
- Peningkatan penyaluran Jaminan Kesehatan Daerah dari sebesar 849 ribu pada tahun 2018 menjadi 910 ribu pada 2020.
- Perluasan program Rumah Sehat Layak Huni menjadi sebesar 7.809 desa dan 769 kelurahan pada tahun 2020.
- Penyambungan murah listrik baru murah sebanyak 15.000 rumah tangga, bekerja sama dengan PT PLN dan pelaku dunia usaha.

- Sustainable Livelihood

- Perluasan jaminan kredit usaha rakyat kepada lapangan usaha perikanan dan perkebunan, bekerja sama dengan Perbankan dan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Tengah.
- Program pembinaan 1000 wirausaha muda, melalui Dinas Koperasi & UMKM Jawa Tengah.
- Pemberian bantuan hukum kepada 500 BUMDes yang akan naik tingkat usaha.
- Peningkatan kemandirian ekonomi ibu rumah tangga, melalui pembinaan 12 ribu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) serta pilot project bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Penyaluran Dana Desa untuk Provinsi Jateng yang meningkat menjadi Rp7,8 triliun di 2019, dibandingkan Rp6,7 triliun di 2017. Dana itu akan dialokasikan kepada 7.809 desa dimana setiap desa akan mendapatkan Rp998 juta.
- Satu Dinas Satu Desa Miskin yang diprioritaskan di 745 desa binaan di 14 kabupaten.

Secara keseluruhan, realisasi APBN triwulan IV 2019 mencapai Rp51,85 triliun (99,44% dari pagu APBN 2019). Ditinjau berdasarkan fungsi, realisasi belanja APBN 2019 mengikuti pola historis, yang didominasi oleh belanja pada fungsi pelayanan umum, pendidikan, dan ekonomi.

Tabel 2.7 Realisasi APBN berdasarkan Fungsi pada Triwulan IV 2017-2019

BERDASARKAN FUNGSI	2018 - IV (MILIAR RP)	PANGSA (%)	REALISASI THD PAGU (%)	2019 - IV (MILIAR RP)	PANGSA (%)	REALISASI THD PAGU (%)
PELAYANAN UMUM	13,046	26.70	87.11%	14,416	27.80	96.25%
PERTAHANAN	3,576	7.32	99.73%	4,345	8.38	121.17%
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	5,437	11.13	101.23%	5,638	10.87	104.98%
EKONOMI	11,005	22.52	100.85%	9,925	19.14	90.95%
LINGKUNGAN HIDUP	851	1.74	76.89%	1,075	2.07	97.07%
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	1,363	2.79	79.55%	1,632	3.15	95.28%
KESEHATAN	3,131	6.41	103.19%	3,050	5.88	100.51%
PARIWISATA DAN BUDAYA	11	0.02	30.35%	27	0.05	76.45%
AGAMA	751	1.54	100.90%	867	1.67	116.36%
PENDIDIKAN	9,573	19.59	90.69%	10,766	20.76	101.99%
PERLINDUNGAN SOSIAL	115	0.24	101.73%	116	0.22	102.23%
TOTAL	48,860	100.00	93.69%	51,856	100.00	99.44%

Sumber: DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Tabel 2.8 Realisasi APBN berdasarkan Jenis Belanja pada Triwulan IV 2017- 2019

BERDASARKAN JENIS BELANJA	2018 - IV (MILIAR RP)	PANGSA (%)	REALISASI THD PAGU (%)	2019 - IV (MILIAR RP)	PANGSA (%)	REALISASI THD PAGU (%)
BELANJA PEGAWAI	14,516	29.71	96.83%	15,421	29.74	109.87%
BELANJA BARANG	14,808	30.31	91.37%	16,006	30.87	99.61%
BELANJA MODAL	9,743	19.94	85.95%	9,049	17.45	87.46%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	45	0.09	99.68%	76	0.15	101.80%
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	3,017	6.17	90.71%	3,421	6.60	91.62%
DANA DESA	6,732	13.78	99.96%	7,882	15.20	99.92%
TOTAL	48,860	100.00	92.82%	51,856	100.00	99.44%

Sumber: DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Sedangkan, berdasarkan jenis belanja, realisasi APBN triwulan IV 2019 masih didominasi oleh belanja barang dan belanja pegawai. Realisasi kedua komponen belanja ini lebih baik pada triwulan laporan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu masing-masing 99,61% dan 109,87%. Sementara realisasi dana desa pada triwulan laporan menunjukkan kinerja yang relatif sama dengan realisasi pada tahun lalu

sebesar 99,44% dari pagu anggaran. Namun demikian, pangsa dana desa pada postur belanja APBN di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 13,78% menjadi 15,20% atau secara nominal meningkat sebesar 17,08% dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk membangun Indonesia dari pinggir dan upaya untuk pemerataan pembangunan di setiap pelosok desa khususnya di Jawa Tengah.



PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 lebih rendah dibandingkan triwulan III 2019.

- Berdasarkan disagregasi kelompok, penurunan inflasi tahunan Jawa Tengah terutama berasal dari Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan; Bahan Makanan; Perumahan, Air, Listrik; serta Kesehatan.. Tekanan inflasi pada kelompok transportasi mereda sebagai akibat tarif angkutan udara dan tarif kereta api yang terkendali.
- Sementara, tekanan inflasi bersumber dari Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Dan Tembakau, Utamanya sub-kelompok tembakau seiring dengan peningkatan harga komoditas rokok selama triwulan laporan.



3.1. INFLASI SECARA UMUM

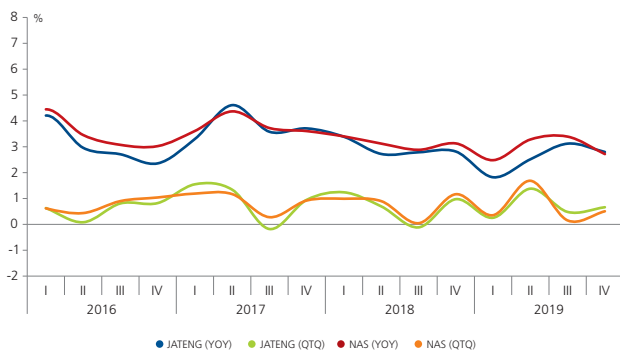
Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 tercatat sebesar 2,80% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,13% (yoy). Selain itu, capaian inflasi tahunan tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan IV pada tahun 2018 yang tercatat sebesar 2,82% (yoy). Sesuai dengan pola historis, secara triwulanan Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,66% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2019 yang mencatatkan inflasi sebesar 0,48% (qtq).

Walaupun mencatatkan penurunan, laju inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan laporan tidak lebih baik dibanding dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,72% (yoy). Namun demikian, dibandingkan inflasi kawasan Jawa yang sebesar 3,00% (yoy), capaian inflasi Jawa Tengah masih lebih baik. Penurunan inflasi tahunan Jawa Tengah tersebut juga sejalan dengan tren penurunan tekanan harga yang berlangsung di tingkat nasional maupun di kawasan Jawa secara khususnya. Dengan

perkembangan tersebut, setelah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan inflasi terendah ketiga di kawasan Jawa pada triwulan IV 2019.

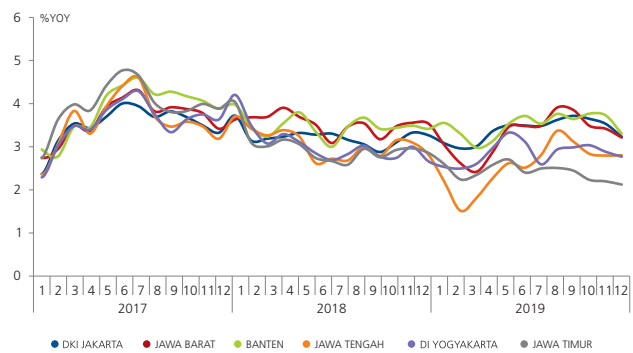
Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 menunjukkan intensitas peningkatan tekanan harga pada bulan Desember 2019. Hal ini dialami oleh seluruh Provinsi di Jawa, kecuali Provinsi Banten. Peningkatan tekanan harga tersebut didorong oleh faktor musiman permintaan yang tinggi disaat liburan akhir tahun bersamaan dengan belum optimalnya produksi tanaman bahan makanan, akibat pergeseran periode tanam.

Peningkatan tekanan inflasi triwulanan Jawa Tengah pada triwulan laporan khususnya disumbangkan oleh kelompok bahan makanan serta makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Peningkatan tekanan harga



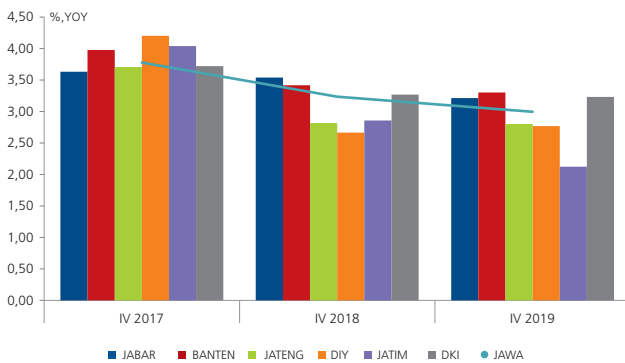
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional



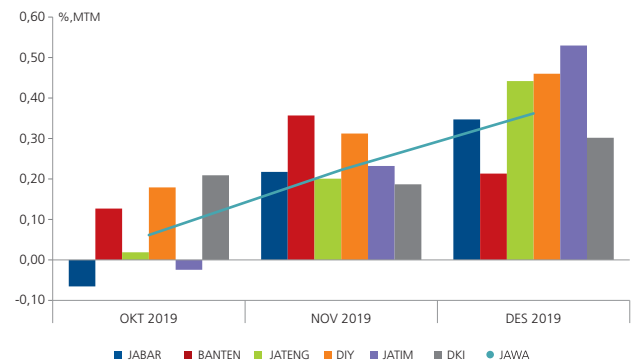
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi di Kawasan Jawa



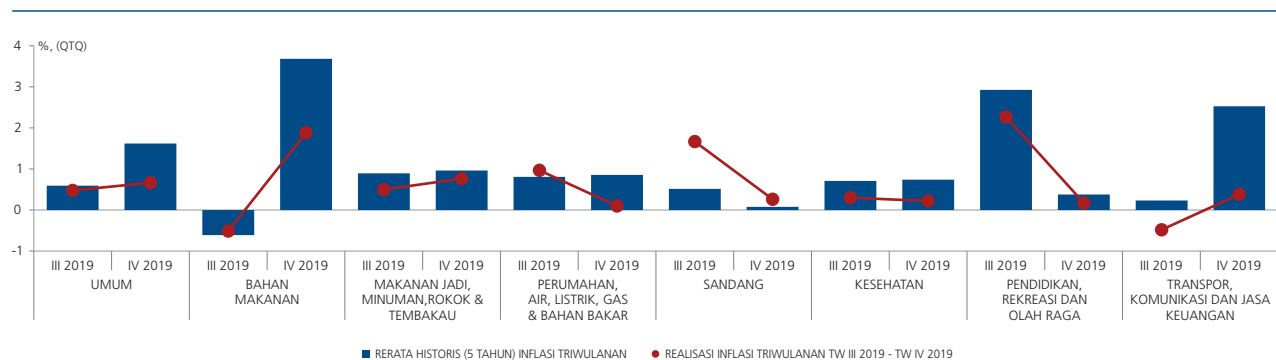
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.3 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.4 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.5 Perbandingan Inflasi Triwulanan Berdasarkan Kelompok

Tabel 3.1 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan

OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
DAGING AYAM RAS	0,062%	BAWANG MERAH	0,106%	TELUR AYAM RAS	0,122%
BAWANG MERAH	0,034%	TELUR AYAM RAS	0,041%	BAWANG MERAH	0,114%
ROKOK KRETEK FILTER	0,009%	ROKOK KRETEK FILTER	0,033%	ROKOK KRETEK FILTER	0,025%
AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	0,009%	DAGING AYAM RAS	0,031%	CABAI MERAH	0,022%
KETIMUN	0,008%	JERUK	0,028%	JERUK	0,019%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 3.2 Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan

OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
TELUR AYAM RAS	-0,049%	CABAI MERAH	-0,050%	DAGING AYAM RAS	-0,021%
CABAI MERAH	-0,043%	CABAI RAWIT	-0,037%	KANGKUNG	-0,014%
CABAI RAWIT	-0,036%	CABE HIJAU	-0,014%	LABU SIAM/JIPANG	-0,005%
CABE HIJAU	-0,017%	APEL	-0,010%	PIR	-0,005%
APEL	-0,013%	PISANG	-0,009%	BESI BETON	-0,004%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

triwulanan pada kedua kelompok tersebut sejalan dengan pola historis yang mengindikasikan peningkatan permintaan pada saat hari raya keagamaan nasional. Lebih lanjut, tren peningkatan tekanan inflasi kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau bersumber dari penyesuaian harga komoditas rokok kretek filter oleh pedagang seiring dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan cukai rokok 35% pada awal tahun 2020.

Inflasi tahunan pada triwulan laporan terpantau sebesar 2,80% (yoy), atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan III 2019 yang tercatat sebesar 3,13% (yoy). Penurunan tekanan inflasi pada triwulan laporan juga berlangsung pada seluruh kota pantauan di Jawa Tengah dengan intensitas yang bervariasi. Penurunan tekanan harga terbesar berlangsung di Kota Cilacap yang mencatatkan peningkatan laju inflasi dari sebesar 2,80% (yoy) pada triwulan III 2019, menjadi sebesar 2,19% (yoy) pada triwulan laporan. Secara keseluruhan,

perkembangan inflasi tahunan pada seluruh kota pantauan di Jawa Tengah sejalan dengan tren di kawasan Jawa maupun di tingkat nasional, khususnya pada periode Desember 2019, saat seluruh kota pantauan di Jawa Tengah mencatatkan penurunan tekanan inflasi tahunan.

Tabel 3.3. Inflasi Tahunan Kota di Provinsi Jawa Tengah

NO.	KOTA	INFLASI IV 2018 (%YOY)	INFLASI III 2019 (%YOY)	INFLASI IV 2019 (%YOY)
1.	CILACAP	3,21	2,80	2,19
2.	PURWOKERTO	2,98	2,92	2,28
3.	KUDUS	3,11	3,51	3,02
4.	SURAKARTA	2,45	3,01	2,94
5.	SEMARANG	2,77	3,20	2,93
6.	TEGAL	3,08	2,94	2,56

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

3.2. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK

Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa keuangan menjadi kontributor utama penahan laju inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan IV 2019. Penurunan inflasi tahunan juga dicatatkan oleh kelompok

Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok

INFLASI KELOMPOK (%; YOY)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV
UMUM	8,22	2,73	2,36	3,71	2,82	3,13	2,80
BAHAN MAKANAN	2,35	0,95	1,13	0,08	0,71	5,57	5,25
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	1,16	1,00	0,74	0,55	0,70	2,85	3,15
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	1,96	0,55	0,36	1,42	0,47	2,08	1,75
SANDANG	0,14	0,13	0,05	0,11	0,13	3,59	3,40
KESEHATAN	0,27	0,20	0,15	0,22	0,19	2,41	2,06
PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA	0,56	0,37	0,26	0,35	0,15	2,88	2,88
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	1,76	-0,34	-0,23	0,92	0,49	2,02	0,80

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; Kelompok Kesehatan; Kelompok Bahan Makanan; dan juga Kelompok Sandang. Menurunnya tekanan inflasi empat dari tujuh kelompok komoditas memberikan andil besar terhadap melambatnya inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan laporan.

Sementara itu, peningkatan angka inflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau menjadi salah satu faktor penahan inflasi tahunan Jawa Tengah untuk menurun lebih tinggi pada triwulan IV 2019. Dengan bobot konsumsi kedua terbesar dibandingkan kelompok komoditas lainnya, peningkatan tekanan inflasi kelompok tersebut menyebabkan inflasi menurun terbatas dibandingkan triwulan III 2019. Sementara itu, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga relatif tidak mengalami pergerakan inflasi yang signifikan dibanding triwulan sebelumnya.

Penurunan tekanan inflasi tahunan tersebut juga dapat dicerminkan pada perkembangan harga triwulanan. Pada triwulan IV 2019, indeks harga pada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar serta kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga mencatatkan penurunan harga triwulanan, dengan laju

yang lebih rendah dibandingkan rerata historis triwulan IV sepanjang tahun 2014-2018. Demikian pula dengan kelompok sandang yang merupakan kelompok komoditas kebutuhan sekunder masyarakat, mencatatkan peningkatan harga triwulanan yang lebih rendah dibandingkan rerata historisnya.

3.2.1. Kelompok Bahan Makanan

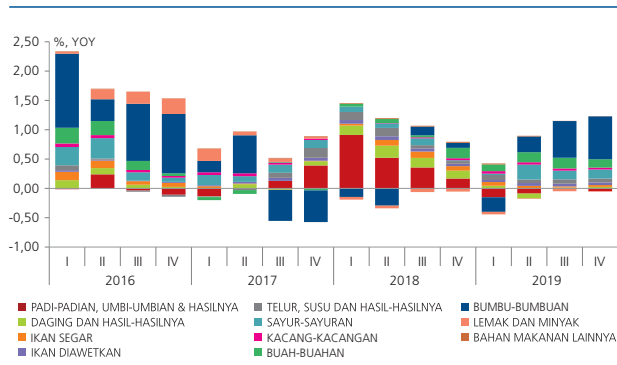
Perlambatan inflasi kelompok Bahan Makanan menjadi salah satu faktor penurunan inflasi tahunan Jawa Tengah. Inflasi kelompok bahan makanan pada triwulan IV 2019 tercatat sebesar 5,25% (yoy), atau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,57% (yoy). Sepanjang bulan Oktober-Desember 2019, peningkatan indeks harga triwulanan kelompok bahan makanan tercatat cukup rendah, yaitu sebesar 1,88% (qtq). Angka triwulanan tersebut sudah lebih rendah dibanding perkembangan indeks harga bahan makanan pada triwulan yang sama pada tahun 2018 yang mencapai 2,19% (qtq).

Penurunan inflasi tahunan kelompok bahan makanan tersebut terutama disumbang oleh adanya peningkatan pasokan komoditas pangan utama. Penurunan indeks harga secara bulanan sub-kelompok

Tabel 3.5 Perkembangan Inflasi Triwulanan Berdasarkan Kelompok

INFLASI KELOMPOK (%; QTQ)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV
UMUM	4,18	1,17	0,82	0,95	0,97	0,47	0,66
BAHAN MAKANAN	7,34	3,43	2,12	3,33	1,45	-0,51	1,88
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	2,08	1,32	0,54	0,39	0,48	0,50	0,76
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	2,67	0,37	0,46	0,34	0,42	0,97	0,10
SANDANG	0,70	-0,15	-0,75	0,14	0,45	1,66	0,26
KESEHATAN	1,12	0,79	0,50	0,72	0,56	0,30	0,22
PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA	1,16	0,33	0,10	0,14	0,17	2,26	0,17
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	9,32	0,39	1,05	0,28	1,59	-0,48	0,38

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah



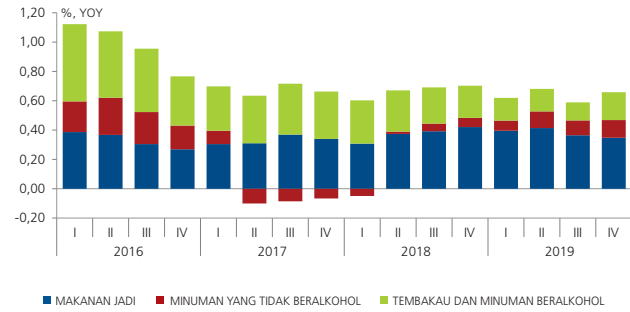
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.6 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Bahan Makanan

padi-padian, umbi-umbian, dan hasilnya serta sub kelompok buah-buahan, serta sub-kelompok bumbu-bumbuan pada triwulan IV 2019 terhitung lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 lalu. Meningkatnya pasokan komoditas tersebut yang berasal dari produksi domestik dan impor berlangsung sejak akhir triwulan III 2019. Sementara itu, pasokan komoditas pangan utama yaitu beras juga mulai bertambah karena beberapa daerah telah mulai memasuki masa panen.

Sub-kelompok buah-buahan menjadi kontributor utama penurunan inflasi tahunan Jawa Tengah pada kelompok bahan makanan. Subkelompok ini mencatatkan penurunan tekanan harga yang signifikan, dari sebelumnya mencatatkan inflasi sebesar 9,72% (yoy) pada triwulan lalu, menurun menjadi inflasi hanya sebesar 7,24% (yoy) pada triwulan IV 2019. Beberapa komoditas utama buah-buahan, seperti pir dan apel mencatatkan penurunan tinggi sepanjang triwulan IV 2019, ditengarai karena pasokan buah impor meningkat.

Komoditas bumbu-bumbuan turut menjadi kontributor atas penurunan inflasi tahunan Jawa Tengah pada kelompok bahan makanan. Tingat inflasi komoditas bumbu-bumbuan pada triwulan laporan tercatat sebesar 28,71% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan III 2019 yang mencapai 30,35% (yoy) sehingga memberikan andil yang cukup besar terhadap penurunan inflasi subkelompok bahan makanan. Pasokan impor hortikultura bawang putih yang sudah mulai masuk pada awal triwulan IV menjadi salah satu faktor tekanan inflasi



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.7 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

subkelompok bumbu-bumbuan lebih tinggi. Sementara itu, pasokan komoditas pangan utama berupa beras mulai meningkat seiring dengan masuknya musim panen pada beberapa daerah penghasil. Perkembangan harga beras yang mencatatkan inflasi sebesar 0,60% (qtq) pada periode Oktober-Desember 2019 mencerminkan penurunan inflasi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 1,03% (qtq).

3.2.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

Pada triwulan IV 2019, indeks harga kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mencatatkan peningkatan inflasi tahunan, yang tercatat sebesar 3,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar 2,84% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi tahunan pada kelompok ini terjadi pada dua sub-kelompok, antara lain: sub-kelompok minuman yang tidak beralkohol dan sub-kelompok tembakau dan minuman beralkohol.

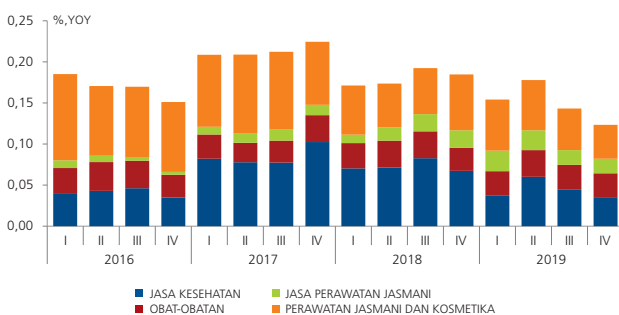
Sub-kelompok tembakau dan minuman beralkohol menjadi kontributor peningkatan inflasi kelompok makanan jadi. Pada triwulan laporan inflasi sub-kelompok ini mencapai 4,27% (yoy), lebih tinggi daripada triwulan III 2019 yang sebesar 2,79% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada sub-kelompok tersebut terutama bersumber dari kenaikan harga pada komoditas rokok kretek, rokok kretek filter, dan rokok putih. Faktor rencana kenaikan cukai rokok oleh pemerintah mendorong pedagang menaikkan harga jual rokok. Sepanjang

Oktober-Desember 2019 tercatat perkembangan harga rokok putih mengalami peningkatan tertinggi dibandingkan dengan komoditas rokok lainnya yang tercermin dari inflasi komoditas tersebut sebesar 3,01% (qtq).

3.2.3. Kelompok Kesehatan

Kelompok kesehatan mencatatkan perlambatan inflasi pada triwulan laporan, dengan mencatatkan inflasi sebesar 2,06% (yoy), atau menurun dari 2,41% (yoy) pada triwulan III 2019 lalu. Perlambatan laju inflasi kelompok kesehatan tersebut didorong oleh perlambatan inflasi pada seluruh subkelompok yaitu jasa kesehatan, obat-obatan, jasa perawatan jasmani, dan perawatan jasmani dan kosmetika. Peningkatan pelayanan kesehatan oleh pemerintah dengan pengalokasian anggaran yang efektif mendorong stabilnya harga-harga yang menunjang kesehatan masyarakat.

Subkelompok jasa kesehatan mencatatkan penurunan laju inflasi tahunan dari sebesar 1,78% (yoy) pada triwulan III 2019, menjadi sebesar 1,41% (yoy) pada triwulan laporan. Perlambatan laju inflasi tahunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan tekanan inflasi pada komoditas dokter spesialis dan dokter umum. Kebijakan pemerintah yang ingin menciptakan sumber daya manusia yang sehat membuat biaya kesehatan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Tidak hanya ketersediaan jenis obat yang lebih terjangkau, namun juga biaya lain seperti tarif dokter dan biaya operasi diberikan perlakuan khusus bagi masyarakat kurang mampu.



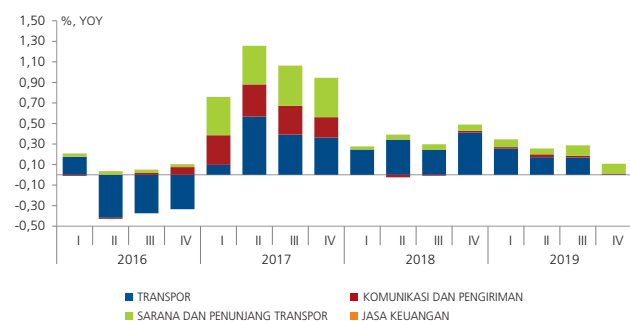
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.8 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Kesehatan

3.2.4. Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Inflasi kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami perlambatan pada triwulan IV 2019. Dengan bobot yang cukup besar terhadap konsumsi masyarakat di Jawa Tengah, perkembangan indeks harga kelompok ini menjadi kontributor utama perlambatan laju inflasi umum tahunan Jawa Tengah pada triwulan laporan. Inflasi harga komoditas dan jasa pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mencatatkan perlambatan dari sebesar 2,02% (yoy) pada triwulan III 2019, menjadi sebesar 0,80% (yoy) pada triwulan IV 2019 ini.

Melambatnya laju inflasi kelompok ini terutama disumbangkan oleh sub-kelompok Transpor. Tarif Jasa angkutan udara dan kereta api menjadi faktor penahan laju inflasi pada sub-kelompok ini, karena kenaikan tarif angkutan udara dan kereta api lebih rendah dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2018. Tercatat pada Desember 2019 inflasi bulanan tarif angkutan udara tercatat sebesar 4,80% (mtm) lebih rendah daripada inflasi bulanan komoditas tersebut pada Desember 2018 yang mencapai 10,08% (mtm). Begitupun dengan inflasi bulanan tarif kereta api pada Desember 2019 yang tercatat sebesar 10,97% (mtm) lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu sebesar 18,30% (mtm). Hal ini mengindikasikan kebijakan penetapan tarif batas atas untuk tarif angkutan oleh pemerintah mulai efektif menahan laju inflasi tarif angkutan di Jawa Tengah. Selain itu, melambatnya laju



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.9 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

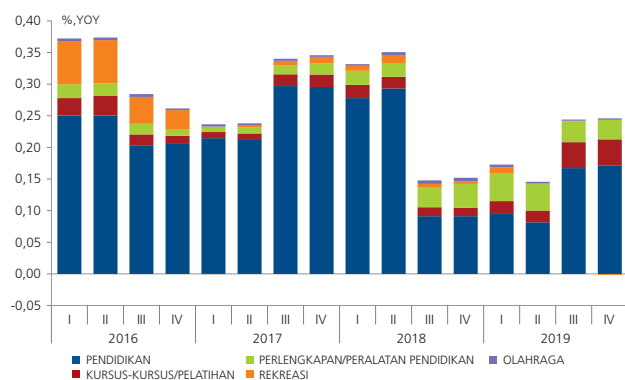
inflasi pada sub-kelompok ini juga didorong oleh efek basis harga (*base effect*) yang lebih tinggi pada tahun 2018 yang lalu pada komoditas bensin dan solar.

3.2.5. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga

Perkembangan indeks harga kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga mencatatkan inflasi yang stagnan pada triwulan IV 2019. Inflasi tahunan kelompok ini pada triwulan laporan tercatat sebesar 2,88% (yoy), angka tersebut tidak berubah dibandingkan dengan triwulan III 2019. Namun demikian, apabila dicermati lebih dalam sub-kelompok pendidikan mengalami inflasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi tahunan pada sub-kelompok Pendidikan pada triwulan laporan sebesar 3,27% (yoy), lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yang hanya tercatat sebesar 3,20% (yoy). Hal ini didorong oleh kenaikan tarif biaya sekolah taman kanak-kanak yang tercermin dari inflasi komoditas tersebut yang meningkat dari 5,13% (yoy) pada triwulan III 2019 menjadi 5,62% (yoy) pada triwulan IV 2019. Sementara sub-kelompok lainnya, antara lain: pelatihan, peralatan pendidikan, rekreasi, dan olahraga mengalami perlambatan inflasi dibandingkan dengan triwulan III tahun 2019.

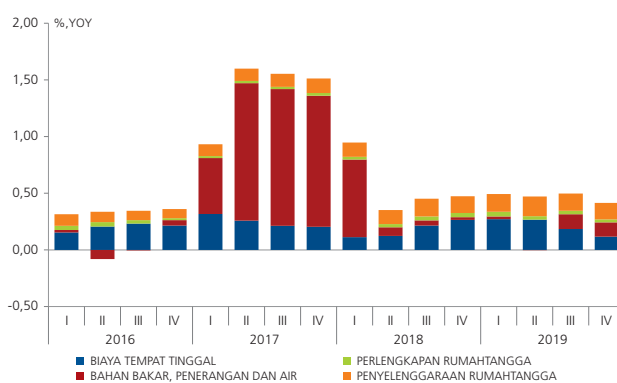
3.2.6. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar juga menjadi salah satu penahan laju inflasi



Grafik 3.10 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah



Grafik 3.11 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

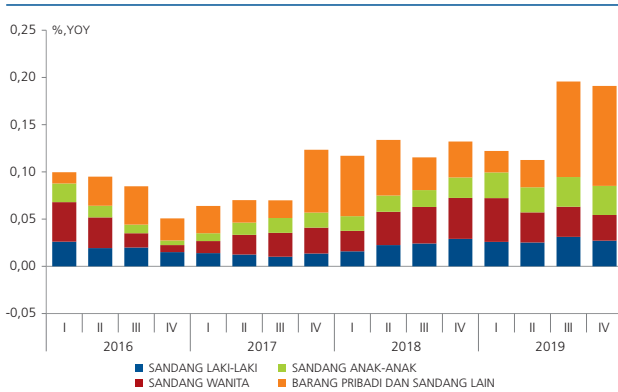
tahunan di Jawa Tengah. Inflasi kelompok tersebut mencatatkan penurunan dari sebesar 2,08% (yoy) pada triwulan II 2019, menjadi sebesar 1,75% (yoy) pada triwulan laporan. Tekanan inflasi pada kelompok ini melambat, terutama disumbangkan sub-kelompok biaya tempat tinggal dan sub-kelompok penyelenggaraan rumah tangga.

Sub-kelompok biaya tempat tinggal mencatatkan perlambatan inflasi dari sebesar 1,43% (yoy) pada triwulan III 2019 lalu, menjadi inflasi sebesar 0,93 (yoy) pada triwulan laporan. Melambatnya inflasi pada subkelompok ini terutama bersumber dari komoditas besi beton yang terhitung deflasi sebesar 8,33% (yoy) pada triwulan IV 2019, atau meneruskan tren deflasi triwulan lalu sebesar 7,64% (yoy). Dalam kurun waktu Oktober-Desember 2019 harga komoditas ini telah mengalami deflasi sebesar 2,91% (qtq).

3.2.7. Kelompok Sandang

Perkembangan inflasi tahunan kelompok sandang pada triwulan IV 2019 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan lalu. Tercatat inflasi kelompok sandang pada triwulan IV 2019 sebesar 3,40% (yoy), melambat dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar 3,59% (yoy). Perlambatan ini bersumber dari sub-kelompok sandang laki-laki dan sandang wanita.

Sub-kelompok sandang wanita memberikan kontribusi paling besar terhadap perlambatan tekanan inflasi kelompok Sandang. Pada triwulan



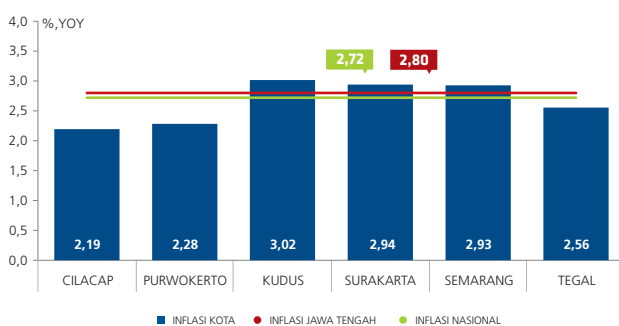
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.12 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Sandang

laporan tercatat inflasi sub-kelompok sandang wanita sebesar 1,93% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2019 sebesar 2,24% (yoy). Sumber penurunan tekanan inflasi tersebut adalah harga komoditas utama pada sub-kelompok ini menurun, diantaranya: kemeja pendek dan gaun/terusan. Penurunan harga kedua komoditas ini ditengarai karena promo akhir tahun yang dilakukan oleh beberapa merchant untuk meningkatkan penjualan dan menghabiskan stok yang ada pada akhir tahun.

3.3. INFLASI KOTA – KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Seluruh kota pantauan inflasi yang disurvei oleh BPS di Jawa Tengah mencatatkan perlambatan inflasi tahunan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan III 2019. Perlambatan inflasi terbesar dicatatkan oleh Kota Purwokerto yang mencatatkan inflasi sebesar 2,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 2,92% (yoy). Selain itu,



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

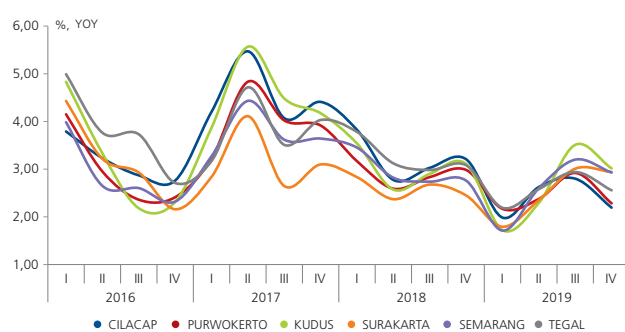
Grafik 3.13 Inflasi Tahunan Triwulan IV 2019 pada Seluruh Kota Pantauan di Jawa Tengah

perlambatan inflasi tahunan terbesar lainnya terjadi pada Kota Cilacap yang mencatatkan perlambatan inflasi dari 2,80% (yoy) pada triwulan III 2019 menjadi 2,19% (yoy) pada triwulan laporan.

Kota Semarang sebagai kota pantauan inflasi dengan pangsa konsumsi terbesar memberikan andil perlambatan inflasi terbesar atau sebesar 0,14% (yoy). Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kota pantauan inflasi lainnya di Jawa Tengah. Kemudian Kota Purwokerto yang mengalami penurunan angka inflasi yang paling tinggi memberikan sumbangsih terbesar kedua terhadap perlambatan inflasi Jawa Tengah, yaitu sebesar 0,05% (yoy). Dengan bobot konsumsi yang besar (hampir 60%) terhadap pembentukan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Tengah, Kota Semarang dan Kota Purwokerto mampu mendorong laju inflasi Jawa Tengah melambat, walaupun masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional.

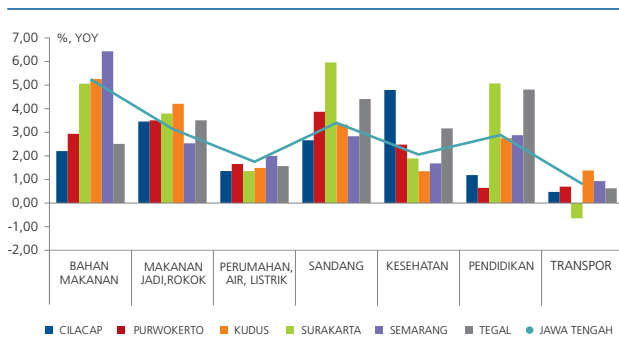
Disparitas inflasi antarkota di Jawa Tengah pada triwulan laporan mengalami peningkatan pada triwulan IV 2019. Pada triwulan III 2019, selisih tingkat inflasi antara kota yang memiliki inflasi tertinggi dan terendah tercatat sebesar 0,71%. Sementara pada triwulan IV 2019, disparitas inflasi antar kota tersebut meningkat menjadi sebesar 0,82%. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kudus sebesar 3,02% (yoy), sedangkan inflasi terendah berada di Kota Cilacap sebesar 2,19% (yoy).

Ditinjau berdasarkan kelompok, kota-kota pantauan inflasi di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.14 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Pantauan di Jawa Tengah



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.15 Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per Kelompok pada Tw IV 2019

inflasi kelompok yang beragam. Namun demikian, sebagian besar kota pantauan inflasi di Jawa Tengah mencatatkan perlambatan inflasi yang signifikan pada kelompok bahan makanan pada triwulan laporan. Pada triwulan IV 2019, kelompok bahan makanan secara rata-rata tercatat mengalami penurunan laju inflasi sebesar 0,90% (yoy) pada seluruh kota pantauan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa pasokan kelompok bahan makanan bagi seluruh kota pantauan berasal dari produksi pertanian dan peternakan domestik yang sebagian besar sudah memasuki masa panen. Perlambatan rata-rata tekanan inflasi pada 6 (enam) kota pantauan inflasi di Jawa Tengah, juga tercatat pada kelompok Transpor, kesehatan, dan sandang.

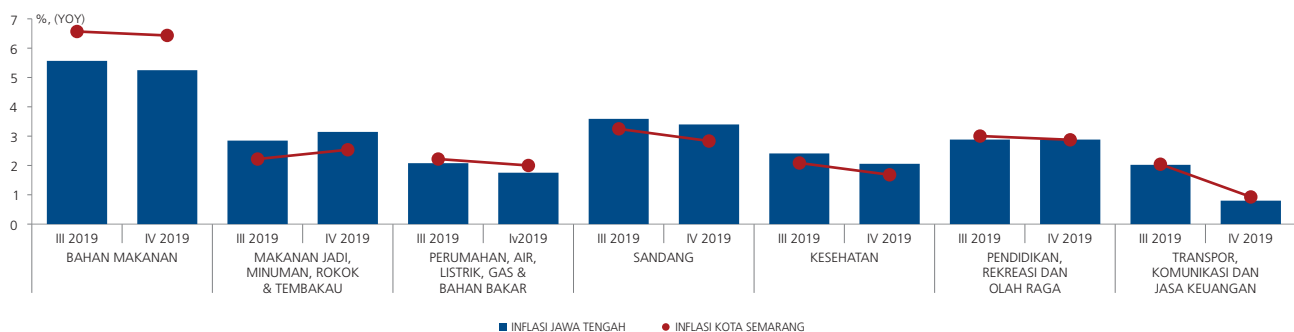
3.3.1. Disagregasi Inflasi Kota Semarang

Kota Semarang mencatatkan perlambatan inflasi tahunan pada triwulan laporan. Inflasi pada kota Semarang pada triwulan IV 2019 tercatat sebesar 2,93% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan III 2019 yang mencapai 3,20% (yoy). Dengan perlambatan inflasi

tahunan tersebut, andil Kota Semarang terhadap penurunan inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah masih menempati posisi tertinggi dibandingkan 5 (lima) kota pantauan inflasi lainnya di Jawa Tengah. Hal ini terutama disebabkan oleh pangsa konsumsi Kota Semarang yang terbesar, mencapai 51,31% terhadap pembentukan inflasi Jawa Tengah.

Sejalan dengan perkembangan indeks harga di 5 (lima) kota pantauan lain di Provinsi Jawa Tengah, kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan menjadi kontributor utama penurunan inflasi tahunan kota Semarang. Inflasi kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan tercatat mengalami penurunan signifikan dari 2,04% (yoy) pada triwulan III 2019, menjadi inflasi sebesar 0,93% (yoy) pada triwulan laporan. Penurunan inflasi tahunan kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan tersebut relatif moderat dibandingkan penurunan inflasi kelompok yang sama di 5 (lima) kota pantauan inflasi lain di Jawa Tengah. Sejalan dengan fenomena yang berlangsung di tingkat provinsi, maupun kawasan Jawa secara keseluruhan, penurunan tekanan inflasi kelompok ini di Kota Semarang terutama disumbang oleh subkelompok transpor. Meredanya tekanan inflasi tahunan subkelompok transpor utamanya disumbangkan oleh komoditas: tarif angkutan udara dan tarif kereta api yang peningkatannya tidak setinggi dengan periode yang sama di tahun lalu.

Secara umum, inflasi tahunan kelompok-kelompok komoditas barang dan jasa di Kota Semarang mengalami penurunan, kecuali kelompok Makanan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.16 Perbandingan Inflasi Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok

Jadi, Minuman, dan Rokok. Pada triwulan laporan tercatat inflasi pada kelompok komoditas barang dan jasa ini meningkat dari 2,22% (yoy) menjadi 2,53% (yoy). Kenaikan tekanan inflasi pada kelompok komoditas ini bersumber dari kenaikan harga seluruh komoditas rokok yang terdiri dari: rokok kretek, rokok kretek filter, dan rokok putih. Hal ini didorong oleh rencana kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 oleh pemerintah direspon dengan menaikkan harga rokok secara gradual oleh pedagang.

3.3.2. Disagregasi Inflasi Kota Surakarta

Selanjutnya, Kota Surakarta juga mencatatkan penurunan inflasi tahunan pada periode triwulan IV 2019 dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2019, inflasi tahunan Kota Surakarta tercatat sebesar 2,94% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,01% (yoy). Kota Surakarta sebagai kota dengan pangsa konsumsi terbesar kedua di Jawa Tengah, mencatatkan perkembangan inflasi yang relatif seragam dengan karakteristik tren inflasi Jawa Tengah secara keseluruhan.

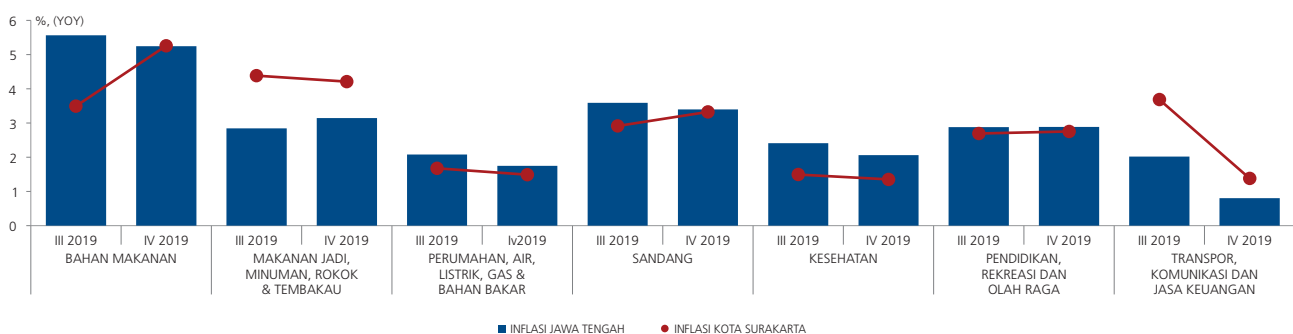
Sejalan dengan perkembangan harga di Kota Semarang, menurunnya tekanan harga kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan juga menjadi kontributor utama penurunan inflasi tahunan di Kota Surakarta. Indeks harga kelompok ini pada triwulan IV 2019 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,38% (yoy), menurun dibanding triwulan lalu yang mencapai 3,68% (yoy). Tren penurunan inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan pada Kota Surakarta merupakan yang tertinggi dibandingkan Kota

Semarang maupun kota pantauan inflasi lainnya khususnya pada subkelompok transpor, dimana kenaikan tarif angkutan udara dan kenaikan tarif tiket kereta api tidak setinggi tahun lalu pada musim liburan akhir tahun. Hal ini tercermin dari inflasi bulanan tarif angkutan udara yang hanya sebesar 8,14% (mtm) pada triwulan IV 2019, lebih rendah daripada inflasi bulanan pada periode yang sama sebesar 36,06% (mtm). Begitupun dengan inflasi bulanan tarif kereta api pada triwulan IV 2019 yang juga tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Inflasi bulanan tarif jasa tersebut tercatat sebesar 4,30% (mtm), sementara pada periode yang sama di tahun lalu mencapai 13,88% (mtm).

Secara umum perkembangan indeks harga kelompok komoditas di Kota Surakarta relatif seragam dengan 5 (lima) kota pantauan lain. Hal yang berbeda terjadi pada kelompok Makanan jadi, minuman, dan tembakau; kelompok sandang; dan kelompok pendidikan yang justru mengalami tren peningkatan inflasi, kontradiktif dengan dengan tren penurunan inflasi di Provinsi Jawa Tengah. Kelompok Sandang dihitung mengalami peningkatan inflasi dari sebesar 2,91% (yoy) pada triwulan lalu, menjadi sebesar 3,32% (yoy) pada triwulan IV 2019. Peningkatan inflasi tahunan tersebut terutama disumbangkan oleh subkelompok sandang laki-laki dan sandang anak-anak.

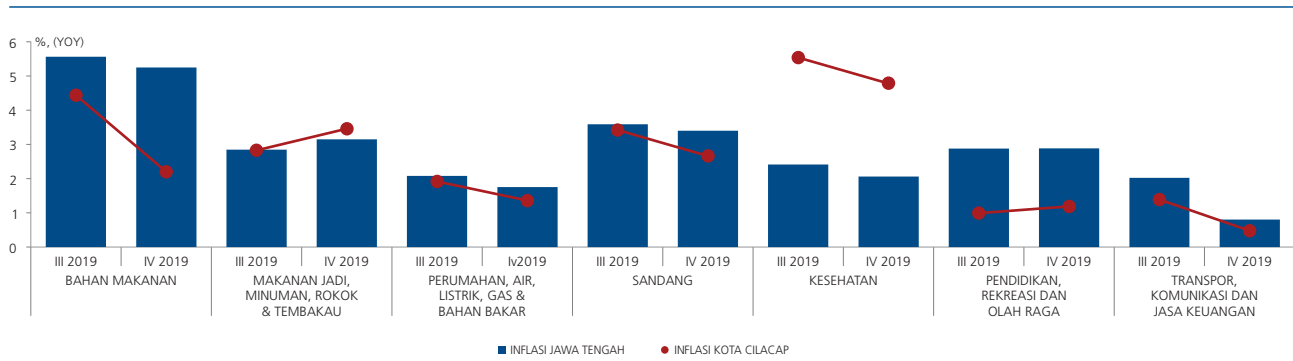
3.3.3. Disagregasi Inflasi Kota Cilacap

Inflasi Kota Cilacap mencatatkan inflasi terendah dibandingkan kota lain yang menjadi kota perhitungan inflasi di Jawa Tengah. Inflasi tahunan



Grafik 3.17 Perbandingan Inflasi Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.18 Perbandingan Inflasi Kota Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok

pada triwulan laporan ini tercatat sebesar 2,19% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2019 yang tercatat sebesar 2,80% (yoy). Sedikit berbeda dengan perkembangan inflasi di Jawa Tengah, penurunan inflasi tahunan Kota Cilacap pada triwulan laporan didorong oleh kelompok bahan makanan yang mencatatkan inflasi sebesar 2,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2019 yang mencatatkan inflasi sebesar 4,44% (yoy). Meredanya tekanan inflasi pada kelompok ini bersumber dari subkelompok bumbu-bumbuan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Hal ini didorong oleh faktor mulai meningkatnya pasokan komoditas pada sub-kelompok tersebut, diantaranya: cabai merah dan cabai rawit.

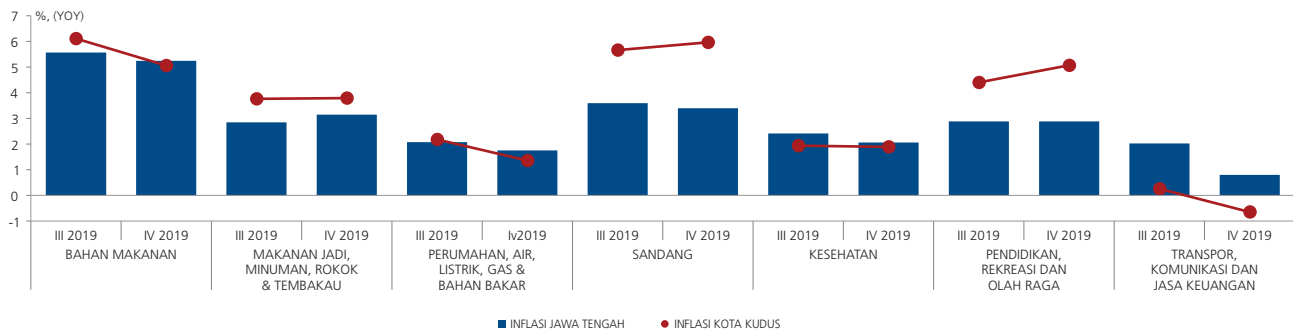
Perkembangan indeks harga kelompok barang dan jasa di Kota Cilacap relatif seragam dengan kota pantauan lain di Jawa Tengah. Kelompok makanan jadi tercatat mengalami tren peningkatan inflasi yang terbesar kedua dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah. Peningkatan tekanan inflasi bersumber dari subkelompok tembakau dan minuman beralkohol. Tercatat seluruh komoditas rokok memberikan andil atas peningkatan subkelompok ini. Pada triwulan laporan inflasi pada subkelompok ini mencapai 4,65% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,45% (yoy).

3.3.4. Disagregasi Inflasi Kota Kudus

Selanjutnya, Kota Kudus terpantau mengalami tekanan inflasi tahunan yang paling tinggi dibandingkan kota pantauan lain di Jawa Tengah.

Pada triwulan IV 2019, inflasi tahunan Kota Kudus tercatat sebesar 3,02% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,51% (yoy). Kota Kudus dengan pangsa konsumsi terbesar ketiga di Jawa Tengah, mencatatkan perkembangan inflasi yang relatif seragam dengan karakteristik tren inflasi Jawa Tengah secara keseluruhan. Kelompok bahan makanan menjadi kontributor utama penurunan tekanan inflasi tahunan di Kota Kudus, khususnya pada subkelompok padi-padian, umbia-umbian, dan hasilnya. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap penurunan subkelompok ini adalah komoditas utama beras. Tercatat inflasi komoditas tersebut turun dari 2,30% (mtm) pada triwulan III 2019 menjadi deflasi sebesar 0,93% (mtm).

Secara umum perkembangan indeks harga kelompok komoditas di Kota Kudus relatif seragam dengan 5 (lima) kota pantauan lain. Namun demikian, pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga mengalami tekanan inflasi yang paling tinggi dibandingkan dengan kota pantauan lainnya. Tercatat inflasi kelompok ini meningkat dari 4,40% (yoy) pada triwulan III 2019 menjadi 5,07% (yoy) pada triwulan laporan. Peningkatan ini bersumber dari tarif jasa bimbingan belajar seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap jasa ini untuk menunjang proses pembelajaran siswa dalam memahami pelajaran di sekolah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.19 Perbandingan Inflasi Kota Kudus dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok

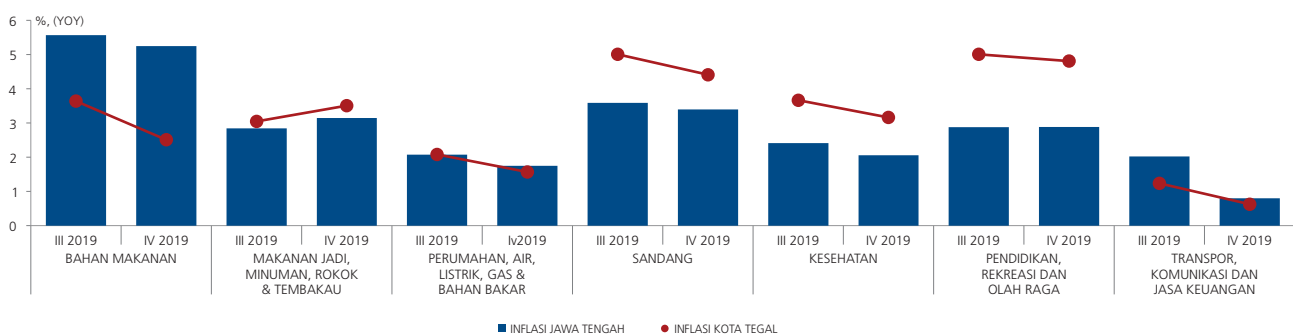
3.3.5. Disagregasi Inflasi Kota Tegal

Kota Tegal mencatatkan penurunan inflasi tahunan terendah ketiga pada triwulan laporan. Pada triwulan laporan inflasi di kota ini tercatat sebesar 2,56% (yoy), menurun dibandingkan realisasi pada triwulan III 2019 yang mencapai 2,94% (yoy). Walaupun mengalami penurunan inflasi tahunan, andil Kota Tegal terhadap penurunan inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah relatif terbatas, karena bobot konsumsinya terendah kedua di Jawa Tengah. Perkembangan indeks harga komoditas mencerminkan kelompok bahan makanan mengalami penurunan tingkat inflasi yang paling tinggi, yaitu menurun dari 3,64% (yoy) pada triwulan III 2019 menjadi 2,51% (yoy) pada triwulan laporan. Meredanya tekanan inflasi pada kelompok ini bersumber dari penurunan inflasi pada sub-kelompok padi-padian, umbi-umbian, dan hasilnya, dimana komoditas utama beras mengalami penurunan inflasi yang cukup signifikan dari 2,50% (yoy) pada triwulan III 2019 menjadi deflasi sebesar 0,91% (yoy) pada triwulan laporan.

Secara umum, inflasi tahunan kelompok-kelompok komoditas barang dan jasa di Kota Tegal menunjukkan perkembangan yang seragam dengan kota pantauan inflasi lain di Jawa Tengah. Namun demikian, pendidikan, rekreasi, dan olah raga, menjadi kelompok yang mengalami penurunan inflasi pada triwulan laporan. Kontradiktif dengan beberapa daerah yang mengalami peningkatan tekanan inflasi. Tingkat inflasi kelompok tersebut menurun dari 5,01% (yoy) pada triwulan III 2019 menjadi 4,81% (yoy) pada triwulan laporan.

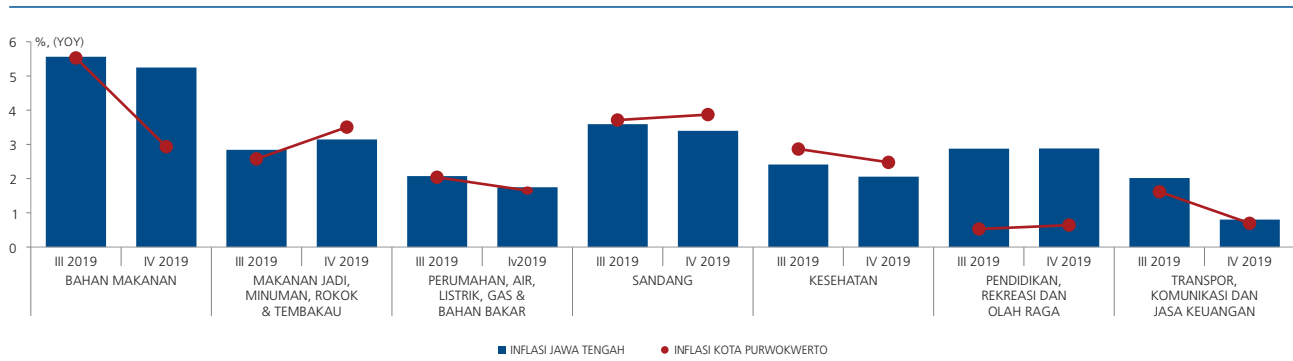
3.3.6. Disagregasi Inflasi Kota Purwokerto

Kota Purwokerto mengalami penurunan inflasi tertinggi pada triwulan laporan. Inflasi tahunan pada triwulan laporan ini tercatat sebesar 2,28% (yoy), menurun signifikan dibandingkan triwulan III 2019 yang tercatat sebesar 2,92% (yoy). Sejalan dengan kota lain di Jawa Tengah, meredanya tekanan inflasi didorong oleh



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.20 Perbandingan Inflasi Kota Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.21 Perbandingan Inflasi Kota Purwokerto dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok

penurunan laju inflasi kelompok bahan makanan. Inflasi tahunan kelompok bahan makanan di Kota Purwokerto pada triwulan laporan tercatat sebesar 2,94% (yoy), menurun dibandingkan triwulan III 2019 yang mencatatkan inflasi 5,52% (yoy). Selain beras, komoditas yang menjadi sumber penurunan harga bahan pangan yaitu cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras.

Berbanding terbalik dengan sebagian besar kota lain di Jawa Tengah, inflasi kelompok Sandang di Purwokerto mengalami penurunan. Kelompok tersebut mengalami inflasi sebesar 3,87% (yoy) pada triwulan IV 2019, lebih tinggi dibanding 3,71% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan tekanan inflasi ini bersumber dari sub-kelompok sandang laki-laki dan sandang wanita.

3.4. TRACKING DAN PROYEKSI INFLASI

3.4.1. Inflasi Januari 2020

Pada Januari 2020 Provinsi Jawa Tengah mencatatkan inflasi sebesar 0,09% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,45% (mtm). Inflasi yang terjadi pada Januari tahun ini lebih rendah dibanding dengan rerata historis lima tahun terakhir yang sebesar 0,49% (mtm). Dengan perkembangan ini, inflasi Jawa Tengah terhitung sebesar 2,81% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,68% (yoy).

Penurunan laju inflasi terutama disumbangkan oleh deflasi yang terjadi pada kelompok Pendidikan dan Transportasi. Deflasi yang terjadi pada kelompok

Pendidikan disebabkan kebijakan baru Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, normalisasi tarif di awal tahun mendorong penurunan laju inflasi pada kelompok transportasi. Di sisi lain, penurunan harga pada kedua kelompok tersebut tidak diikuti oleh kelompok dengan nilai konsumsi terbesar di Jawa Tengah yaitu Makanan, Minuman, dan Tembakau (Pangan). Keterbatasan pasokan menjadi pendorong utama peningkatan inflasi di tengah curah hujan yang meningkat di awal tahun 2020.

Kelompok Pendidikan menjadi pendorong utama penurunan laju inflasi pada Januari 2020. Pada periode ini, inflasi kelompok Pendidikan terpantau sebesar -3,78% (mtm), lebih rendah dibandingkan Desember 2019 yang mencatatkan inflasi sebesar 0,06% (mtm). Deflasi yang terjadi didorong oleh penurunan harga pada komoditas Sekolah Menengah Atas. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam membebaskan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi pelajar SMA/SMK negeri yang berlaku sejak Januari 2020. Kebijakan tersebut membuat SMA mengalami deflasi 19,43% (mtm) dan menyumbang -0,23% terhadap inflasi bulanan Jawa Tengah.

Penurunan harga juga terjadi pada kelompok Transportasi yang mencatatkan inflasi pada Januari 2020 sebesar -1,12% (mtm) atau lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 1,08% (mtm). Penurunan harga tidak hanya terjadi pada subkelompok Jasa Angkutan Penumpang, akan tetapi juga terjadi pada subkelompok Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi. Pada subkelompok Jasa Angkutan

Penumpang yang mengalami deflasi sebesar 4,86% (mtm), penurunan harga terjadi pada beberapa tarif angkutan yaitu tarif kereta api (-8,89%, mtm), tarif angkutan udara (-4,71%, mtm), tarif kendaraan roda empat online (-12,24%, mtm), tarif taksi (-5,98%, mtm), dan angkutan antar kota (-4,71%, mtm). Normalisasi permintaan menjadi penyebab utama penyedia jasa angkutan untuk menurunkan harga ke harga sebelum masa liburan akhir tahun. Dari subkelompok Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi, penurunan harga terjadi pada komoditas bensin dan solar. Penurunan harga pada kedua komoditas tersebut disebabkan penyesuaian harga pada bahan bakar nonsubsidi.

Di sisi lain, subkelompok Pembelian Kendaraan mengalami peningkatan inflasi. Pada bulan laporan, subkelompok tersebut mengalami inflasi sebesar 1,28% (mtm), atau meningkat dibanding bulan sebelumnya yang hanya 0,03% (mtm). Kenaikan harga jual pada komoditas mobil tersebut disebabkan kenaikan Bea Balik Nama (BBN) yang mulai diberlakukan sejak Januari 2020. Penyesuaian tarif untuk meningkatkan pendapatan negara tersebut menahan laju deflasi kelompok Transportasi di Jawa Tengah karena memberikan andil sebesar 0,05% terhadap inflasi total bulanan.

Kondisi inflasi yang terjadi pada Januari 2020 di tengah deflasi dua kelompok besar, didorong peningkatan laju inflasi pada kelompok Bahan Pangan. Kelompok konsumsi utama rumah tangga di Jawa Tengah tersebut mengalami inflasi sebesar 1,64% (mtm), lebih tinggi dibanding bulan Desember 2019 yang sebesar 1,32% (mtm). Inflasi terjadi pada seluruh subkelompok dengan inflasi terbesar terjadi pada subkelompok Makanan sebesar 1,72% (mtm) sehingga memberikan sumbangan terhadap inflasi bulanan Jawa Tengah sebesar 0,34%. Sementara subkelompok Tembakau (1,56%, mtm) dan Minuman (1,00%, mtm), relatif tidak memberikan sumbangan yang besar mengingat pangsa konsumsi yang tidak sebesar Makanan.

Sejumlah komoditas sub-kelompok Makanan mengalami kenaikan harga di awal tahun 2020, di antaranya cabai merah, minyak goreng, cabai rawit, bawang putih, dan beras. Komoditas bumbu-bumbuan memang mengalami keterbatasan produksi sejak kemarau panjang yang melanda pada 2019. Proses penanaman dengan curah hujan yang minim membuat panen pada Januari 2020 tidak seoptimal tahun-tahun sebelumnya. Belum lagi curah hujan tinggi menyebabkan hasil produksi lebih cepat membusuk. Hal ini juga terjadi pada komoditas beras. Dengan keterbatasan pasokan, harga beras naik karena menjadi konsumsi utama pangan masyarakat. Sementara itu, kenaikan harga yang terjadi pada minyak goreng lebih disebabkan pelarangan penjualan minyak goreng curah. Pada Januari 2020, seluruh komoditas minyak goreng diwajibkan untuk menggunakan kemasan yang semakin menambah biaya produksi.

Kenaikan cukai rokok yang telah berlaku di awal 2020 mendorong kenaikan pada seluruh komoditas subkelompok Tembakau. Rokok kretek filter mengalami kenaikan 1,24% (mtm), rokok kretek meningkat 1,19% (mtm), dan rokok putih mengalami inflasi 3,31% (mtm). Namun, dengan pangsa yang relatif kecil, ketiga komoditas tersebut memberikan sumbangan yang lebih kecil dari subkelompok Makanan yaitu sebesar 0,04%.

3.4.2. Inflasi Februari 2020

Pada Februari 2020, inflasi bulanan Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Provinsi Jawa Tengah mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,44% (mtm), angka tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Dengan realisasi tersebut secara tahunan inflasi Jawa Tengah tercatat 3,55% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,98% (yoy).

Inflasi bersumber dari kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau. Tercatat realisasi inflasi kelompok ini sebesar 1,53% (mtm) atau

memberikan andil terhadap inflasi bulanan sebesar 0,38% (mtm). Sumbangan inflasi terbesar berasal dari sub-kelompok makanan, yaitu komoditas bawang putih dan cabai merah. Inflasi bawang putih tercatat sebesar 35,35% (mtm) meningkat signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 11,70% (mtm). Peningkatan harga bawang putih yang signifikan didorong oleh spekulasi yang dilakukan oleh pedagang besar seiring dengan isu pembatasan impor bawang putih pasca merebaknya virus COVID-19 di Tiongkok sebagai eksportir utama bawang putih ke Indonesia. Sementara, kenaikan harga cabai merah didorong oleh berkurangnya pasokan karena gagal panen yang terjadi di beberapa daerah sentra penghasil akibat tanaman cabai yang terkena penyakit.

Sementara itu, komoditas yang menahan laju inflasi Jawa Tengah pada bulan Februari adalah harga komoditas bensin dan cabai rawit. Pada bulan Februari 2020 tercatat harga bensin mengalami deflasi sebesar 0,96% (mtm) dan harga cabai rawit mengalami deflasi sebesar 5,62% (mtm). Penurunan harga bensin ini seiring dengan penyesuaian kembali harga produk pertamax series oleh Pertamina efektif per Februari 2020.

3.4.3. Proyeksi Inflasi Provinsi Jawa Tengah Triwulan I 2020

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan I 2020 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2019. Peningkatan inflasi tahunan Jawa Tengah diperkirakan akan disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Risiko peningkatan laju inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau diperkirakan cukup tinggi. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan laju inflasi adalah dampak penyesuaian cukai rokok sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, kenaikan cukai rokok

sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2020. Dengan kenaikan tersebut, harga jual eceran yang beredar di konsumen otomatis juga akan mengalami kenaikan. Mengingat konsumsi yang relatif tinggi di Jawa Tengah, komoditas rokok kretek dan rokok kretek filter menjadi komoditas yang diperkirakan mengalami peningkatan tertinggi. Selain itu faktor cuaca dengan intensitas hujan yang sangat tinggi juga telah membuat beberapa lahan tanaman bawang merah di sentra produksi mengalami gagal panen serta berpotensi mengurangi pasokan. Sejalan dengan itu, pasokan cabai merah juga diperkirakan akan mengalami penurunan seiring dengan penyakit yang menyerang tanaman cabai merah saat musim hujan dengan intensitas tinggi.

Peningkatan risiko tekanan inflasi juga terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Komoditas yang diperkirakan menjadi sumber peningkatan inflasi adalah emas perhiasan seiring dengan terus meningkatnya harga emas global karena ketidakpastian yang terjadi di pasar keuangan mendorong investor mengalihkan asetnya kepada aset *safe heaven*, seperti emas.

Sementara itu, pergerakan indeks harga konsumen pada kelompok perumahan, air, listrik, dan gas diperkirakan masih relatif stabil. Hal ini sejalan dengan penundaan kenaikan tarif listrik 900 VA oleh pemerintah dan pengurangan subsidi energi terhadap LPG 3Kg yang masih akan dikaji kembali mekanismenya oleh Kementerian terkait.

3.5. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

1. Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pangan strategis, TPID Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pada Oktober tahun 2019, yaitu:

- **Rapat Pembahasan Pengembangan dan Sinkronisasi Kartu Tani, RMC, dan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA)**

- Dishanpan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun design SISLOGDA yang memiliki fungsi mengurangi rantai distribusi pangan dan fungsi melakukan stabilisasi harga pangan.
 - SISLOGDA adalah sinergi antar instansi dan para pelaku di rantai nilai pangan dari hulu hingga hilir untuk mempertemukan *supply* (pasokan) dan *demand* (kebutuhan konsumen) pangan dengan cara memotong rantai distribusi, manajemen stok, dan intervensi pasar sebagai upaya stabilisasi harga di tingkat produsen maupun konsumen, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperoleh data stok yang riil.
 - Sistem tersebut telah disinkronisasikan dengan skema *Rice Market Center* (RMC) yang memiliki fungsi serta alur yang serupa.
 - Ke depan, TPID akan menggunakan skema SISLOGDA dalam pengendalian inflasi dengan cara mensejahterakan produsen pangan, memotong rantai distribusi, menstabilkan pasokan pangan, dan mengakomodir pencatatan data produksi serta stok pangan.
- **HLM TPID Jawa Tengah pada tanggal 16 Oktober 2019**
 - TPID Jawa Tengah telah mengembangkan RMC dan melakukan sinkronisasi dengan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA). Sislogda dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan harga komoditas pangan dari pra tanam hingga pasca panen. Skema yang komprehensif tersebut diharapkan dapat memberikan akses kepada pemerintah untuk memperoleh informasi dan pengendalian stok pangan, mengatur dan merencanakan pola tanam petani, serta melakukan intervensi sehingga tercipta stabilisasi harga.
 - Implementasi Sislogda diharapkan mampu memberikan kekuatan bagi produsen di Jawa Tengah untuk ikut dalam penentuan harga komoditas dan memberikan ruang bagi
 - pemerintah (dalam hal ini TPID) untuk menerapkan kebijakan pengendalian harga. Namun demikian, Sislogda memiliki titik kritis yaitu pada penentuan lembaga atau perusahaan yang akan ditunjuk sebagai operator mengingat operator merupakan motor utama Sislogda.
 - Usulan sistem logistik daerah nantinya akan menggabungkan gapoktan, BUMD dan kanal penjualan *online* maupun *offline* sehingga rantai distribusi dapat diperpendek dan biaya lebih efisien. Sistem tersebut akan dikendalikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan memiliki *dashboard early warning system* yang dapat dijadikan dasar bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan pangan.
- **Kunjungan Studi TPID Provinsi Jawa Tengah ke TPID Provinsi Kalimantan Timur**
 - Pada tanggal 16-17 Oktober 2019, TPID Jateng berkunjung ke TPID Kaltim untuk mendapatkan *insight* terkait pengendalian inflasi provinsi Kalimantan Timur.
 - Sebagai informasi, TPID Kaltim, TPID Kota Samarinda, dan TPID Kab. Mahakam Hulu mendapatkan gelar TPID Terbaik tahun 2018.
 - Setelah mengunjungi Kalimantan Timur, didapatkan bahwa keaktifan pemerintah dalam pengendalian inflasi sangat penting. Hal ini tercermin pada dukungan pemerintah dalam mengoptimalkan BUMD dalam stabilisasi harga.
 - BUMD telah berhasil menstabilkan harga daging ayam ras saat idul fitri dan mengendalikan harga bawang putih.
 - **Kunjungan Studi TPID Provinsi Kalimantan Selatan Mengenai Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) dan Penggunaan Ozon tanggal 29 Oktober 2019.**
 - TPID Jateng mendampingi TPID Kalsel ke Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT. Pengayom Tani Sejadad untuk melihat operasional PT PTS yang telah berhasil menerapkan SRG.

- Setelah itu TPID Kalsel mengunjungi kelompok tani Aspakusa Makmur yang telah menerapkan teknologi ozon pada tanaman hortikultura.
- Teknologi ozon menggunakan teknologi plasma ramah lingkungan berfungsi untuk memperpanjang masa simpan sayur dan buah menjadi lebih tahan lama, meminimalisir pertumbuhan bakteri, virus dan jamur penyebab pembusukan pada sayur maupun buah, serta mengurangi pestisida yang menempel pada sayur dan buah sehingga sayur dan buah hasil produksi menjadi lebih sehat.
- Penggunaan mesin ozon pada daerah penghasil hortikultura dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan dan menunda jual pada saat produksi melimpah/harga jatuh.
- Biaya mesin ozon ini relatif lebih murah dibanding mesin penyimpanan lain dan cocok untuk diterapkan pada komoditas yang terkenal sering muncul sebagai pemicu inflasi karena sifatnya yang cepat busuk (tidak dapat disimpan lama) seperti cabai dan bawang merah.

2. Kegiatan TPID Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada November tahun 2019, yaitu:

- **Rapat Koordinasi TPID dengan Kabupaten/Kota (Kota Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wonosobo.**
 - Sinergi dengan TPID Kabupaten/Kota secara rutin dilakukan untuk monitoring pengendalian inflasi tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah.
 - Rakor tersebut membahas mengenai pengembangan kelembagaan petani di wilayah masing-masing agar produktivitas komoditas pangan dapat ditingkatkan serta pola tanam mulai dapat diimplementasikan.

- Selain itu, TPID Provinsi Jawa Tengah juga memonitor dan mengevaluasi keaktifan TPID Kab/Kota dalam Sihati untuk memasok data harga komoditas pangan pada beberapa pasar yang terdapat dalam wilayahnya.
- Ke depan, TPID Kabupaten/kota akan diberikan sistem berbasis web agar dapat secara langsung melakukan upload data tanpa harus mengirimkan file secara manual.

- **Kunjungan Studi TPID Provinsi Sumatera Selatan Mengenai Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) dan Penggunaan Ozon tanggal 13-14 November 2019.**

- TPID Jateng mendampingi TPID Sumsel ke pusat budidaya pupuk MA-11 yang diproduksi dari tanaman Alfaafa.
- Setelah itu TPID Kalsel mengunjungi kelompok tani Aspakusa Makmur yang telah menerapkan teknologi ozon pada tanaman hortikultura.
- Teknologi ozon menggunakan teknologi plasma ramah lingkungan berfungsi untuk memperpanjang masa simpan sayur dan buah menjadi lebih tahan lama, meminimalisir pertumbuhan bakteri, virus dan jamur penyebab pembusukan pada sayur maupun buah, serta mengurangi pestisida yang menempel pada sayur dan buah sehingga sayur dan buah hasil produksi menjadi lebih sehat.
- Penggunaan mesin ozon pada daerah penghasil hortikultura dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan dan menunda jual pada saat produksi melimpah/harga jatuh.
- Biaya mesin ozon ini relatif lebih murah dibanding mesin penyimpanan lain dan cocok untuk diterapkan pada komoditas yang terkenal sering muncul sebagai pemicu inflasi karena sifatnya yang cepat busuk (tidak dapat disimpan lama) seperti cabai dan bawang merah.

3. Dalam rangka menjaga inflasi dalam kisaran target, TPID Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pada Desember tahun 2019, yaitu:

• **HLM bersama Gubernur Jawa Tengah terkait SISLOGDA.**

- Dishanpan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun design Sislogda yang memiliki fungsi mengurangi rantai distribusi pangan dan fungsi melakukan stabilisasi harga pangan.
- SISLOGDA adalah sinergi antar instansi dan para pelaku di rantai nilai pangan dari hulu hingga hilir untuk mempertemukan *supply* (pasokan) dan *demand* (kebutuhan konsumen) pangan dengan cara memotong rantai distribusi, manajemen stok, dan intervensi pasar sebagai upaya stabilisasi harga di tingkat produsen maupun konsumen, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperoleh data stok yang riil.
- Gubernur Jawa Tengah menginginkan agar implementasi SISLOGDA dilakukan pada enam Kab/Kota produsen pangan.
- Ke depan, implementasi SISLOGDA pada komoditas beras ini direncanakan akan memenuhi 5% dari produksi beras Jawa Tengah pada 2023.

• **Rapat Koordinasi TPID Membahas Persiapan Menghadapi HBKN**

- 1) Sinergi dengan anggota TPID Jawa Tengah secara rutin dilakukan untuk monitoring pengendalian inflasi tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- 2) Rakor tersebut membahas mengenai ketersediaan pangan strategis menghadapi Natal dan Tahun Baru.
- 3) Selain itu, TPID Provinsi Jawa Tengah juga mengidentifikasi kendala-kendala di lapangan terkait produksi pangan strategis dan solusi dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut.

• **Sidak Pasar Karang Ayu tanggal 23 Desember 2019**

• Sebagai upaya pemantauan harga dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat menjelang perayaan Natal dan tahun baru, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah melakukan sidak pasar yang berlokasi di Pasar Karang Ayu pada Senin pagi (23/12/2019). Sidak pasar dipimpin langsung oleh Gubernur Jateng dan dihadiri oleh Ka. KPw BI Jateng beserta beberapa pimpinan OPD Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang. Hasil pemantauan tersebut menyatakan bahwa harga beberapa kepokmas masih cukup stabil namun bawang merah dan telur ayam ras diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan. TPID Jateng memprediksikan bahwa capaian inflasi bulan Desember masih relatif stabil dan terjaga.

• **Kunjungan Studi TPID Provinsi Jawa Barat Mengenai Success Story TPID Terbaik dan Penggunaan Ozon tanggal 5-6 Desember 2019.**

- 1) TPID Jawa Tengah memberikan penjelasan mengenai *success story* Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan gelar TPID terbaik.
- 2) Teknologi ozon menggunakan teknologi plasma ramah lingkungan berfungsi untuk memperpanjang masa simpan sayur dan buah menjadi lebih tahan lama, meminimalisir pertumbuhan bakteri, virus dan jamur penyebab pembusukan pada sayur maupun buah, serta mengurangi pestisida yang menempel pada sayur dan buah sehingga sayur dan buah hasil produksi menjadi lebih sehat.
- 3) Penggunaan mesin ozon pada daerah penghasil hortikultura dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan dan menunda jual pada saat produksi melimpah/harga jatuh.

Biaya mesin ozon ini relatif lebih murah dibanding mesin penyimpanan lain dan cocok untuk diterapkan pada komoditas yang terkenal sering muncul sebagai pemicu inflasi karena sifatnya yang cepat busuk (tidak dapat disimpan lama) seperti cabai dan bawang merah.



STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN, DAN UMKM

Stabilitas sistem keuangan di Jawa Tengah masih relatif terjaga, walaupun kinerja intermediasi perbankan di Jawa Tengah mengalami penurunan sejalan dengan kinerja perekonomian yang tumbuh melambat.

- Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan bersumber dari pelemahan kinerja penjualan industri pengolahan serta lapangan usaha perdagangan besar & eceran. Namun demikian, kinerja lapangan usaha utama lainnya yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat mengalami perbaikan setelah kontraksi pada triwulan sebelumnya.
- Rumah Tangga (RT) memegang peranan besar terhadap perekonomian (pangsa 60% terhadap PDRB) dan sistem keuangan (pangsa 30% terhadap kredit konsumsi) Jawa Tengah. Pada triwulan laporan, penyaluran kredit RT masih bertumbuh dan mayoritas digunakan untuk membiayai multiguna, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB), dengan kualitas kredit yang masih terjaga.



4.1. PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN JAWA TENGAH

Stabilitas sistem keuangan Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 tetap terjaga, walaupun beberapa indikator mengalami penurunan kinerja intermediasi. Pertumbuhan penyaluran kredit di sektor utama perekonomian Jateng tercatat melambat. Penyaluran kredit pada Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi masih terus bertumbuh walaupun secara keseluruhan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Walaupun mengalami peningkatan, kualitas kredit perbankan terhadap lapangan usaha utama di Jawa Tengah relatif terjaga. Selanjutnya, indikator kinerja korporasi seperti profitabilitas, likuiditas, dan struktur pembiayaan terpantau masih sehat.

Kontribusi permintaan RT yang meningkat pada triwulan laporan turut mendorong kredit RT bertumbuh, meski tidak setinggi triwulan sebelumnya. Dari total kredit konsumsi yang disalurkan oleh perbankan, sebesar 29,60% disalurkan kepada RT untuk pembiayaan KPR, multiguna, dan KKB, dengan risiko masing-masing kredit masih terjaga di bawah batas yang dipersyaratkan oleh otoritas.

4.1.1. Ketahanan Lapangan Usaha Jawa Tengah Triwulan IV 2019

4.1.1.1. Perkembangan Indikator Perbankan pada Lapangan Usaha Utama Jawa Tengah Triwulan IV 2019

Perlambatan kinerja perekonomian Jawa Tengah pada triwulan IV 2019, juga tercermin pada penurunan laju realisasi kredit perbankan di Jawa Tengah³. Penyaluran kredit di Jawa Tengah mencapai Rp 355,56 triliun, atau tumbuh sebesar 6,41% (yoy). Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang terhitung sebesar 9,68% (yoy). Penyalurannya kredit non konsumsi masih didominasi ke lapangan usaha (LU) utama Jawa Tengah, yaitu LU perdagangan besar dan eceran (pangsa 27,84%), diikuti oleh LU industri pengolahan (pangsa 22,38%), LU konstruksi (pangsa 6,13%); serta LU pertanian, perburuan, kehutanan, dan perikanan (pangsa 3,45%).

Penurunan kinerja perekonomian Jawa Tengah pada triwulan laporan juga tercermin pada meningkatnya rasio kredit berisiko macet yang disalurkan oleh perbankan. Kualitas kredit yang disalurkan pada lapangan usaha utama Jawa Tengah, menunjukkan perkembangan yang beragam. Kualitas kredit yang disalurkan pada LU industri pengolahan memburuk, tercermin dari rasio *non-performing loan* (NPL) yang meningkat. Sementara, LU pertanian, perburuan, kehutanan, dan perikanan, serta LU perdagangan besar dan eceran menunjukkan perbaikan kualitas kredit.

Lapangan usaha industri pengolahan mengalami perlambatan pada triwulan IV 2019, sehingga berdampak pada volume dan kualitas kredit yang disalurkan oleh perbankan. Pertumbuhan realisasi kredit perbankan terhadap industri pengolahan di Jawa Tengah tercatat menurun dari sebesar 7,12% (yoy) pada triwulan III 2019, menjadi sebesar 2,78% (yoy) pada triwulan laporan. Perlambatan realisasi kredit ini terutama berlangsung pada kredit modal kerja yang tercatat tumbuh hanya sebesar 0,73% (yoy) pada triwulan IV 2019; menurun dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar 7,12% (yoy). Sementara itu, kredit investasi masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 11,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2019 yang tercatat tumbuh sebesar 6,97% (yoy). Perlambatan realisasi kredit modal kerja ini diperkirakan sebagai dampak ketegangan hubungan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, yang selanjutnya mengakibatkan permintaan ekspor tidak setinggi perkiraan para pelaku industri pengolahan di Jawa Tengah.

Kualitas kredit yang disalurkan pada industri pengolahan juga mengalami peningkatan risiko, tercermin dari rasio NPL yang meningkat dari sebesar 4,76% pada triwulan III 2019, menjadi sebesar 11,67% pada triwulan laporan ini. Sejalan dengan kinerja realisasi kreditnya, rasio NPL pada kredit yang disalurkan oleh LU industri pengolahan terutama berlangsung kredit modal kerja, yang

3. Indikator kinerja perbankan ditinjau berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Jawa Tengah.

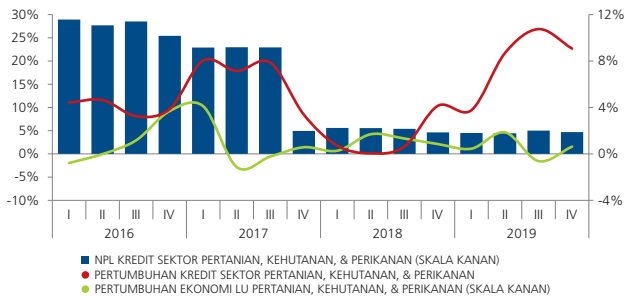
mencatatkan rasio NPL sebesar 10,94% pada triwulan IV 2019, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,15%.

Berikutnya, perlambatan kinerja LU perdagangan besar dan eceran juga diikuti oleh penurunan realisasi kredit pada sektor tersebut. Penyaluran kredit ke lapangan usaha perdagangan besar dan eceran di Jateng tumbuh 6,08% (yoy) pada triwulan laporan, melambat dibandingkan dengan triwulan lalu yang mencapai 8,76% (yoy). Namun demikian kualitas kredit pada LU ini terus melanjutkan tren perbaikannya, dengan mencatatkan rasio NPL sebesar 3,54% pada triwulan laporan, atau menurun dibandingkan triwulan III 2019 yang tercatat sebesar 4,05%. Pulihnya kualitas kredit LU perdagangan besar dan eceran di Jateng, terutama disumbangkan oleh komponen kredit modal kerja yang mencatatkan rasio NPL cukup baik sebesar 3,66%; atau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 4,21%.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan kredit di sektor konstruksi juga mengalami penurunan yang signifikan

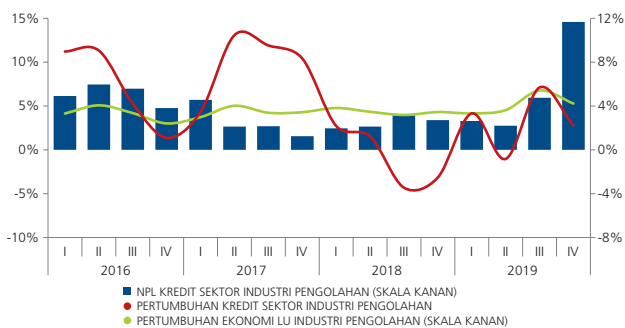
dibandingkan dengan triwulan lalu. Laju realisasi kredit pada LU konstruksi di Jawa Tengah tercatat tumbuh 10,05% (yoy) pada triwulan IV 2019, menurun signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 64,33% (yoy). Normalisasi laju pertumbuhan kredit tersebut sejalan dengan berakhirnya sebagian besar masa konstruksi proyek-proyek strategis Pemerintah pada tahun 2019 ini, khususnya pada infrastruktur konektivitas. Namun demikian, kualitas kredit pada sektor ini masih terjaga baik, dengan rasio mana pada triwulan laporan tercatat rasio NPL hanya berada di angka 1,86% pada triwulan IV 2019, relatif stabil dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar 1,59%.

Sementara itu kredit lapangan usaha pertanian, perburuan, perikanan dan kehutanan masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi walaupun lebih rendah dibandingkan triwulan lalu. Pada triwulan IV 2019, kredit pada sektor ini tumbuh sebesar 22,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan lalu yang dihitung sebesar 26,88% (yoy). Perlambatan penyaluran kredit pada LU pertanian, perburuan,



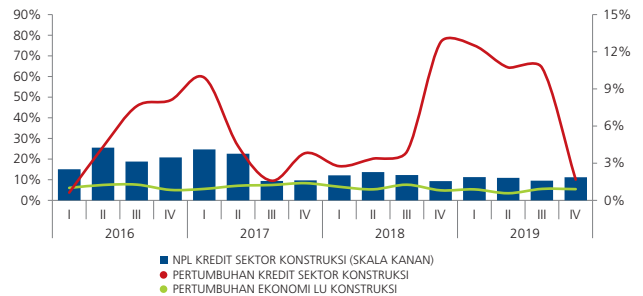
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Pertanian



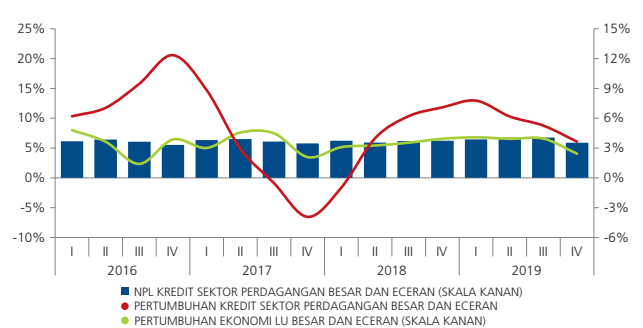
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Industri Pengolahan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Konstruksi



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

perikanan dan kehutanan terutama berlangsung pada kredit modal kerja, yang mengindikasikan berkurangnya rasio utilisasi lahan oleh pelaku pertanian sebagai akibat musim kemarau yang berlangsung pada paruh kedua tahun 2019.

4.1.2. Ketahanan Sektor Korporasi Jawa Tengah Pada Triwulan IV 2019⁴

Meningkatnya permintaan domestik, khususnya untuk memenuhi permintaan dalam rangka hari Ramadhan dan Idulfitri, menjadi salah satu pendorong kinerja korporasi pada triwulan laporan. Indikator Purchasing Managers Index (PMI) dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia juga mengindikasikan kapasitas usaha sektor industri pengolahan pada triwulan III 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 58,51%; dari realisasi PMI triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 49,93%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pulihnya volume produksi, volume total pesanan, dan volume persediaan barang jadi.

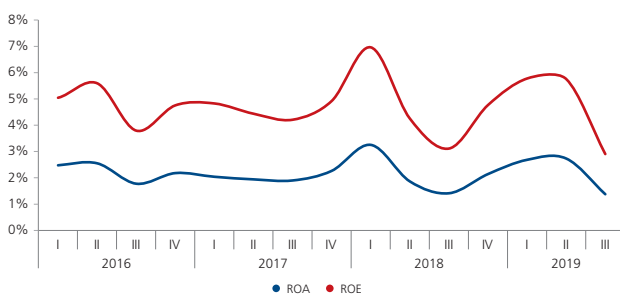
Sementara itu, masih berlanjutnya ketegangan ekonomi global akibat dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kinerja sektor korporasi, khususnya dalam kegiatan ekspor-impor. Permintaan ekspor luar negeri yang melambat seiring dengan lesunya volume perdagangan dunia, serta semakin tingginya persaingan khususnya dengan kompetitor di regional Asia Tenggara, menjadi salah satu tantangan untuk meningkatkan kinerja korporasi. Hal ini sejalan dengan penurunan kinerja ekspor

barang nonmigas terhadap perekonomian Jawa Tengah pada triwulan laporan.

Kedua hal tersebut di atas berdampak pada kinerja penjualan dan profitabilitas yang relatif menurun, tercermin dari nilai Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). ROA korporasi tercatat 1,38% dari 2,73% pada triwulan lalu; sementara ROE tercatat 2,91% dari 5,76% pada triwulan lalu.

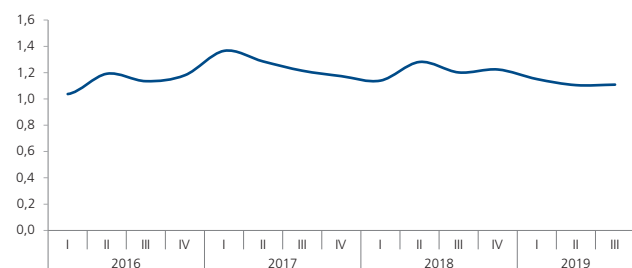
Ke depan, tantangan dalam peningkatan kinerja korporasi adalah pergerakan harga komoditas bahan baku untuk industri dengan konten impor tinggi seperti tekstil dan produk tekstil dan barang kayu. Hasil *liaison* Bank Indonesia menunjukkan bahwa daya saing industri dipengaruhi berbagai faktor, seperti teknologi pesaing yang lebih inovatif dan efisien, kesulitan mencari tenaga kerja yang memiliki *skill* yang sesuai, hingga faktor regulasi.

Selain itu, indikator yang perlu diperhatikan di korporasi adalah struktur pembiayaan korporasi (termasuk utang luar negeri). Rasio yang menunjukkan struktur pembiayaan korporasi, *Debt Equity Ratio* (DER), relatif stabil di 1,11 sama dengan triwulan lalu. Rasio ini mengindikasikan peran utang dan ekuitas dalam pembiayaan relatif seimbang. Adapun, risiko yang harus diwaspadai adalah ketidaksesuaian nilai tukar yaitu perbedaan nilai tukar antara pembiayaan (pembayaran pokok utang dan bunga) dengan penerimaan (hasil penjualan). Risiko ini dapat dimitigasi dengan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan lindung nilai (*hedging*) dan



Grafik 4.5 Perkembangan ROA, ROE Korporasi Jawa Tengah

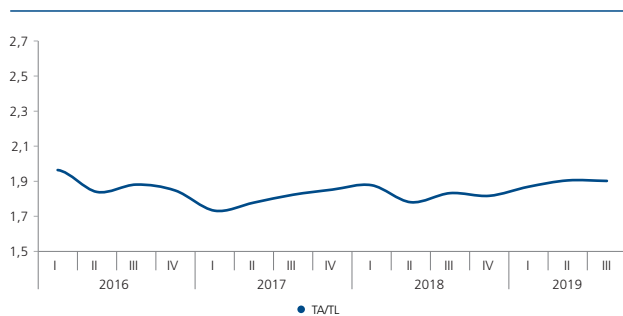
Sumber: LK korporasi dan Bank Indonesia, diolah



Grafik 4.6 Perkembangan Debt to Equity Ratio Korporasi Jawa Tengah

Sumber: LK korporasi dan Bank Indonesia, diolah

4. Analisis disusun berdasarkan data sementara laporan keuangan korporasi di Jawa Tengah pada periode September 2019.



Sumber: LK korporasi dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.7 Perkembangan TA/TL Korporasi Jawa Tengah

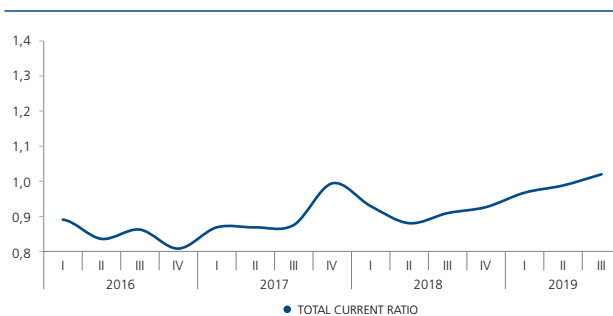
peningkatan daya tahan korporasi yang tercermin antara lain dari rasio profitabilitas dan likuiditas. Dalam triwulan laporan, *current ratio* dan *total assets/ total liabilities* terpantau stabil di 7,92 dan 1,90 yang mengindikasikan likuiditas perusahaan cukup sehat, khususnya untuk membayar kewajiban dalam jangka pendek.

4.1.3. Kerentanan Sektor Rumah Tangga Pada Triwulan IV 2019

4.1.3.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Rumah tangga (RT) memegang peranan besar terhadap perekonomian dan sistem keuangan Jawa Tengah. Konsumsi RT menyumbang ±59% dari total PDRB di Jawa Tengah. Ditinjau dari sisi perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga menyumbang 76,57% dari total DPK yang dihimpun oleh perbankan di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019. Sementara itu, kredit konsumsi RT menyumbang 29,33% dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan di Jawa Tengah.

Berdasarkan jenisnya, komponen tabungan masih menjadi pembentuk utama DPK di Jawa Tengah dengan rasio sebesar 55,06%. Analisis lebih dalam mengindikasikan bahwa sekitar 0,06% deposan besar (dengan simpanan dana lebih dari Rp1 miliar) menguasai 28,77% dari total himpunan dana di tabungan serta deposito. Sementara, kredit konsumsi masih menunjukkan peningkatan pertumbuhan meski melambat menjadi sebesar 5,02% (yoy) dengan kualitas NPL masih terjaga pada 1,14%. Penyaluran kredit konsumsi masih didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Multiguna.



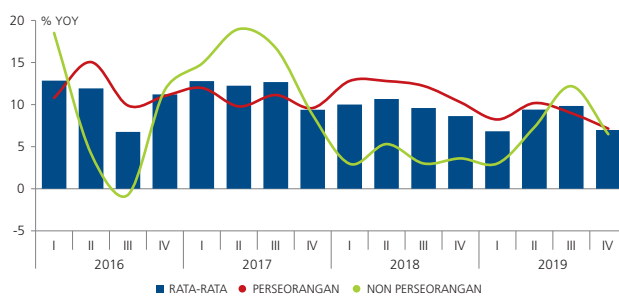
Sumber: LK korporasi dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8 Perkembangan Current Ratio Korporasi Jawa Tengah

4.1.3.2. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga/ Perseorangan (DPK RT) di Perbankan

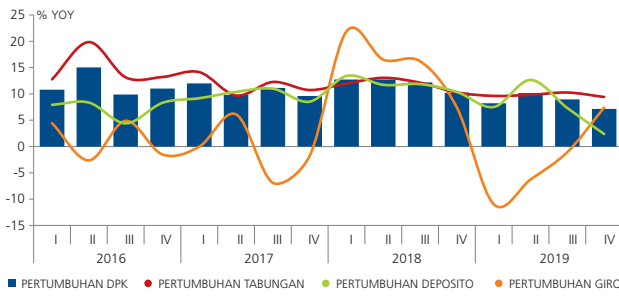
Dana Pihak Ketiga (DPK) di Jawa Tengah yang berhasil dihimpun pada triwulan IV 2019 tercatat sebesar Rp309,8 Triliun, didominasi oleh dana rumah tangga sebesar Rp234,02 Triliun atau setara dengan pangsa 76,57% dari total DPK. Dana simpanan rumah tangga mengalami pertumbuhan yang melambat (7,13%; yoy) dibandingkan triwulan III 2019 (8,96%; yoy). Hal ini sejalan dengan hasil pengolahan SK yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap masyarakat di Kota Semarang, Solo, Purwokerto, dan Tegal. Salah satu indeks yang menunjukkan ekspektasi masyarakat terhadap perkiraan jumlah tabungan untuk periode triwulan IV 2019 menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan menjadi sebesar rata-rata sebesar 129,01 pada triwulan IV 2019; lebih rendah dibandingkan periode triwulan III 2019 yang terhitung rata-rata sebesar 133,43.

Komposisi DPK rumah tangga pada triwulan IV 2019 masih didominasi oleh tabungan (66,78%), deposito (30,15%), dan giro (3,07%). Pertumbuhan tabungan tercatat melambat menjadi sebesar 9,41% (yoy);



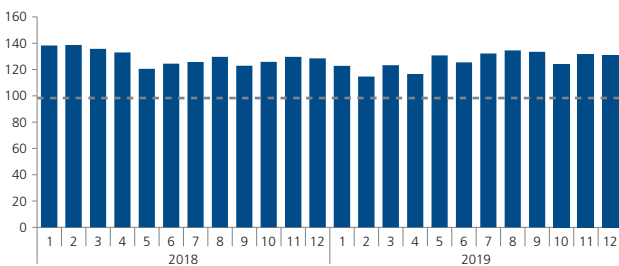
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.9 Perkembangan Pertumbuhan DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.10 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Jawa Tengah Berdasarkan Komponennya



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.11 Perkembangan Ekspektasi Masyarakat terhadap Peningkatan Tabungan Berdasarkan Survei Konsumen

dibandingkan triwulan lalu yang terhitung sebesar 10,26% (yoy). Sedangkan, giro berbalik tumbuh, setelah mengalami kontraksi pada triwulan III 2019. Tingginya pangsa tabungan RT terhadap total DPK perbankan menunjukkan preferensi RT yang masih menginginkan likuiditas tinggi. Sementara itu, hal ini membuat perbankan terekspos risiko likuiditas, apabila terdapat penarikan dana RT sewaktu-waktu dalam jumlah yang besar.

Sejalan dengan pola historis, ditinjau berdasarkan kelompok nilai, ketergantungan perbankan Jawa Tengah terhadap deposit nilai besar perseorangan masih cukup tinggi. Tercatat pada triwulan IV 2019, sebanyak 0,03% dari jumlah deposit perseorangan dengan nilai tabungan di atas Rp 1 Miliar menguasai 18,17% dari nilai keseluruhan tabungan perseorangan di Jawa Tengah.

Tabel 4.1 Pengelompokan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya

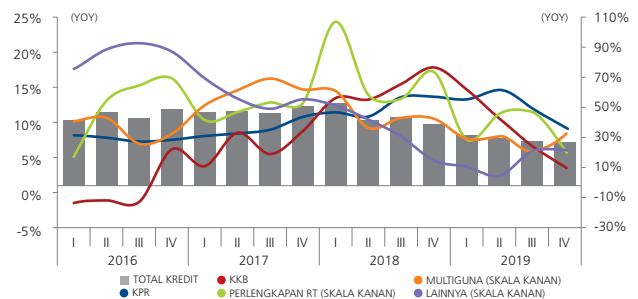
PENGELompokAN TABUNGAN (RP)	PANGSA NOMINAL	PANGSA DEPOSAN
0-100 JUTA	46.71%	99.28%
100-500 JUTA	28.46%	0.65%
500 JUTA - 1M	6.66%	0.04%
>1M	18.17%	0.03%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

4.1.3.3. Kredit Perseorangan di Perbankan

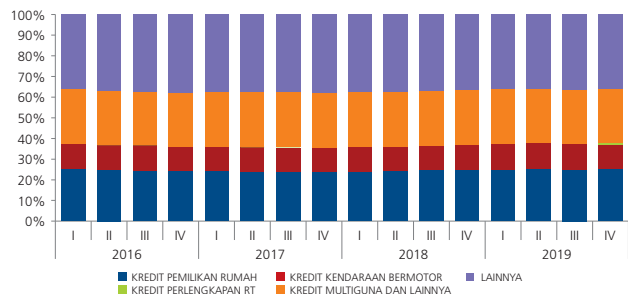
Pertumbuhan kredit konsumsi bagi rumah tangga di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 mencatatkan perlambatan dari sebelumnya tumbuh sebesar 5,29% (yoy) pada triwulan III 2019, turun menjadi sebesar 5,02% (yoy) pada triwulan laporan. Walaupun melambat, laju realisasi kredit konsumsi RT tersebut masih tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan komponen konsumsi RT pada PDRB Jawa Tengah yang mengalami akselerasi dari sebesar 4,18% (yoy) pada triwulan lalu, meningkat menjadi 4,36% (yoy) pada triwulan IV 2019.

Kredit rumah tangga sebagian besar disalurkan dalam kredit multiguna, kredit pemilikan rumah (KPR), dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Berdasarkan andilnya, perlambatan realisasi kredit RT pada triwulan IV 2019 terutama disebabkan oleh kelompok KPR dan KKB. Selanjutnya, kualitas kredit rumah tangga masih terjaga sangat baik, tercermin melalui rasio NPL sebesar 1,14% pada triwulan IV 2019, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,23%.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah



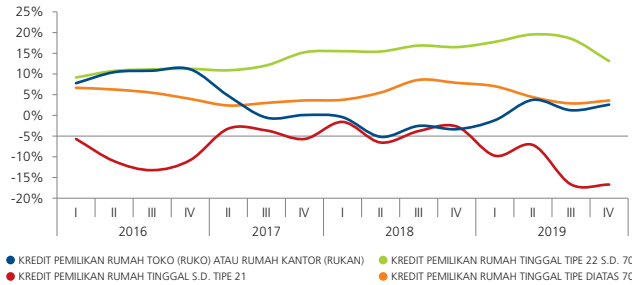
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13 Perkembangan Pangsa Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

Tabel 4.2 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

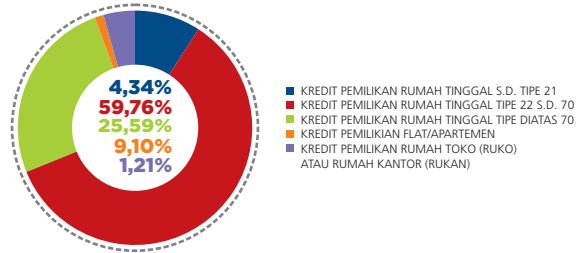
KATEGORI	2017		2018				2019			
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21	2,90%	2,64%	2,69%	3,02%	3,18%	2,78%	2,98%	3,59%	4,13%	3,95%
PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE 22 S.D. 70	1,80%	1,37%	1,46%	1,54%	1,51%	1,24%	1,37%	1,38%	1,40%	1,44%
PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	3,36%	2,89%	3,58%	2,76%	2,78%	2,53%	2,78%	2,68%	2,87%	2,86%
PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21	3,43%	9,56%	8,45%	8,81%	37,08%	17,78%	2,08%	0,70%	0,94%	0,93%
PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE 22 S.D. 70	2,87%	2,01%	1,89%	1,91%	1,89%	1,63%	2,13%	2,05%	1,97%	2,17%
PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70	3,60%	2,23%	2,09%	1,81%	2,29%	0,82%	0,45%	1,65%	0,43%	0,43%
PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	3,36%	2,75%	3,17%	3,54%	3,48%	3,54%	3,44%	5,20%	6,91%	6,90%
PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT	1,13%	1,02%	0,98%	1,31%	1,25%	0,95%	1,17%	1,23%	1,26%	1,35%
PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR	1,73%	1,58%	1,86%	1,82%	1,75%	1,47%	1,43%	1,78%	1,61%	1,57%
PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN RODA ENAM ATAU LEBIH	1,77%	2,55%	1,19%	2,65%	2,72%	1,48%	1,90%	3,57%	1,79%	1,64%
PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	3,94%	2,54%	1,04%	1,26%	2,16%	2,57%	3,49%	3,32%	3,59%	3,47%
PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0,84%	0,42%	0,28%	0,31%	0,50%	1,03%	1,21%	1,30%	0,67%	0,71%
PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK	2,10%	1,46%	1,83%	1,96%	2,52%	2,57%	1,88%	1,92%	2,82%	2,72%
PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI	8,29%	3,45%	2,71%	4,39%	7,49%	7,26%	5,50%	4,05%	3,42%	3,11%
PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA	0,68%	0,70%	0,50%	0,75%	0,98%	0,82%	0,61%	1,12%	1,06%	1,04%
KEPERLUAN MULTIGUNA	1,09%	1,01%	1,15%	1,20%	1,12%	0,96%	1,04%	1,03%	1,08%	1,00%
KEPERLUAN LAINNYA	0,57%	0,52%	0,61%	0,67%	0,59%	0,56%	0,60%	0,68%	0,18%	0,18%

Sumber: Bank Indonesia, diolah



Grafik 4.14 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah

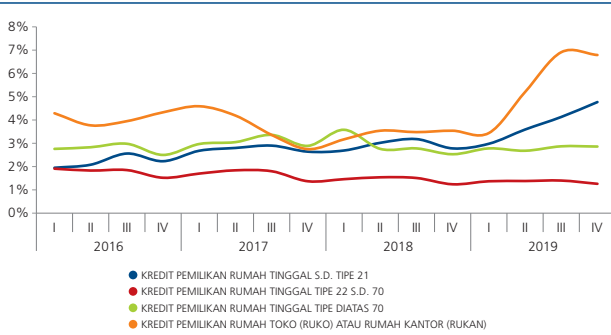
Laju penyaluran KPR pada triwulan IV 2019 tercatat sebesar 6,61% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,02%. Dengan pangsa nilainya terhadap keseluruhan kredit konsumsi di Jawa Tengah sebesar 25,07%, penurunan kinerja KPR menahan pertumbuhan kredit konsumsi untuk tumbuh lebih tinggi. Perlambatan penyaluran KPR di Jawa Tengah khususnya berlangsung pada segmen KPR untuk kepemilikan tipe rumah tinggal 22 s.d. 70 m². Sementara itu, kontribusi pertumbuhan KPR utamanya disumbang oleh tipe rumah tinggal tipe di atas 70 m² yang bertumbuh sebesar 3,59% (yoy), atau meningkat tipis dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 2,89% (yoy). Sementara, penyaluran kredit pada rumah tinggal s.d. tipe 21 masih melanjutkan tren kontraksi yang telah berlangsung sejak tahun 2016. Dalam rangka mendorong kembali kepemilikan rumah sederhana oleh masyarakat



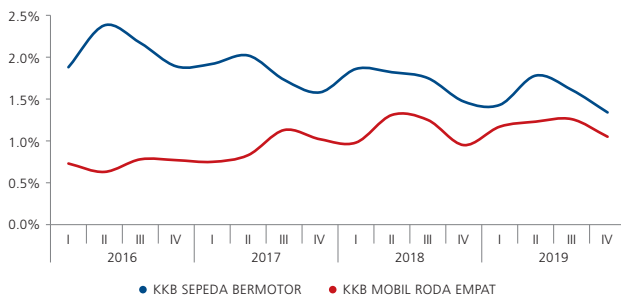
Grafik 4.15 Pangsa Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah

sederhana, Pemerintah berusaha mendorong penyaluran KPR yang telah memperoleh fasilitas subsidi dari Pemerintah pada 18 Juni 2019. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 535 Tahun 2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi.

Secara umum kualitas KPR di Jawa Tengah masih relatif terjaga, dengan rasio NPL relatif stabil di tingkat 1,94% pada triwulan IV 2019. Risiko kerentanan RT terpantau masih stabil rendah dengan rasio NPL 1,14% pada triwulan laporan. Dicermati lebih lanjut berdasarkan jenis kredit, NPL tertinggi dicatatkan oleh kredit pemilikan rumah toko atau rumah kantor kredit pemilikan rumah tinggal s.d. tipe 21.

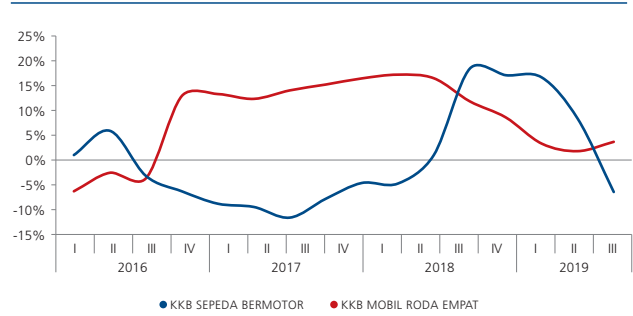


Grafik 4.16 Perkembangan NPL Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah
Sumber: Bank Indonesia, diolah

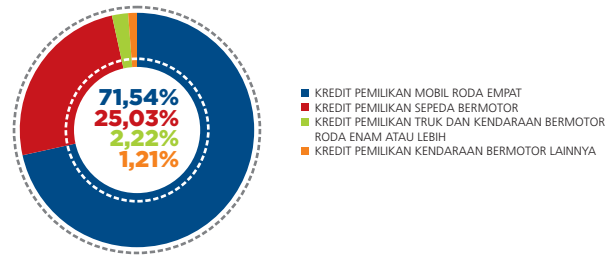


Grafik 4.18 Perkembangan NPL Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah

Pada triwulan laporan, kredit kendaraan bermotor (KKB) hanya tumbuh sebesar 1,98% (yoy), menurun dibandingkan triwulan lalu (4,34%; yoy). Penyaluran KKB mayoritas ditujukan untuk membiayai kepemilikan mobil roda empat (71,72%) dan sepeda bermotor (26,25%). Perlambatan pertumbuhan kredit untuk kepemilikan sepeda bermotor, dari semula sebesar 8,31% (yoy) pada triwulan lalu, menjadi kontraksi 6,44% (yoy) pada triwulan IV 2019 menjadi penahan penyaluran KKB pada triwulan ini. Tingkat persaingan antara pelaku usaha pembiayaan alternatif dengan perbankan yang memiliki multifinance ditengarai mempengaruhi penyaluran KKB dari perbankan. Hasil liaison dengan salah satu pelaku usaha mengemukakan bahwa industri multifinance masih mengandalkan dana dari bank. Meski dampaknya belum terlihat, implementasi kebijakan OJK untuk melonggarkan uang muka hingga 0% untuk kendaraan disambut baik oleh perbankan dan diharapkan dapat mengakselerasi perkembangan KKB.



Grafik 4.17 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah



Grafik 4.19 Pangsa Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah
Sumber: Bank Indonesia, diolah

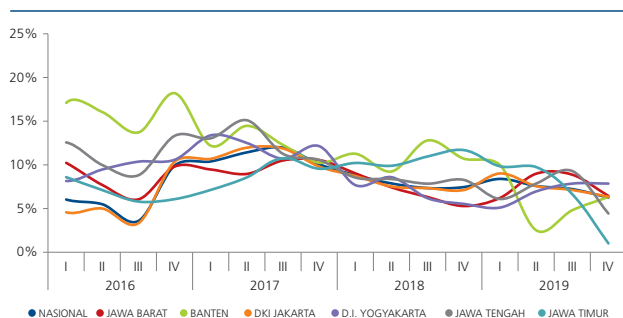
Secara agregat, kualitas kredit kendaraan bermotor (KKB) pada triwulan IV 2019 masih terjaga dengan NPL 1,16%. Kualitas KKB yang cukup baik ini disumbang oleh NPL kredit kepemilikan mobil roda empat dan sepeda bermotor yang cukup rendah, masing-masing 1,05% dan 1,34%, atau relatif stabil dibandingkan periode triwulan III 2019.

4.2. KONDISI UMUM PERBANKAN⁵ JAWA TENGAH

Pada triwulan IV 2019, indikator perbankan di Jawa Tengah menunjukkan beberapa penurunan kinerja intermediasi. Dibandingkan triwulan III 2019, pertumbuhan aset, pertumbuhan DPK, dan pertumbuhan kredit mencatatkan perlambatan pertumbuhan. Hal ini mendorong rasio intermediasi berupa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Aset perbankan Jawa Tengah tercatat sebesar Rp399,46 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,43% (yoy); tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan lalu

5. Indikator perbankan berdasarkan lokasi bank

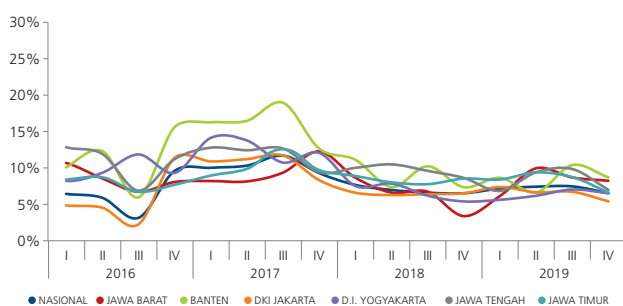


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.20 Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan di Pulau Jawa

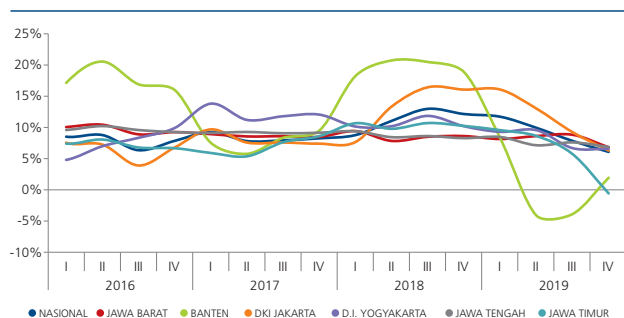
(9,29%; yoy). Adapun, pangsa aset perbankan Jawa Tengah terhadap nasional sebesar 3,85%. Secara spasial, peningkatan pertumbuhan aset perbankan di Jawa Tengah relatif rendah apabila dibanding pertumbuhan aset di Provinsi lainnya di Pulau Jawa. Provinsi DI Yogyakarta mencatatkan pertumbuhan aset terbaik di kawasan Jawa. Selanjutnya, hampir seluruh provinsi di kawasan Jawa mencatatkan perlambatan pertumbuhan aset, dengan pengecualian provinsi Banten.

Penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah tercatat sebesar Rp299,06 Triliun, menunjukkan pertumbuhan yang melambat (6,87%; yoy) dibandingkan triwulan lalu (7,60%; yoy). Dengan pertumbuhan ini Jawa Tengah merupakan provinsi dengan pertumbuhan kredit tertinggi di Jawa, dengan tren perlambatan pertumbuhan kredit berlangsung di seluruh provinsi Jawa. Secara historis, kinerja penyaluran kredit perbankan yang berlokasi di Jawa Tengah masih berada di rata-rata 8%-9% dalam 2 (dua) tahun terakhir. Angka tersebut memang masih berada di bawah target penyaluran kredit yaitu sebesar 10%-12%. Dengan perkembangan tersebut, pangsa



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.22 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan di Jawa Tengah

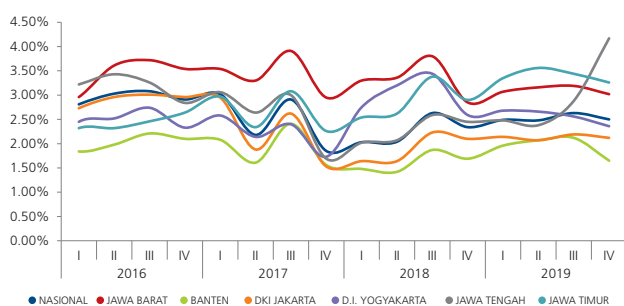


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.21 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan di Pulau Jawa

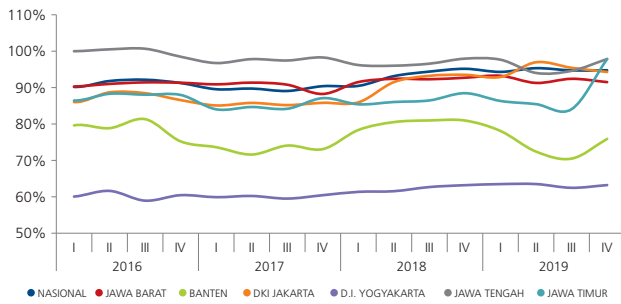
kredit perbankan Jawa Tengah terhadap nasional adalah sebesar 5,20%.

Kinerja penghimpunan DPK perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 juga menunjukkan perlambatan pertumbuhan 9,84% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 6,99% (yoy) pada triwulan laporan atau secara nominal tercatat sebesar Rp 305,63 Triliun. Kinerja penghimpunan DPK yang relatif stabil di 9%-10% pada dua tahun terakhir antara lain disebabkan oleh pergeseran preferensi nasabah untuk menempatkan *idle fund* untuk kepentingan investasi. Hal ini semakin diperkuat dengan semakin banyaknya layanan berbasis teknologi untuk penempatan dan pengelolaan dana. Salah satu perbankan di Jawa Tengah berhasil meningkatkan kinerja penghimpunan DPK melalui pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi yang menyasar nasabah generasi milenial. Perbankan masih optimis dengan kinerja penghimpunan DPK, salah satunya melalui program pemerintah Indonesia Pintar yang dianggap berpotensi meningkatkan tingkat penjualan ke depan, melalui penambahan jumlah rekening nasabah saat ini.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan (NPL) Kredit Perbankan Jawa Tengah

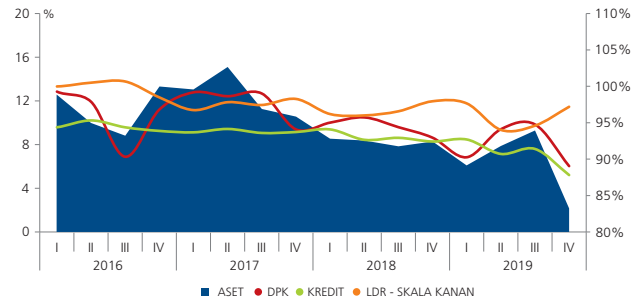


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.24 Perkembangan Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Perbankan Jawa Tengah

Risiko yang dialami perbankan relatif terjaga dengan baik, walaupun perlambatan pertumbuhan berlangsung pada komponen kredit dan penghimpunan DPK, kualitas kredit perbankan Jawa Tengah menunjukkan perbaikan dengan NPL 2,50%, dibandingkan triwulan lalu sebesar 2,63%.

Peningkatan pertumbuhan kredit yang dibarengi dengan peningkatan pertumbuhan DPK meningkatkan peran intermediasi perbankan yang dicerminkan melalui LDR mengalami peningkatan. Tercatat LDR Jawa Tengah sebesar 94,60%. Hal ini masih jauh lebih baik dibandingkan Provinsi lainnya yang mengalami penurunan LDR yang cukup signifikan.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.25 Perkembangan Pertumbuhan Indikator Perbankan Jawa Tengah

4.2.1. Perkembangan Bank Umum

4.2.1.1. Perkembangan Jaringan Kantor Bank

Jumlah jaringan kantor bank umum di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 relatif sama dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, jumlah kantor bank umum di Jawa Tengah tercatat sebesar 3.021 dari sebelumnya yang berjumlah 3.026. Selain itu, pemberian layanan melalui aplikasi teknologi juga dapat menjadi salah satu potensi perluasan basis nasabah. Melalui berbagai fasilitas, diharapkan jumlah masyarakat yang mengakses lembaga keuangan semakin meningkat. Namun demikian, peningkatan jaringan kantor masih

Tabel 4.3 Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan di Jawa Tengah

KETERANGAN	2017	2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
BANK KONVENSIONAL									
JUMLAH BANK UMUM	52	52	53	53	53	53	52	55	55
JUMLAH BANK (KANTOR PUSAT)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH KANTOR BANK UMUM	3.000	2.988	3.067	3.054	3.034	3.011	3.026	3.020	3.017
JUMLAH KANTOR BANK UMUM MENURUT									
BANK PEMERINTAH	1.930	1.959	2.043	2.043	2.037	2.026	2.040	2.040	2.040
KANTOR PUSAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANTOR CABANG	89	89	89	89	89	89	89	89	89
KANTOR CABANG PEMBANTU ¹⁾	1.609	1.627	1.715	1.715	1.722	1.715	1.723	1.723	1.723
KANTOR KAS	232	243	239	239	226	222	228	228	228
BANK PEMERINTAH DAERAH	323	327	327	327	327	327	332	336	336
KANTOR PUSAT	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KANTOR CABANG	45	43	43	43	43	43	43	43	43
KANTOR CABANG PEMBANTU	123	127	127	127	127	127	129	129	129
KANTOR KAS	154	156	156	156	156	156	159	163	163
BANK SWASTA NASIONAL	737	692	687	674	660	648	646	636	633
KANTOR PUSAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANTOR CABANG	145	146	146	147	146	136	145	145	145
KANTOR CABANG PEMBANTU	517	467	462	448	435	433	424	418	416
KANTOR KAS	75	79	79	79	79	79	77	73	72
BANK ASING DAN BANK CAMPURAN	10	10	10	10	10	10	8	8	8
KANTOR PUSAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANTOR CABANG	9	9	9	9	9	9	7	7	7
KANTOR CABANG PEMBANTU	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KANTOR KAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Bank Indonesia, diolah

¹⁾Termasuk BRI Unit

utamanya pada kantor kas Bank Daerah yang dianggap masih relevan, utamanya untuk meningkatkan ikatan dengan nasabah dan menjangkau nasabah yang literasi teknologinya masih rendah dengan memberikan pelayanan langsung kepada nasabah secara tatap muka.

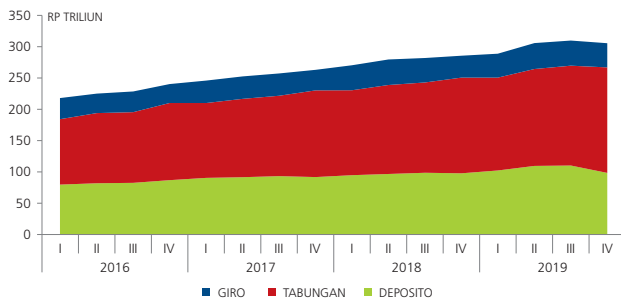
4.2.1.2. Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Pertumbuhan DPK pada triwulan IV 2019 menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya, utamanya disebabkan oleh penurunan komponen deposito yang mencatatkan pertumbuhan terendah dalam 5 tahun terakhir. Namun, pertumbuhan yang relatif stabil pada komponen tabungan masih mendorong kinerja penghimpunan DPK perbankan di Jawa Tengah.

Pada triwulan laporan, komponen tabungan mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 10,20% (yoy); dari 8,42% (yoy) pada triwulan III 2019. Komponen tabungan didominasi oleh pemilik nilai tabungan >Rp10-100 juta (pangsa 35,48%) dan diikuti oleh nilai tabungan >Rp100-

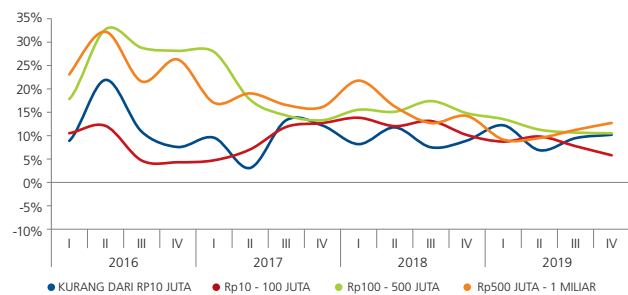
500 juta (pangsa 28,46%). Kedua kategori tersebut mencatatkan perlambatan pertumbuhan masing-masing menjadi sebesar 5,81% (yoy) dan 10,52% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan tabungan dengan nilai tabungan >Rp500 juta-1 Miliar mencatatkan akselerasi pertumbuhan (12,72%; yoy), yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan DPK pada triwulan laporan.

Sejalan dengan itu, giro perbankan Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan yang meningkat menjadi sebesar 10,56% (yoy) pada triwulan IV 2019, lebih tinggi daripada pertumbuhan pada triwulan lalu sebesar 2,89% (yoy). Hal ini diperkirakan bersifat musiman, yang mengindikasikan meningkatnya aktivitas transaksi para pelaku usaha, khususnya pada aktivitas pencairan pembayaran proyek kepada kontraktor ditengarai meningkatkan saldo giro di Bank Umum. Sementara itu, struktur pangsa giro mengalami masih didominasi oleh giro dengan nilai >Rp20M (pangsa 41,63%). Kemudian diikuti oleh giro dengan nilai >Rp2M-5M (pangsa 16,39%) dan giro dengan nilai >Rp100 – 500 juta (pangsa 12,38%).



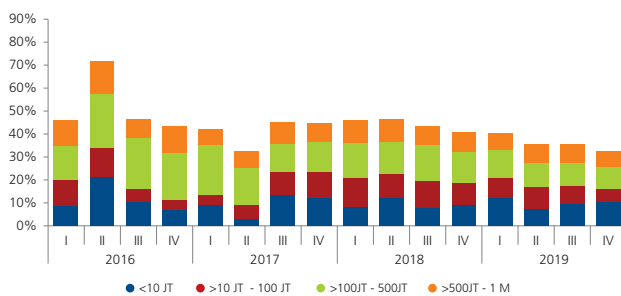
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.26 Perkembangan DPK Perbankan Umum Jawa Tengah



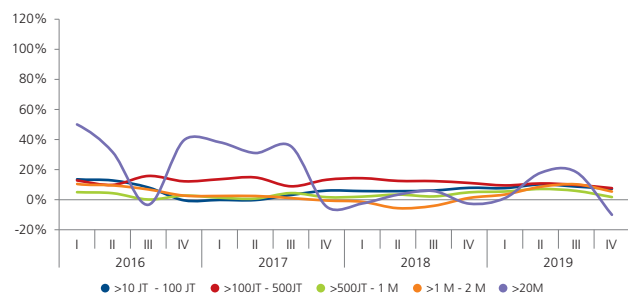
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.27 Perkembangan Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai



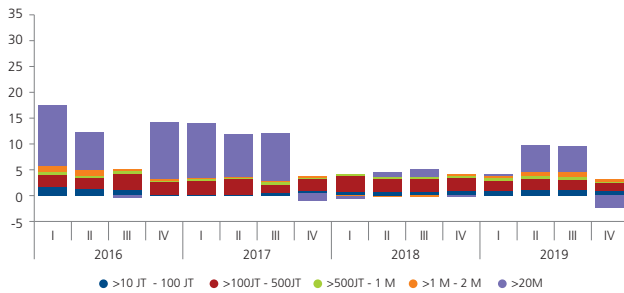
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.28 Perkembangan Pangsa Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai



Sumber: D/IB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Grafik 4.29 Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.30 Perkembangan Pangsa Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai

Sementara itu, pertumbuhan deposito perbankan di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 terpantau mencatatkan perlambatan yang signifikan dari 11,76% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 0,70% (yoy). Komponen deposito didominasi oleh deposito dengan nilai deposito >Rp20M (pangsa 26,55%), deposito dengan nilai deposito >Rp 100-500 juta (pangsa 18,87%), dan deposito dengan nilai deposito >Rp2M-5M (pangsa 13,42%). Perlambatan pada komponen deposito khususnya disebabkan oleh kontraksi atau penurunan nominal deposito pada kelompok nilai lebih dari Rp15 miliar, dengan tercatat kontraksi sebesar 31,63% (yoy) pada triwulan IV 2019.

Ketergantungan perbankan Jawa Tengah terhadap deposito besar pada triwulan laporan masih cukup tinggi. Dari hasil pengelompokan DPK berdasarkan nilai, terlihat bahwa rekening dengan nilai DPK di atas Rp 1 miliar dengan pangsa terbesar (38,61%) dikotribusikan oleh 0,11% rekening perbankan di Jawa Tengah.

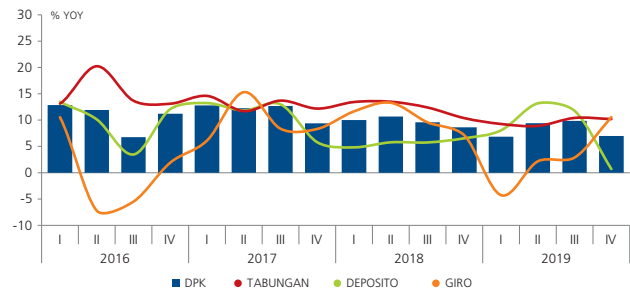
Tabel 4.4 Pengelompokan DPK Berdasarkan Nilai

DPK	NOMINAL (RP MILIAR)	JUMLAH REKENING	PERSENTASE NOMINAL	PERSENTASE REKENING
0-100 JUTA	86.320	38.244.352	27,86%	98,96%
100-500 JUTA	70.927	343.685	22,89%	0,89%
500 JT - 1 M	22.536	30.106	7,27%	0,08%
>1 M	130.022	27.265	41,97%	0,07%
TOTAL	309.805	38.645.408	100,00%	100,00%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

4.2.1.3. Penyaluran Kredit

Kinerja kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 masih mencatatkan pertumbuhan, walau melambat dibandingkan triwulan lalu. Penyaluran kredit perbankan



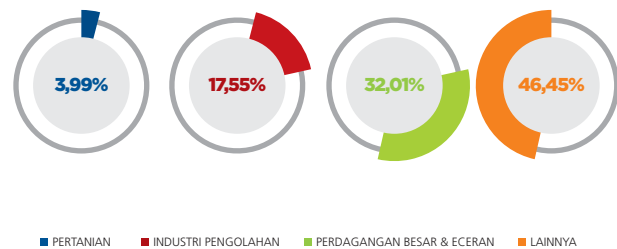
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.31 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Tengah

di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 tercatat sebesar Rp299,06 Triliun atau bertumbuh 6,87% (yoy) dibandingkan triwulan lalu (7,15%; yoy).

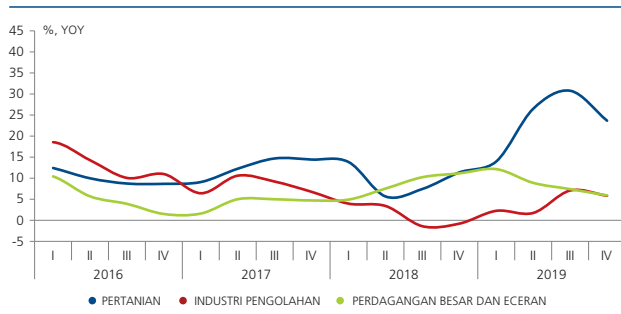
Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah masih berfokus pada sektor utama, antara lain sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa 32,01% dari total nilai kredit. Sektor utama lainnya yaitu industri pengolahan, memiliki pangsa kredit sebesar 17,55% diikuti oleh sektor pertanian yang memiliki pangsa 3,99%. Rasio penyaluran kredit pada sektor pertanian tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Jawa Tengah pada triwulan IV 2019. Hal ini menunjukkan pembiayaan pada lapangan usaha pertanian memiliki potensi untuk diperluas.

Apabila ditinjau berdasarkan penggunaan, penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 masih didominasi oleh kredit modal kerja dengan pangsa 53,84%. Sementara itu, kredit konsumsi dan kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.32 Pangsa Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.33 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor

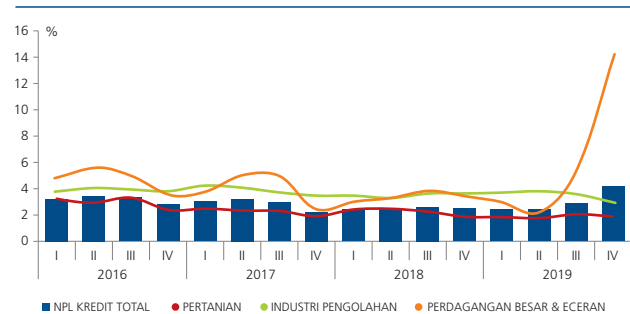
investasi menempati urutan kedua dan ketiga dengan pangsa masing-masing sebesar 29,50% dan 16,65% dari total kredit perbankan Jawa Tengah. Peningkatan pertumbuhan kredit pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan yang signifikan pada kredit Investasi dari 10,41% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 17,31% (yoy). Sementara itu, peningkatan pada kredit investasi tersebut tidak diikuti oleh kredit modal kerja dan kredit konsumsi yang masing-masing mencatatkan perlambatan pertumbuhan menjadi 5,46% (yoy) dan 6,57% (yoy).

Berdasarkan pengelompokan nilai, dapat terlihat bahwa persentase kredit di bawah Rp 500 juta memiliki pangsa sebesar 50,28% dari total kredit yang disalurkan di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa nominal penyaluran kredit skala kecil dan skala besar di Jawa Tengah relatif merata. Namun, ditinjau dari aspek sebaran jumlah debitur dan nominal kredit, penyaluran kredit di Jawa Tengah sebagian besar masih dikuasai oleh debitur dengan nominal kredit di atas Rp500 juta. Hal tersebut terlihat dari 1,35% debitur dengan realisasi kredit di atas Rp500 juta, memiliki pangsa nominal kredit hingga mencapai 49,71% dari keseluruhan nominal kredit Jawa Tengah. Berdasarkan data triwulan IV 2019, mayoritas debitur kredit di atas Rp 1 Miliar merupakan golongan debitur sektor swasta non lembaga keuangan.

Tabel 4.5 Pengelompokan Kredit Berdasarkan Nilai

KREDIT	NOMINAL (RP MILIAR)	JUMLAH REKENING	PERSENTASE NOMINAL	PERSENTASE REKENING
0-100 JUTA	66.659	3.252.208	22,74%	85,86%
100-500 JUTA	80.720	484.599	27,54%	12,79%
500 JT - 1 M	14.244	23.887	4,86%	0,63%
>1 M	131.456	27.138	44,85%	0,72%
TOTAL	293.079	3.787.832	100,00%	100,00%

Sumber: Bank Indonesia, diolah



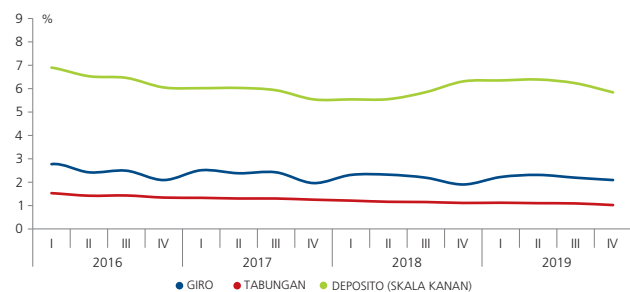
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.34 Perkembangan Rasio NPL Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor

4.2.1.4. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum

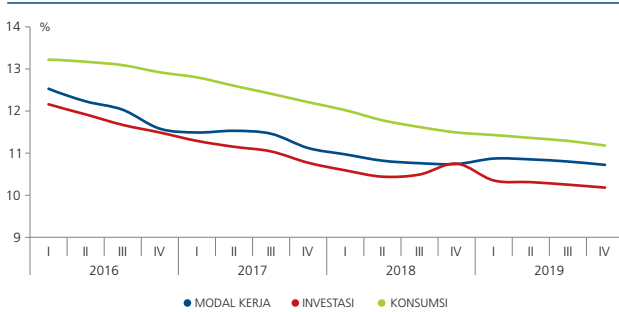
Pada triwulan IV 2019, perkembangan suku bunga simpanan perbankan menurun. Suku bunga simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito tercatat menurun, masing-masing menjadi 2,09%, 1,02%, dan 5,84%. Penurunan yang serentak pada ketiga produk simpanan ini merupakan bentuk respons atas penurunan suku bunga kebijakan yang telah diturunkan oleh Bank Indonesia yang telah berlangsung sejak Juli 2019. Disisi lain, berdasarkan hasil FGD dengan perbankan di Jawa Tengah, perang suku bunga utamanya untuk dana mahal masih lazim terjadi untuk menjaga likuiditas perbankan.

Penurunan suku bunga acuan juga telah direspons perbankan di Jawa Tengah dengan menurunkan suku bunga kredit. Penurunan tersebut khususnya berlangsung pada kredit konsumsi. Perlambatan penyaluran KKB dan KPR direspons oleh perbankan dengan penurunan suku bunga. Pada triwulan IV 2019, suku bunga pinjaman yang tercatat pada kelompok kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masing-masing menjadi 10,72%; 10,18%; dan 11,18%.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.35 Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

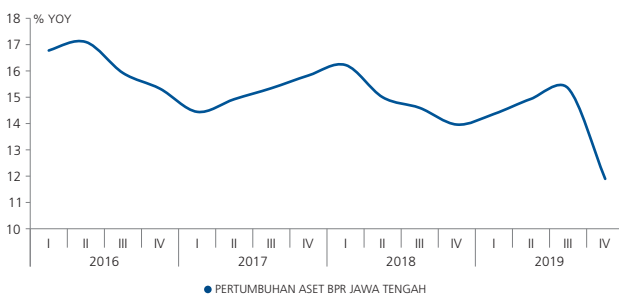
Grafik 4.36 Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan Jawa Tengah

Bila dibedah berdasarkan lapangan usaha utama Jawa Tengah, penurunan suku bunga kredit terjadi pada sebagian besar kredit penyaluran kredit lapangan usaha utama di Jawa Tengah.

Suku bunga kredit untuk LU industri pengolahan, LU perdagangan besar dan eceran, serta LU Konstruksi pada triwulan IV 2019 tercatat mengalami penurunan suku bunga menjadi sebesar 9,49%; 11,10%; dan 11,20%; atau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat masing-masing sebesar 9,62%; 11,11%; dan 11,52%.

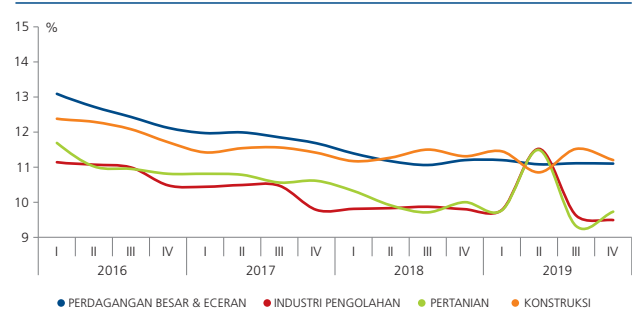
4.3. PERKEMBANGAN KINERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PROVINSI JAWA TENGAH

Sejalan dengan kinerja perbankan secara umum, BPR di wilayah Provinsi Jawa Tengah juga mencatatkan penurunan kinerja di berbagai indikator kinerja, termasuk aset, DPK, dan kredit. Pada triwulan laporan, aset BPR Jawa Tengah tercatat Rp 33,31 triliun, atau tumbuh 6,54% (yoy), melambat dibandingkan dari triwulan lalu (12,96%; yoy).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.38 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah

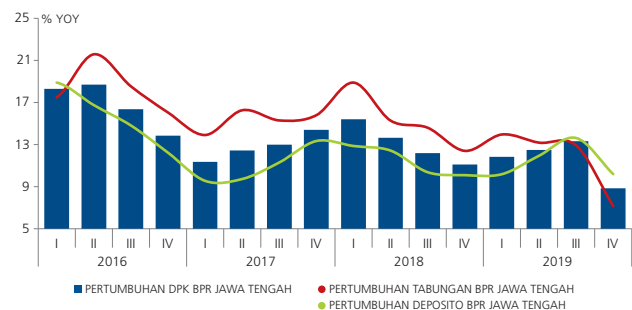


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.37 Perkembangan Suku Bunga Sektor Ekonomi Utama di Jawa Tengah

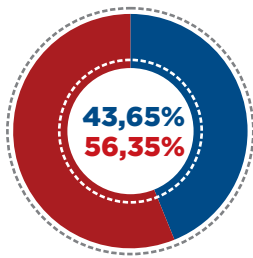
DPK BPR Jawa Tengah tercatat Rp25,82 triliun atau bertumbuh 8,85% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu sebesar 13,31% (yoy). Berbeda dengan bank secara umum, DPK BPR masih didominasi oleh deposito (pangsa 56,35%), kemudian tabungan (pangsa 43,65%). Seluruh komponen DPK BPR di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 mencatatkan pertumbuhan yang melambat, dengan deposito dan tabungan masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,19% (yoy) dan 7,16% (yoy); lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat masing-masing sebesar 13,63% (yoy) dan 12,92% (yoy).

Sejalan dengan kinerja DPK, pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 juga tumbuh melambat sebesar 9,87% (yoy) atau secara nominal sebesar Rp25,90 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 terutama ditopang oleh pertumbuhan kredit modal kerja. Kredit modal kerja mengalami perlambatan dari 14,12% (yoy) menjadi 11,13% (yoy). Sejalan dengan itu, kredit konsumsi juga mengalami perlambatan dari 13,25% (yoy)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

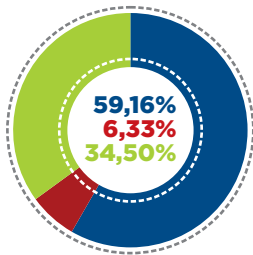
Grafik 4.39 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di Jawa Tengah



■ PANGSA TABUNGAN BPR JAWA TENGAH
■ PANGSA DEPOSITO BPR JAWA TENGAH

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.40 Pangsa Dana Pihak Ketiga BPR di Jawa Tengah



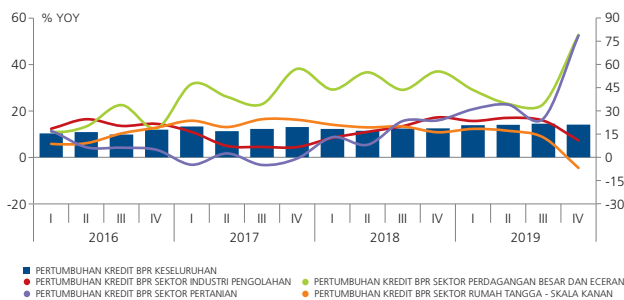
■ KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAH
■ KREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAH
■ KREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.42 Pangsa Kredit BPR di Jawa Tengah

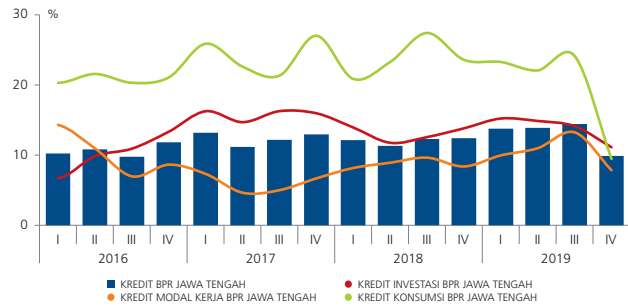
menjadi 7,85% (yoy). Sementara itu, kredit investasi mengalami perlambatan yang signifikan, dari sebesar 24,14% (yoy) menjadi 9,46% (yoy).

Penyaluran kredit BPR Jawa Tengah terkonsentrasi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (28,53%), kemudian merata dengan pangsa kecil ke berbagai sektor lain (29,13%), pertanian (7,19%), dan rumah tangga (RT) (5,94%). Walaupun masih menjadi lapangan usaha yang dominan menerima penyaluran kredit BPR, lapangan usaha terus melanjutkan tren penurunan realisasi kreditnya, dengan mencatatkan kontraksi sebesar 4,58% (yoy) pada triwulan IV 2019, berbalik arah dari triwulan lalu yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,48% (yoy).



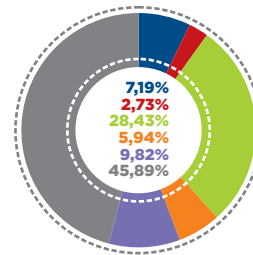
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.44 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.41 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa Tengah

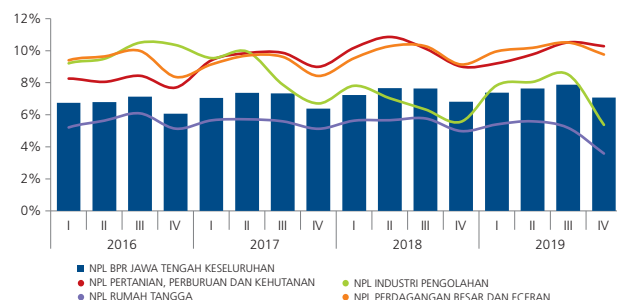


■ PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN
■ INDUSTRI PENGOLAHAN
■ PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN
■ RUMAH TANGGA
■ JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA
■ LAINNYA

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.43 Pangsa Penyaluran Kredit BPR di Jawa Tengah

Kualitas kredit BPR di Jawa Tengah membaik walaupun masih di atas batas yang ditetapkan pada perbankan umum. Rasio NPL kredit BPR di Jawa Tengah pada triwulan laporan ini tercatat sebesar 7,07%, membaik dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar 7,88%. Apabila dicermati secara lapangan usaha, kredit pada sektor perdagangan besar dan eceran perlu menjadi perhatian karena masih cenderung persisten sejak tahun 2016, dengan mencatatkan rasio NPL sebesar 9,76 pada triwulan laporan. Sementara itu NPL Rumah Tangga (RT) relatif membaik dari 5,18% pada triwulan lalu menjadi 3,58% pada triwulan IV 2019.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.45 Perkembangan NPL BPR di Jawa Tengah

BANK INDONESIA DORONG UMKM MENJADI EKSPORTIR**SUPLEMEN II**

Sumber: Bank Indonesia

Gambar. Pembukaan UMKM Gayeng

Kantor Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan **UMKM Gayeng (GelAr karYa krEatif jawa teNGah)** pada 1-3 November 2019 di Museum Lawang Sewu Semarang. Acara ini merupakan hasil kerja sama antara KPwBI Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, asosiasi, dan para pelaku usaha UMKM di Jawa Tengah dan mengangkat tema “Mendorong UMKM Jawa Tengah Siap Ekspor (*Go Global*) dan Siap Dunia Digital (*Go Digital*)”. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ekspor luar negeri sebagai langkah mengurangi defisit transaksi berjalan (*current account deficit/CAD*). Peluang untuk mengurangi defisit tersebut dilakukan dengan mendorong kinerja ekspor industri unggulan dan ekspor UMKM. Selain itu, masuknya dunia digital dalam berbagai aspek perekonomian juga belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM untuk meningkatkan akses pasar dan pembiayaan.

Dalam kegiatan yang dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tersebut menyajikan karya UMKM binaan KPwBI dan Dinas UMKM



Sumber: Bank Indonesia

Gambar. Salah Satu Produk UMKM Gayeng

Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah yang meliputi produk fashion (kain/batik/tenun), kerajinan, makanan dan kopi dengan kualitas ekspor. Rangkaian acara UMKM Gayeng meliputi acara Expo UMKM, Seminar, *Workshop*, *Fashion Show*, *Talkshow*, *Business Counseling*, *Business Matching*, Lomba, Hiburan, dan *Coffee Corner* yang dilaksanakan secara paralel.

Peningkatan ekspor UMKM dilakukan melalui proses kurasi produk sebelum pameran dilaksanakan, penyusunan katalog *premium product* dan *business matching* dengan *potential buyer* dan *aggregator*. Selanjutnya, katalog tersebut dikirimkan melalui beberapa KBRI, Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Luar Negeri, KADIN dan HIPMI. Kurasi produk dilakukan bekerjasama dengan kurator dari ID SEED (*Indonesia Diaspora SME-SMI Empowerment and Development*) kepada sekurang-kurangnya 150 UMKM se-Jateng. Dari proses kurasi yang mempertimbangkan aspek kualitas, kapasitas produksi serta potensi memenuhi kebutuhan pasar luar negeri, didapatkan 72 UMKM yang dipandang siap atau memiliki potensi ekspor. Agenda utama pada *business matching* adalah mempertemukan

SUPLEMEN II

Tabel 1. Workshop UMKM Gayeng

NO	WORKSHOP/MATERI	NARASUMBER	PESERTA
1.	World Market dan Perizinan Ekspor	1. Indonesia Diaspora SME-SMI <i>Export Empowerment & Development</i> (ID-SEED) 2. Bea Cukai	53 UMKM
2.	Kurasi Produk untuk Kurator Lokal	ID SEED	45 UMKM
3.	Tips n Trick Membuat Company Profile Berbasis Sustainability	1. Global Reporting Initiative 2. Blibli	57 UMKM
4.	How to Optimize Social Media	Influencer Medsos (Agnes Yi)	37 UMKM
5.	Starting Sustainable Startup: From Zero to Hero 4.0	Christhoper Farell (Kecilin.id)	53 UMKM
6.	Seminar "Fast Track UMKM Siap Ekspor Siap Digital"	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Halosis dan Blibli.com	108 UMKM

antara UMKM dengan *potential buyer* yang berasal dari Singapura (*Hao Mart dan Sample Store*), Perwakilan Agensi dari Prancis, Jepang, Spanyol dan Glexindo. Dari *business matching* tersebut telah ditandatangani 5 buah LOI (*Letter of Intent*) antara BISA (*Business Indonesia Singapore Association*) dengan:

- 1) DuCrijia Mush Shi (produk snack jamur)
- 2) Roro Kenes (produk tas kulit)
- 3) Batik Warna Alam Siputri (produk fashion batik)
- 4) Kreskros Bucket Bag (produk kerajinan tas daur ulang plastik)
- 5) Yuta (produk tepung mocaf)

mengenai ekspor dan pemanfaatan dunia digital melalui berbagai kegiatan antara lain *workshop*, seminar, *talkshow*, *business counseling*.

Selain untuk meningkatkan ekspor UMKM, kegiatan tersebut ditujukan juga bagi masyarakat luas agar dapat mengakses dan memperoleh informasi mengenai produk-produk unggulan ekspor Jawa Tengah, melalui kegiatan pameran UMKM, *fashion show* dan *coffee corner*. Dalam UMKM Gayeng 2019, terdapat 72 UMKM yang mengikuti pameran yang terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu: Area Fashion (kain,

batik, tenun, baju, topi, tas, dll) sebanyak 25 UMKM; Area *Craft* (hiasan kayu, logam, dll) sebanyak 8 UMKM; Area *Food* (makanan jadi/olahan) sebanyak 21 UMKM; Area *Coffee* (kopi specialty Jawa Tengah) sebanyak 18 UMKM. Selain itu terdapat pula 9 UMKM kuliner yang dapat dinikmati langsung oleh pengunjung UMKM Gayeng 2019. Selama 3 hari penyelenggaraan kegiatan, jumlah pengunjung yang tercatat masuk ke area Lawang Sewu mencapai 17.054 orang, dan diperkirakan sebanyak 75%-nya mengunjungi area Expo UMKM. Jumlah transaksi yang terjadi pada UMKM Gayeng 2019 mencapai Rp609.648.100,- dengan rincian pembelian langsung sebesar Rp424.570.100,- dan pembelian tidak langsung (pesanan) sebesar Rp185.078.000,-. Dari transaksi langsung yang terjadi di area pameran, sebanyak 41,4% merupakan transaksi nontunai.

Pada saat pembukaan UMKM Gayeng 2019, dilakukan pula peragaan busana karya Didiet Maulana berkolaborasi dengan 19 UMKM pengrajin batik Lasem dengan tema "*Wonderful Batik Lasem*". Pengrajin tersebut tergabung ke dalam kelompok UMKM binaan KPw BI Provinsi Jateng. Pada kesempatan tersebut, dipamerkan 25 karya rancangan busana batik untuk pria dan wanita. Kegiatan ini bertujuan untuk memperlihatkan

SUPLEMEN II



Sumber: Bank Indonesia

Gambar. Fashion Show Kesengsem Lasem



Sumber: Bank Indonesia

Gambar. Konferensi Pers UMKM Gayeng

keaktivitas Batik Tiga Negeri yang dimiliki oleh pengrajin batik Lasem, Jawa Tengah.

Melihat animo UMKM dan masyarakat dengan adanya kegiatan tersebut, UMKM Gayeng akan dilakukan kembali pada tahun 2020. Untuk lebih menjangkau UMKM yang berada pada 35 kabupaten/kota se-Jateng maka kurasi produk akan dilakukan lebih awal dan dilakukan di beberapa karesidenan.





PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Perkembangan indikator sistem pembayaran di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 menunjukkan peningkatan kinerja, baik dari sisi volume maupun nilainya

- Nilai transaksi melalui SKNBI mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya. Nilai transaksi melalui SKNBI masih melanjutkan tren peningkatan dengan tumbuh 9,55% (qtq). Secara tahunan, penyelesaian nominal transaksi kliring di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya - 9,12% (yoy).
- Aliran uang di Jawa Tengah mencatatkan posisi *net outflow* sebesar Rp2,24 triliun, berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow* sebesar Rp6,39 triliun.
- Untuk memperluas implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), Bank Indonesia mendorong penggunaan instrumen nontunai *Quick Response Indonesian Code* (QRIS).
- Perkembangan cara transaksi pembayaran ke arah non tunai berbasis elektronik tidak terlepas dari perkembangan teknologi.



5.1. PERKEMBANGAN TRANSAKSI SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

Penyelesaian transaksi ritel di Jawa Tengah yang diproses melalui SKNBI pada triwulan IV 2019 mengalami peningkatan, baik secara triwulanan maupun tahunan. Nominal transaksi perputaran kliring pada triwulan IV 2019 tercatat sebesar Rp43,35 triliun, atau lebih tinggi 9,55% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi volume, perputaran kliring pada triwulan IV laporan meningkat 8,52% (qtq), atau setara dengan 1.02 juta DKE. Secara tahunan, penyelesaian nominal transaksi kliring di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat kontraksi sebesar 4,90% (yoy). Peningkatan volume perputaran kliring tercatat tumbuh sebesar 1,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu (-9,35% yoy).

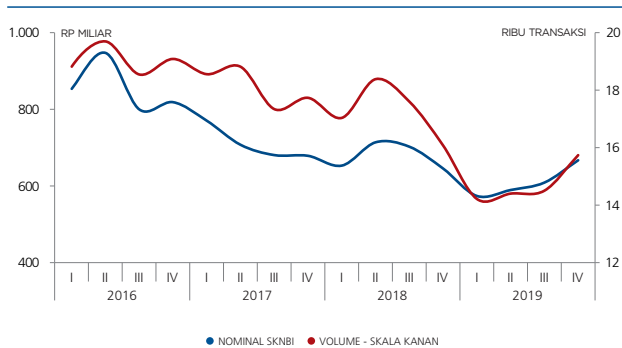
Dengan perkembangan tersebut, SKNBI di Jawa Tengah masih mencatatkan kinerja transaksi yang relatif sama dibandingkan transaksi keseluruhan nasional, dengan pangsa volume sebesar 2,33% dibandingkan nasional (43.85 juta DKE), serta pangsa sebesar 3,69% dibandingkan keseluruhan nilai nasional (Rp1.175,57 triliun).

Perkembangan rata-rata harian transaksi kliring secara triwulanan juga tercatat mengalami peningkatan baik dari sisi nominal maupun volume. Perputaran kliring di Jawa

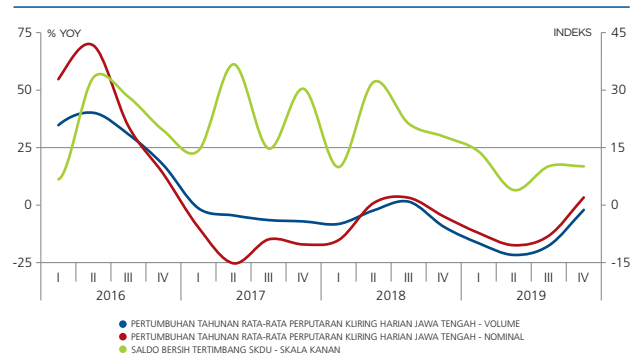
Tengah memproses rata-rata 15.737 DKE per hari, atau lebih tinggi 8,52% (qtq) dibandingkan rata-rata harian pada triwulan sebelumnya yang memproses 14.502 DKE. Dari sisi nominal, nilai rata-rata harian perputaran kliring sebesar Rp666,99 miliar, tercatat lebih tinggi 9,55% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang memproses transaksi dengan nilai Rp608,86 miliar per hari. Peningkatan aktivitas kliring ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi terutama pada sektor perdagangan, hotel & restoran dan sektor industri pengolahan yang pulih pada triwulan IV 2019. Selain itu, peningkatan aktivitas kliring juga dipengaruhi oleh peningkatan transfer dana masyarakat melalui SKNBI.

Terdapat 10 Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD) di Jawa Tengah, yaitu KPWD Bank Indonesia (Semarang, Solo, Purwokerto, dan Tegal) serta KPWD selain BI (Kudus, Magelang, Salatiga, Purworejo, Pekalongan, dan Cilacap). Pangsa volume transaksi KPWD selain Bank Indonesia pada periode Triwulan IV 2019 adalah sebesar 14,70% dari jumlah seluruh transaksi kliring di Jawa Tengah atau memproses 136.726 DKE. Dari sisi nominal, pangsa nilai transaksi yang diproses oleh KPWD selain BI sebesar 17,99% dari seluruh transaksi kliring di Jawa Tengah atau mencapai nilai Rp6,71 triliun.

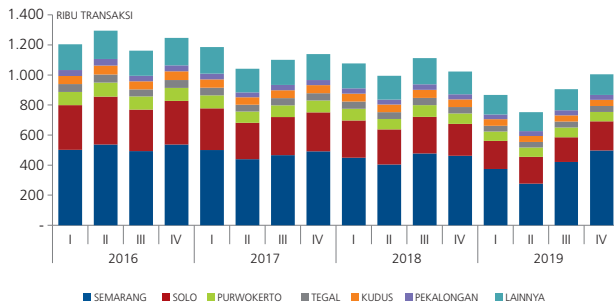
KPWD Kota Semarang mencatatkan transaksi kliring terbesar di Jawa Tengah dengan pangsa volume dan nominal kliring sebesar masing-masing 53,48% dan



Grafik 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di Jawa Tengah



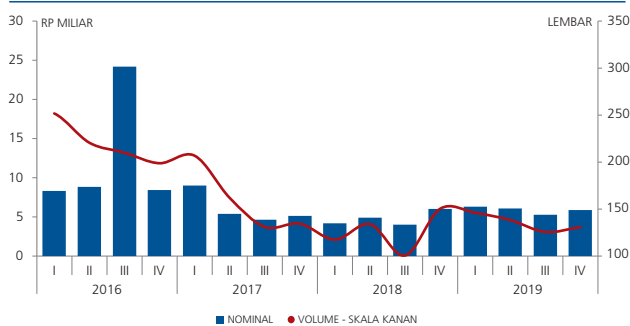
Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan IPR SPE



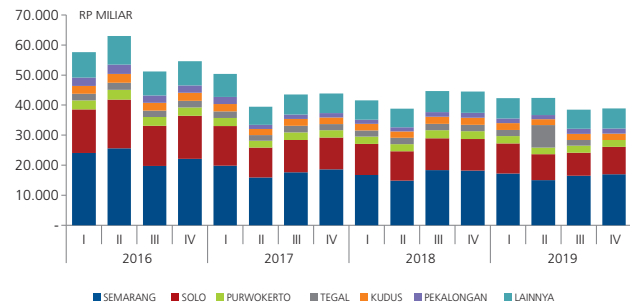
Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman

45,96%. Kota selanjutnya yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perputaran kliring Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dengan pangsa volume dan nominal masing-masing sebesar 20,93% dan 24,80%, sedangkan kota-kota lain hanya memberikan kontribusi di bawah 10%.

Transaksi kliring debit pengembalian dengan instrumen pembayaran berupa cek dan bilyet giro (BG) kosong mengalami peningkatan dari sisi volume dan nominalnya. Rata-rata volume cek dan BG kosong yang dikliringkan per hari pada triwulan laporan meningkat 4,09% (qtq) menjadi 130 lembar per hari dari triwulan sebelumnya sebesar 125 lembar per hari. Selanjutnya, rata-rata nilai penarikan cek dan BG kosong meningkat 11,21% (qtq) menjadi sebesar Rp5,86 miliar per hari pada triwulan laporan. Walaupun meningkat dibandingkan triwulan III 2019 lalu, transaksi kliring debit pengembalian cek dan bilyet giro kosong ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2018 lalu, baik dari sisi volume (-12,96%; yoy) maupun nominalnya (-2,60%; yoy).



Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah



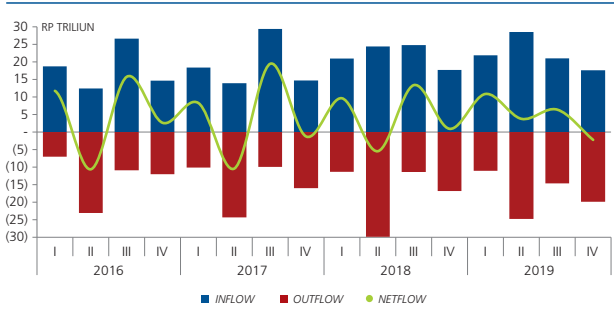
Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman

5.2. PERKEMBANGAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 mencatatkan posisi *net outflow*. Perkembangan aliran uang kartal ini berbalik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan *net inflow*.

Posisi *net outflow* tercatat sebesar Rp2,24 triliun, berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow* sebesar Rp6,39 triliun. Pada triwulan laporan, posisi aliran uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia (*inflow*) mengalami kontraksi sebesar 16,14% (qtq) menjadi sebesar Rp17,63 triliun dari triwulan sebelumnya sebesar Rp21,02 triliun. Pada periode yang sama, aliran uang kartal dari Bank Indonesia (*outflow*) mengalami peningkatan signifikan sebesar 35,77% (qtq) dari triwulan sebelumnya sebesar Rp14,63 triliun menjadi Rp19,86 triliun.

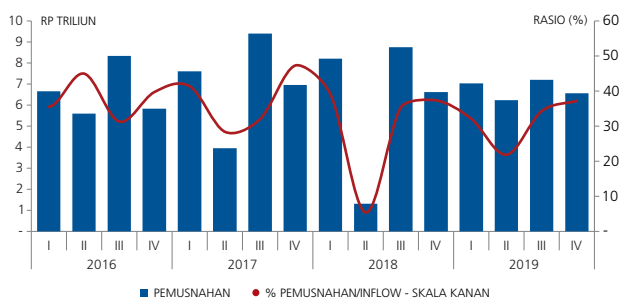
Secara tahunan, *inflow* uang kartal pada triwulan IV 2019 tercatat kontraksi 0,58% (yoy), lebih rendah dibandingkan *inflow* pada triwulan IV 2018 yang tercatat tumbuh 20,48% (yoy). Sementara itu, posisi *outflow* pada triwulan IV 2019 tercatat tumbuh signifikan sebesar 18,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,17% (yoy). Secara spasial, aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Semarang, Solo, dan Purwokerto mencatat *net inflow*. Sementara itu, posisi aliran kas melalui Bank Indonesia Tegal mencatat *net outflow*.



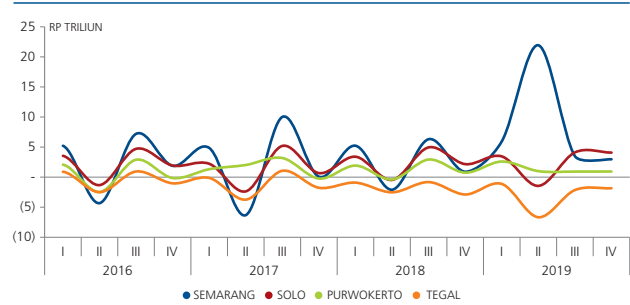
Grafik 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah

Bank Indonesia secara rutin melakukan kegiatan penarikan uang Rupiah yang tidak layak edar dari peredaran, pengolahan uang Rupiah, serta penggantian dengan uang rupiah layak edar, sebagai bentuk penerapan *clean money policy*. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke masyarakat. Pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar di Jawa Tengah pada triwulan laporan sebesar 37,23% dari nilai *inflow*. Sejalan dengan perkembangan posisi *inflow*, nilai pemusnahan uang Rupiah pada triwulan IV 2019 mengalami penurunan sebesar 8,58% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Bank Indonesia juga melakukan layanan kas yang dilaksanakan di dalam kantor maupun di luar kantor. Layanan kas bagi masyarakat di kantor Bank Indonesia dibuka untuk melayani penukaran uang rusak, uang cacat, serta uang yang sudah dicabut dari peredaran. Sementara layanan kas di luar kantor diwujudkan dengan program kas keliling. Kegiatan kas keliling tersebut secara rutin dilaksanakan di dalam kota kedudukan BI hingga



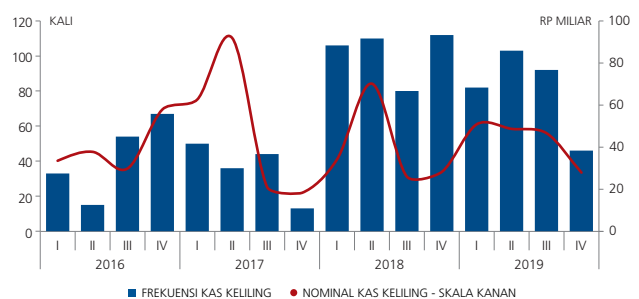
Grafik 5.8 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar



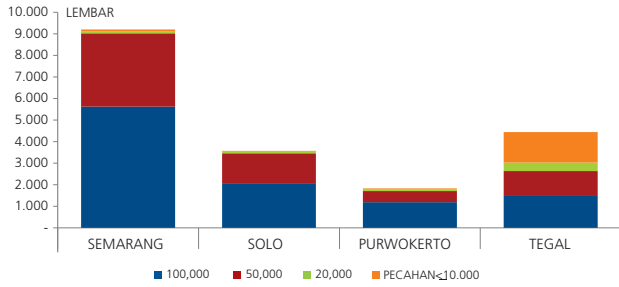
Grafik 5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah

menjangkau daerah terpencil. Kas keliling dapat melayani penukaran uang ke pecahan yang lebih kecil serta uang layak edar. Pada triwulan IV 2019, kantor BI di Jawa Tengah melakukan kegiatan kas keliling sebanyak 46 kali, mengalami penurunan 50% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak 92 kali. Selama kegiatan kas keliling di triwulan pelaporan, masyarakat menukarkan uang Rupiah sebesar Rp27,87 miliar, menurun 40,21% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp46,62 miliar.

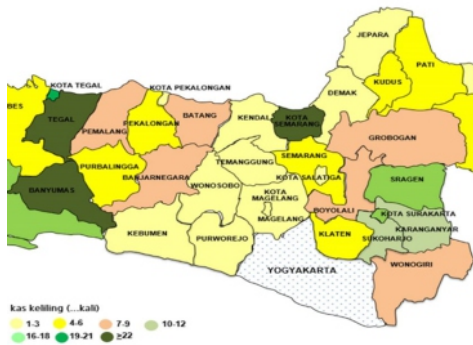
Jumlah uang palsu yang ditemukan di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 sebanyak 1.227 lembar. Jumlah ini mengalami penurunan 73,5% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan temuan uang palsu sebanyak 4.638 lembar. Apabila dibedakan menurut pecahannya, pecahan yang paling banyak dipalsukan adalah Rp100.000 sebanyak 793 lembar (64,4%), diikuti oleh pecahan Rp50.000 sebanyak 401 lembar (32,7%). Sedangkan pecahan lainnya memiliki pangsa masing-masing pecahan kurang dari 2%.



Grafik 5.9 Frekuensi dan Nominal Kas Keliling



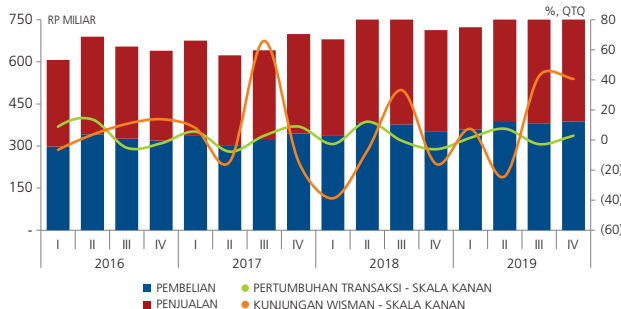
Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah



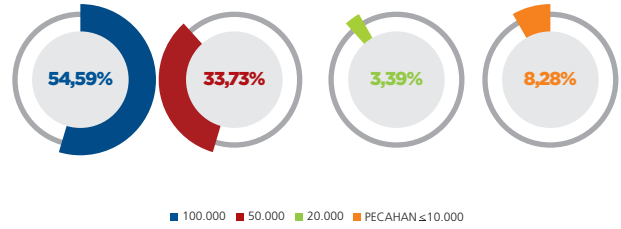
Gambar 5.1 Peta Jangkauan Layanan Kas Keliling di Jawa Tengah

5.3. PERKEMBANGAN TRANSAKSI PENUKARAN VALUTA ASING

Transaksi menggunakan Uang Kertas Asing (UKA) di KUPVA BB mengalami peningkatan secara triwulanan maupun tahunan. Nilai transaksi penukaran valuta asing melalui KUPVA BB berizin di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 mencapai Rp778,27 miliar, lebih tinggi 2,90% (qtq) dibandingkan nilai transaksi triwulan sebelumnya sebesar Rp756,33 miliar. Apabila dibedakan berdasarkan jenis transaksi, transaksi pembelian valuta asing melalui KUPVA Bukan Bank mencapai



Grafik 5.12 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan Kunjungan Wisatawan Asing di Jawa Tengah

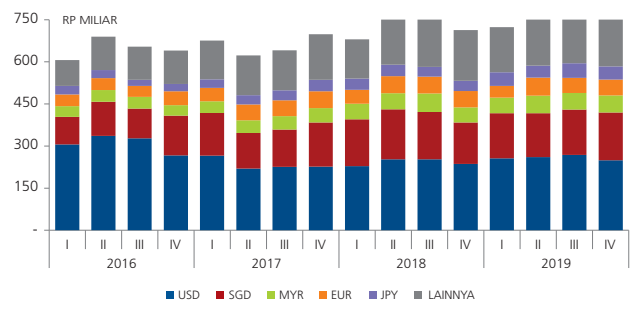


Grafik 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan

Rp387,66 miliar, meningkat 2,28% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp379,04 miliar. Sementara itu, transaksi penjualan tercatat mengalami peningkatan sebesar 3,53% (qtq) menjadi Rp390,61 miliar.

Sejalan dengan pertumbuhan triwulanan, pertumbuhan tahunan transaksi penukaran valuta asing juga tercatat meningkat 9,14% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan tahunan transaksi pembelian dan penjualan juga mengalami peningkatan sebesar 9.83% (yoy) dan 8,46% (yoy). Berdasarkan mata uang yang diperdagangkan, Dolar Amerika Serikat (USD) masih mendominasi transaksi pada triwulan IV 2019 dengan pangsa sebesar 32,03%, yang diikuti oleh Dolar Singapura (SGD, 21,94%), Ringgit Malaysia (MYR, 7,78%), Yen Euro (EUR, 7,22%), dan Jepang (JPY, 6,09%). Sementara transaksi mata uang lainnya untuk 44 jenis valuta asing memiliki pangsa 24,95%.

Penyelenggaraan KUPVA BB berizin diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pasar keuangan terutama pasar valuta asing domestik. Di Jawa Tengah terdapat 45 penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing



Grafik 5.13 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA Bukan Bank di Jawa Tengah

Bukan Bank (KUPVA BB) yang memiliki izin dari Bank Indonesia. Dari jumlah tersebut, 26 KUPVA (57,78%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah, 10 KUPVA BB (22,22%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Solo, 6 KUPVA BB (13,33%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Purwokerto, dan 3 KUPVA BB (6,67%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Tegal.

5.4. PERKEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI DAN KEUANGAN INKLUSIF

Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran terus mendorong penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) melalui penggunaan instrumen nontunai *Quick Response Indonesian Code (QRIS)*.

Perkembangan cara transaksi pembayaran ke arah non tunai berbasis elektronik tidak terlepas dari perkembangan teknologi, khususnya penetrasi internet dan telepon seluler di masyarakat. Saat ini, masyarakat di daerah pelosok dapat dengan mudah melakukan transaksi keuangan menggunakan telepon seluler melalui aplikasi *mobile banking*, dompet elektronik, dan *e-commerce*.

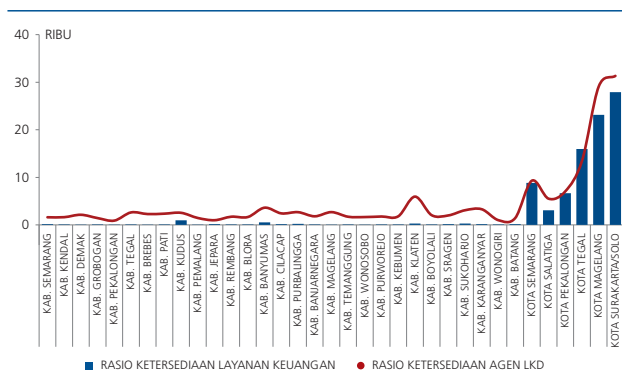
Salah satu cara pembayaran adalah dengan menggunakan QR Code yang dapat dipindai (scan) melalui aplikasi dompet elektronik PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) di telepon seluler dan melalui aplikasi *mobile banking* dengan fitur scan QR Code. *Quick Response Code* atau disingkat QR Code merupakan serangkaian kode yang memuat data/informasi antara lain mengenai identitas pedagang/ pengguna, nominal pembayaran, dan/atau mata uang yang dapat dibaca dengan alat tertentu dalam rangka transaksi pembayaran.

Bagi pedagang dan UMKM, penggunaan QR Code merupakan pilihan cara pembayaran dengan biaya investasi yang efisien karena pedagang cukup memasang *sticker* QR Code (statis) yang akan dipindai (scan) oleh pelanggan melalui telepon seluler saat bertransaksi menggunakan aplikasi PJSP tertentu.

Pada triwulan IV 2019, telah dilakukan peluncuran pembayaran digital menggunakan QRIS di Pasar Peterongan. Sedikitnya terdapat 65 *merchant*/pedagang yang telah bergabung untuk menerima transaksi pembayaran non tunai menggunakan QRIS. Peluncuran tersebut merupakan hasil kerjasama antara Bank Indonesia dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang bersama salah satu PJSP yang ada di Indonesia. Dengan hadirnya QRIS, mekanisme pembayaran di pedagang Pasar Peterongan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, sementara itu bagi pengelola pasar, kehadiran QRIS juga menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan pemantauan transaksi yang terjadi di pasar.

Perluasan jangkauan layanan keuangan pada masyarakat terus didorong melalui penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD). Berdasarkan rasio ketersediaan layanan keuangan dibandingkan 100.000 penduduk dewasa di masing-masing kabupaten/kota Jawa Tengah, daerah yang penduduknya mendapat layanan keuangan melalui kantor perbankan, ATM, dan agen mitra bank, dalam jumlah tertinggi adalah Kabupaten Bora (459,3) diikuti oleh, Kota Magelang dengan nilai rasio 450,0 dan Kabupaten Klaten (434,2). Daerah dengan ketersediaan layanan keuangan yang relatif rendah bagi penduduk dewasa adalah Kabupaten Jepara (116,2).

Apabila ditinjau dari luas wilayah, rasio ketersediaan layanan keuangan dibandingkan 1.000 km² luas wilayah di masing-masing kabupaten/kota Jawa Tengah, daerah



Grafik 5.14 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengah dibandingkan 1.000 km² Luas Wilayah

yang memiliki ketersediaan layanan keuangan tertinggi dibandingkan luas wilayah adalah Kota Solo. Sementara daerah yang memiliki nilai rasio terendah adalah Kabupaten Pekalongan. Aspek ini perlu menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan dan industri keuangan agar dapat meningkatkan jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil.



KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah membaik pada Agustus 2019 di mana jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan yang diiringi ketersediaan lapangan kerja yang baik.

- Jumlah penduduk usia kerja pada periode Agustus 2019 meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Namun, peningkatan tersebut diiringi dengan tingkat pengangguran terbuka yang menurun.
- Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan III 2019 menunjukkan peningkatan dari triwulan II 2019 dan juga dari triwulan yang sama tahun 2018.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif meningkat, disumbang oleh perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan maupun standar hidup.
- Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.



6.1. KETENAGAKERJAAN

Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Tengah pada periode Agustus 2019 meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018. Indikator ini mencerminkan potensi ketersediaan tenaga kerja. Pada Agustus 2019 jumlah penduduk usia kerja Jawa Tengah sebesar 26,61 juta orang, atau meningkat 1,03% (yoy) dibandingkan dengan Agustus 2018 yang berjumlah 26,34 juta orang. Kondisi ini mencerminkan potensi tenaga kerja di Jawa Tengah dalam hal kuantitas penduduk usia produktif.

Jumlah penduduk usia produktif yang menjadi angkatan kerja juga mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Jumlah angkatan kerja meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 18,06 juta orang menjadi sebanyak 18,26 juta orang atau tumbuh 1,11% (yoy). Pertumbuhan angkatan kerja ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja pada Februari 2019 yang tumbuh sebesar 1,97% (yoy). Namun lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja pada Agustus 2018 yang tumbuh 0,28% (yoy). Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah memiliki porsi sebesar 13,67% dari total angkatan kerja di tingkat nasional yaitu sebanyak 133,56 juta orang.

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2019 sebanyak 17,44 juta orang atau 95,51% dari total angkatan kerja. Jumlah pekerja ini tumbuh 1,1% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 17,25 juta orang. Sementara itu, sebesar 4,49% atau 0,82 juta orang angkatan kerja tergolong dalam kategori pengangguran.

Persentase ini relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi di tingkat nasional, di mana 94,72% angkatan kerja tergolong bekerja dan 5,28% merupakan pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode laporan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. TPAK merupakan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Pada triwulan laporan tercatat sebesar 68,62%, atau naik dibandingkan Agustus 2018 yang tercatat sebesar 68,56%. Kondisi TPAK Jawa Tengah ini lebih tinggi dari tingkat nasional yang tercatat sebesar 67,49%.

Struktur tenaga kerja pada lapangan usaha di Jawa Tengah secara umum tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Meskipun demikian, sektor ini mengalami penurunan jumlah pekerja dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Pada Agustus 2019, lapangan usaha pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 4,09 juta orang atau 23,71% dari total penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Angka ini menurun dibandingkan Agustus 2018 yang mencatatkan tenaga kerja di sektor ini sebanyak 4,20 juta orang atau 24,35% dari total penduduk bekerja.

Jumlah penduduk yang bekerja di lapangan usaha pertanian pada periode Agustus 2019 mengalami penurunan sebesar 110 ribu orang atau -2,62% (yoy) dibandingkan Agustus 2018. Tren penurunan tenaga kerja

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)

INDIKATOR	2016		2017		2018		2019	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
ANGKATAN KERJA	17,91	17,31	18,20	18,01	18,23	18,06	18,59	18,26
BEKERJA	17,16	16,51	17,44	17,19	17,46	17,25	17,81	17,44
PENGANGGURAN	0,75	0,80	0,76	0,82	0,77	0,81	0,78	0,82
BUKAN ANGKATAN KERJA	7,72	8,47	7,72	8,05	7,97	8,28	7,89	8,35
PENDUDUK USIA KERJA	25,63	25,78	25,92	26,06	26,2	26,34	26,48	26,61
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) %	69,89	67,15	70,20	69,11	69,58	68,56	70,21	68,62
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)%	4,20	4,63	4,15	4,57	4,23	4,51	4,22	4,49
PEKERJA TIDAK PENUH	4,97	4,22	4,73	4,34	4,90	4,67	5,03	4,65
SETENGAH PENGANGGUR	1,23	1,02	1,03	1,10	1,06	0,90	1,06	0,94
PARUH WAKTU	3,74	3,20	3,69	3,24	3,84	3,77	3,97	3,72

Sumber : BPS Jawa Tengah

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)

SEKTOR EKONOMI	2016		2017		2018		2019	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
PERTANIAN	5,16	5,07	4,97	4,32	4,76	4,2	4,67	4,09
INDUSTRI	3,22	3,25	3,74	3,68	3,75	3,76	3,95	3,89
KONSTRUKSI	1,28	1,43	1,25	1,49	1,23	1,51	1,28	1,52
PERDAGANGAN	4,11	3,71	3,2	3,18	3,26	3,22	3,35	3,31
TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	0,55	0,55	0,5	0,56	0,53	0,57	0,53	0,57
KEUANGAN	0,3	0,3	0,25	0,23	0,22	0,24	0,21	0,23
LAINNYA*	2,54	2,2	3,53	3,73	3,71	3,75	3,82	3,83
TOTAL	17,16	16,51	17,44	17,19	17,46	17,25	17,81	17,44

* Lapangan pekerjaan utama lainnya terdiri dari sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Transportasi, Pergudangan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate dan Usaha Persewaan
Sumber : BPS Jawa Tengah

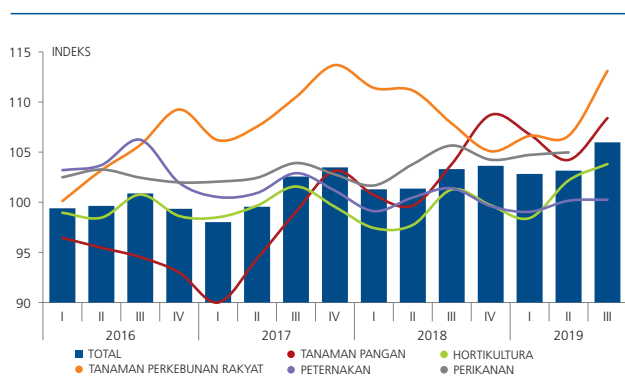
pertanian ini telah berlangsung selama 1 (satu) dekade terakhir baik secara nasional maupun di kawasan Jawa. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tersebut antara lain adanya pergeseran musim panen raya, alih fungsi lahan, pertumbuhan sektor industri yang mendorong peralihan profesi, tingginya kesenjangan kesejahteraan pedesaan dan perkotaan, serta rendahnya insentif untuk bekerja di lapangan pertanian dibandingkan lapangan usaha lain khususnya jasa dan industri.

Imbal hasil lapangan usaha pertanian dicerminkan oleh Nilai Tukar Petani (NTP). Indikator NTP pada triwulan III 2019 menunjukkan sedikit kenaikan setelah pada triwulan sebelumnya pertumbuhannya relatif tipis. Hal ini ditengarai merupakan pengaruh kemarau panjang di Jawa Tengah sehingga produksi yang terbatas mendorong peningkatan harga jual produksi. Tren NTP ini mengalami arah yang berbalik sejak triwulan III 2017 sampai dengan triwulan III 2019 Secara umum NTP selalu mencatatkan indeks di atas angka 100. Kenaikan NTP pada triwulan III

2019 disumbang oleh kenaikan hampir seluruh subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan sedangkan subsektor perikanan relatif stabil.

Sementara itu, jumlah tenaga kerja di lapangan usaha industri pengolahan menempati posisi kedua dengan menyerap 3,89 juta orang atau 22,55% dari penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Jumlah pekerja lapangan usaha industri pengolahan ini tumbuh 3,46% (yoy). Adapun lapangan usaha perdagangan menempati posisi ketiga sebesar 3,31 juta orang atau menyerap 19,19 % penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Lapangan usaha perdagangan mengalami peningkatan pertumbuhan jumlah pekerja sebesar 2,80% (yoy). Peningkatan jumlah pekerja di lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan usaha pertanian yang mengalami penurunan jumlah pekerja. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi fenomena relokasi sejumlah perusahaan manufaktur ke Jawa Tengah maupun adanya ekspansi perusahaan di lapangan usaha industri pengolahan yang mendorong peralihan tenaga kerja, dari yang semula bekerja di lapangan usaha pertanian beralih ke lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan.

Apabila ditinjau dari status pekerjaan utama, pada Agustus 2019 tenaga kerja dominan di Jawa Tengah adalah kelompok orang yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Jumlah kelompok orang yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mencapai 6,69 juta orang, meningkat dibandingkan dengan Agustus 2018 yang tercatat sebesar 6,12 juta orang. Apabila jumlah kelompok tersebut ditambahkan dengan



Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik 6.1 Perkembangan NTP Subsektor Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan dalam 4 Tahun Terakhir

kelompok berusaha dibantu buruh tetap, maka akan membentuk proksi kelompok pekerja sektor formal. Pada Agustus 2019 ini, jumlah pekerja sektor formal Jawa Tengah sebanyak 7,29 juta orang atau 41,80% dari jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah pekerja sektor formal tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 6,74 juta orang. Sementara itu, jumlah pekerja di sektor informal justru mengalami penurunan. Pada Agustus 2019, pekerja informal tercatat sebanyak 10,15 juta orang atau 58,20% dari jumlah penduduk bekerja, mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus 2018 yang tercatat sebanyak 10,51 juta orang (60,93%).

Jumlah pekerja waktu penuh Jawa Tengah pada Agustus 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Jumlah kelompok pekerja ini tercatat sebanyak 12,79 juta orang atau mengalami peningkatan sebesar 1,75% (yoy) dibandingkan Agustus 2018 yang tercatat sebanyak 12,57 juta orang. Rasio utilisasi yang tinggi tercermin dari rasio pekerja berwaktu penuh (*full time worker*)⁶ sebesar 73,34% terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah.

Sementara itu, jumlah pekerja berwaktu tidak penuh mengalami penurunan, yaitu dari 4,67 juta orang pada

periode Agustus 2018 menjadi 4,65 juta orang pada periode laporan. Dengan penurunan kuantitas tersebut, proporsi pekerja berwaktu tidak penuh terhadap tenaga kerja di Jawa Tengah juga mengalami penurunan dari sebesar 27,07% pada Agustus 2018 menjadi 26,66% pada Agustus 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa para tenaga kerja berupaya mencari pekerjaan dengan penghasilan yang lebih stabil dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Peningkatan kuantitas tenaga kerja di Jawa Tengah relatif turut diimbangi oleh peningkatan kualitas. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan Prioritas Nasional Pembangunan Pendidikan yang menargetkan tingkat pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun adalah 8,8 tahun atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan demikian, penetapan standar indikator kualitas tenaga kerja mengacu pada target Pembangunan Pendidikan tersebut, yaitu tingkat pendidikan SMP.

Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Tengah dengan tingkat pendidikan SMP ke atas pada Agustus 2019 tercatat mencapai 53,39% dari jumlah tenaga kerja atau

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (juta orang)

STATUS PEKERJAAN UTAMA	2016		2017		2018		2019	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
BERUSAHA SENDIRI	2,86	2,63	3,07	3,30	3,21	3,21	3,35	3,31
BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP	3,35	3,09	3,23	2,77	3,00	2,96	3,16	2,79
BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP	0,54	0,50	0,59	0,51	0,63	0,62	0,60	0,60
BURUH/KARYAWAN/PEGAWAI	5,89	5,75	6,05	6,32	6,35	6,12	6,48	6,69
PEKERJA BEBAS DI PERTANIAN	0,85	0,86	0,92	0,83	0,72	0,73	0,69	0,74
PEKERJA BEBAS DI NON PERTANIAN	1,34	1,43	1,14	1,56	1,23	1,51	1,15	1,37
PEKERJA TAK DIBAYAR	2,32	2,25	2,43	1,90	2,32	2,11	2,38	1,94
TOTAL	17,15	16,51	17,44	17,19	17,46	17,25	17,81	17,44

Sumber : BPS Jawa Tengah

Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)

PENDUDUK YANG BEKERJA	2016		2017		2018		2019	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
PEKERJA TIDAK PENUH	4,97	4,22	4,73	4,34	4,90	4,67	5,03	4,65
SETENGAH PENGANGGUR	1,23	1,02	1,03	1,10	1,07	0,90	1,06	0,94
PEKERJA PARUH WAKTU	3,74	3,2	3,69	3,24	3,84	3,77	3,97	3,72
PEKERJA PENUH	12,19	12,29	12,71	12,85	12,56	12,57	12,77	12,79
TOTAL	17,16	16,51	17,44	17,19	17,46	17,25	17,81	17,44

Sumber : BPS Jawa Tengah

6. Pekerja berwaktu penuh (*full time worker*) yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu.

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)

PENDIDIKAN	2016		2017		2018		2019	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
SD KE BAWAH	8,92	8,44	8,69	8,40	8,49	8,25	8,50	8,03
SMP	3,28	3,29	3,47	3,35	3,59	3,38	3,46	3,47
SMA UMUM	1,9	1,78	1,97	2,11	1,95	2,17	2,15	2,23
SMA KEJURUAN	1,64	1,71	1,85	1,82	2,03	1,93	2,08	2,15
DIV/III DAN UNIVERSITAS	0,36	0,35	0,35	0,39	0,34	0,39	0,38	0,39
UNIVERSITAS	1,06	0,93	1,12	1,12	1,06	1,12	1,24	1,17
TOTAL	17,16	16,5	17,44	17,19	17,46	17,25	17,81	17,44

Sumber : BPS Jawa Tengah

sebanyak 9,41 juta orang, meningkat sebesar 4,67% (yoy) dibandingkan Agustus 2018 yang tercatat sebanyak 8,99 juta orang. Peningkatan kualitas pendidikan tenaga kerja di Jawa Tengah tersebut utamanya disumbang oleh pertumbuhan tenaga kerja terampil dari tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas/Umum (SMA/SMU) yang tercatat sebesar 2,23 juta orang atau meningkat 2,76% (yoy) dibandingkan Agustus 2018 lalu. Perbaikan kualitas dan kuantitas tenaga terampil ini diharapkan dapat memenuhi permintaan tenaga kerja di industri pengolahan, mengingat sejak 2015 terjadi tren relokasi usaha dari Jawa Barat dan Banten menuju Jawa Tengah.

Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah pada Agustus 2019 tercatat sebanyak 8,03 juta orang atau menurun dibandingkan Agustus 2018 yang tercatat sebanyak 8,25 juta orang. Begitu pula secara proporsi yang mengalami penurunan dari sekitar 47,8% terhadap jumlah tenaga kerja pada Agustus 2018 menjadi 46,0% pada Agustus 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan jumlah tenaga kerja dengan keterampilan rendah di Jawa Tengah menunjukkan tren yang semakin menurun seiring dengan penurunan angka partisipasi kerja angkatan tua.

6.2. PENGANGGURAN

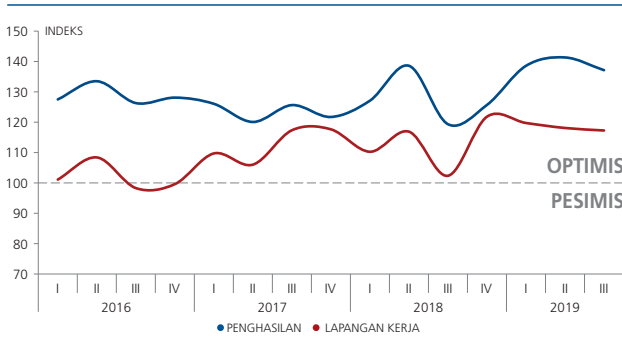
Angka pengangguran mengalami sedikit peningkatan pada Agustus 2019 dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau pengangguran pada Agustus 2019 tercatat sebanyak 0,82 juta orang, atau bertambah 1,23% (yoy) dibandingkan kondisi Agustus 2018 yang berjumlah

0,81 juta orang. Walaupun terjadi peningkatan jumlah pengangguran, namun peningkatan relatif sangat sedikit. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa terjadi penyerapan tenaga siap kerja di Jawa Tengah yang lebih baik sejalan dengan pertumbuhan lapangan kerja. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Jawa Tengah menyumbang 11,63% dari total angka pengangguran nasional yang berjumlah 7,05 juta orang.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)⁷ Jawa Tengah mengalami penurunan. TPT Jawa Tengah terpantau menurun dari 4,51% pada Agustus 2018 menjadi 4,49% pada Agustus 2019. Angka TPT Jawa Tengah ini masih lebih baik dibandingkan angka TPT nasional yang sebesar 5,28%. Berdasarkan lokasi tempat tinggal, TPT pada Agustus 2019 untuk wilayah perkotaan (5,14%) cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di wilayah perdesaan (3,82%). Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja terlihat cukup berhasil dalam menekan tingkat pengangguran. Hal ini juga didukung oleh kinerja positif ekonomi Jawa Tengah di sepanjang tahun 2019.

Perbaikan berbagai indikator tenaga kerja ini sejalan dengan hasil Survei Konsumen pada aspek tenaga kerja. Konsumen memandang kondisi ketenagakerjaan Jawa Tengah triwulan III 2019 lebih baik dibandingkan triwulan yang sama tahun 2018. Hal tersebut tercermin dari tingkat keyakinan terhadap tingkat penghasilan saat ini. Konsumen menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi faktor pendorong komponen penghasilan mengalami peningkatan signifikan.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

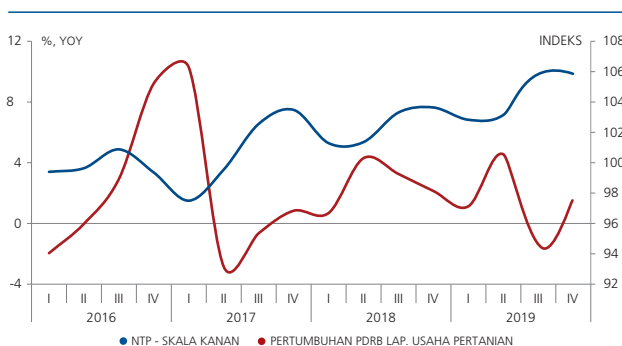


Grafik 6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat Ini

Selain itu, hasil survei konsumen memperkirakan bahwa konsumen masih optimis terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan dan kegiatan usaha di Jawa Tengah untuk jangka waktu enam bulan yang akan datang. Indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja tercatat sebesar 137,19 pada triwulan III 2019, masih optimis (di atas 100) meski di bawah triwulan sebelumnya sebesar 139,77. Begitu pula dengan ekspektasi atas kondisi penghasilan untuk periode enam bulan mendatang mengalami perlambatan dari 157,11 menjadi 156,74.

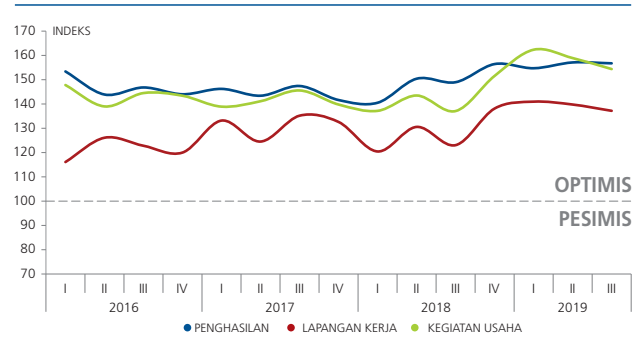
5.3. NILAI TUKAR PETANI

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2019 menunjukkan kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya dan lebih baik dibandingkan triwulan yang sama tahun 2018. NTP pada triwulan laporan tercatat sebesar 106,00 meningkat dari triwulan III 2019 sebesar 105,98 serta lebih baik dari periode yang sama tahun lalu sebesar 103,64. Sejak tahun 2018, NTP Jawa Tengah selalu mencatatkan perbaikan dengan indeks di atas 100, yang mencerminkan penghasilan agregat yang diterima petani masih lebih tinggi dibandingkan pengeluaran yang dilakukan.



Grafik 6.4 NTP dan PDRB Lapangan usaha Pertanian

Sumber: BPS Jawa Tengah

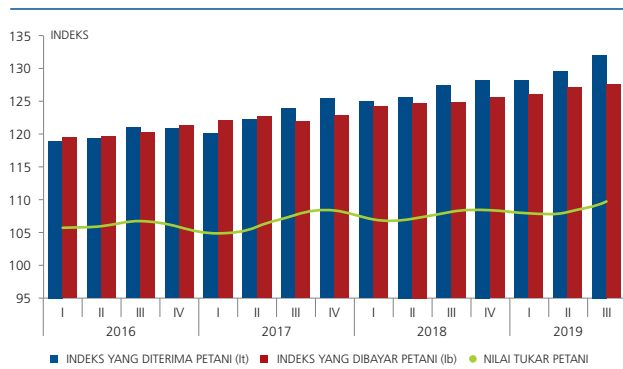


Grafik 6.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang

Kenaikan NTP ini terutama ditunjang penerimaan yang diterima petani selama triwulan IV 2019. Kondisi kemarau panjang mendorong produksi pertanian mengalami penurunan sehingga harga jual menjadi meningkat. Hal ini menyebabkan nilai yang diterima petani menjadi lebih besar dibanding nilai yang dikeluarkan oleh petani. Secara umum lapangan usaha pertanian mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,56% (yoy); membaik dari triwulan III 2019 yang mencatatkan kontraksi 1,55% (yoy).

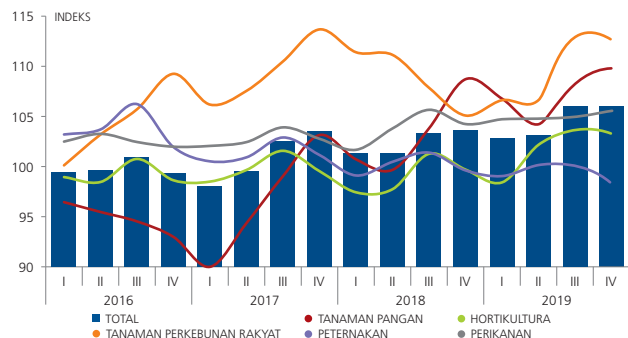
Kenaikan NTP Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 masih didorong kenaikan penerimaan petani yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Penerimaan petani yang dicerminkan oleh indeks yang diterima petani (IT) mencatatkan kenaikan dari sebesar 145,23 pada triwulan lalu, menjadi sebesar 146,20. Namun demikian, harga yang dibayar petani (IB) juga mengalami peningkatan dari sebelumnya 137,04 pada triwulan III 2019 menjadi 137,92 pada triwulan IV 2019.

Berlawanan dengan NTP totalnya, sebagian besar dari empat subsektor terbesar lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan di Jawa Tengah mengalami penurunan pada triwulan ini. Peningkatan NTP di Jawa Tengah hanya ditopang oleh subsektor tanaman pangan yang mengalami perbaikan dari 108,39 pada triwulan III 2019, menjadi sebesar 109,95 pada triwulan laporan. Sementara itu, 3 (tiga) subsektor utama lainnya, yaitu subsektor hortikultura, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan justru mencatatkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya.



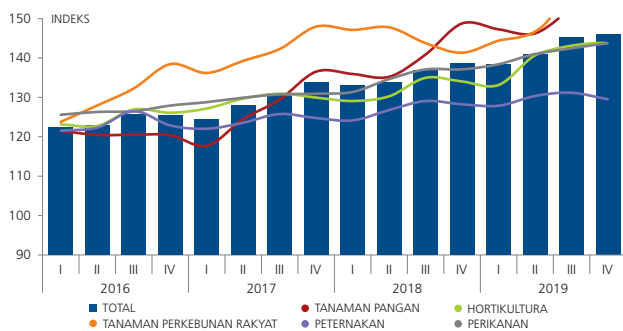
Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik 6.5 NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya



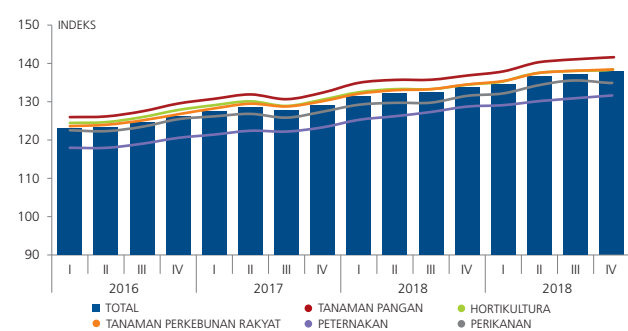
Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik 6.6 NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa Tengah



Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik 6.7 Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor



Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik 6.8 Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor

Pada triwulan laporan ini, subsektor tanaman pangan sebagai kontributor utama lapangan usaha pertanian di Jawa Tengah, mencatatkan peningkatan indeks yang diterima petani (IT) terbesar dibandingkan subsektor lainnya. Subsektor tanaman pangan mencatatkan indeks yang diterima petani (IT) sebesar 155,76 pada triwulan IV 2019, atau meningkat dari sebelumnya sebesar 152,61 pada triwulan III 2019. Sementara itu, subsektor peternakan mencatatkan penurunan dari sebesar 131,28 pada triwulan III 2019, menjadi sebesar 129,91 pada triwulan laporan. Penurunan tersebut berlangsung pada golongan peternak hewan ternak besar, khususnya hewan sapi.

Pengeluaran petani pada triwulan IV 2019, yang digambarkan oleh indeks yang dibayarkan petani (IB) meningkat sebesar 0,64% (qtq), dari sebelumnya 137,04 pada triwulan III 2019 menjadi 137,92 pada triwulan laporan. Data historis menunjukkan bahwa indeks yang dibayar petani mengalami tren peningkatan secara persisten. Peningkatan biaya pengeluaran petani pada

periode laporan juga berlangsung pada hampir seluruh subsektor, dengan kenaikan tertinggi pada subsektor hortikultura (0,72%; qtq), diikuti oleh subsektor peternakan (0,66%; qtq), serta subsektor tanaman pangan (0,61%; qtq). Lebih lanjut, peningkatan biaya yang harus dibayarkan oleh petani terjadi di komponen biaya kebutuhan konsumsi rumah tangga untuk seluruh subsektor, sementara itu peningkatan biaya kebutuhan proses produksi dan penambahan barang modal juga terjadi di seluruh subsektor. Pengeluaran untuk kegiatan usaha pertanian meningkat untuk seluruh jenis komponen biaya maupun barang modal kerja. Peningkatan biaya relatif lebih tinggi pada komponen konsumsi rumah tangga yang dipergunakan untuk mengantisipasi ataupun menangani gangguan proses budidaya tanaman yang berkaitan erat dengan faktor gangguan cuaca kemarau yang berkepanjangan pada triwulan IV 2019. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada musim menyebabkan fluktuasi kemampuan produksi petani.

6.4. TINGKAT KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan Jawa Tengah melanjutkan tren penurunannya, baik dari jumlah maupun rasio penduduk miskin. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah pada September 2019 terhitung sebesar 3,68 jiwa atau menurun bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 3.87 juta jiwa. Dengan perkembangan tersebut, rasio penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi sebesar 10,58% dari total penduduk Jawa Tengah, atau menurun dibandingkan periode September 2018, yaitu 11,19% dari jumlah penduduk.

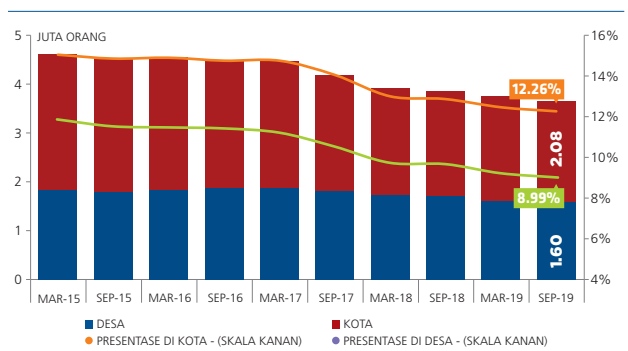
Penurunan persentase jumlah penduduk miskin tersebut terutama disumbangkan oleh penurunan jumlah penduduk miskin yang berada di daerah perkotaan. Jumlah penduduk miskin yang ada di perkotaan mengalami penurunan dari 1,71 juta jiwa pada September 2018, menjadi sebesar 1,60 juta jiwa pada September 2019. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin yang berada di perdesaan juga mengalami penurunan menjadi sebesar 2,08 juta jiwa pada periode laporan, berkurang dari 2.16 juta jiwa pada September 2018. Secara proporsinya dibandingkan dengan jumlah total penduduk.

Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang diturunkan melalui empat strategi, yakni i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; ii) meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi; iii) mengembangkan UMKM, dan iv) sinergitas kebijakan antar instansi dengan optimalisasi program atau anggaran. Fokus program pengentasan kemiskinan juga

disusun dengan pendekatan, i) mengurangi penduduk miskin diprioritaskan pada wilayah kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan di atas rata-rata Jawa Tengah, serta ii) peningkatan sinergitas dan harmonisasi program oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ditujukan untuk pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan berdimensi kewilayahan.

Upaya pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program-program di SKPD terkait, khususnya Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melalui program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program-program tersebut melengkapi program bantuan sosial nasional, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH) serta program Pemerintah Provinsi seperti Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) untuk masyarakat miskin.

Angka kemiskinan di tingkat nasional juga mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penduduk miskin nasional pada September 2019 tercatat sebesar 24,79 juta jiwa, lebih rendah dibandingkan September 2018 sebesar 25,67 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin tingkat nasional ini mengalami penurunan sebesar 3,43% (yoy). Penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah merupakan kedua terbesar di antara provinsi lainnya di Indonesia, setelah provinsi Jawa Timur yang mencatatkan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 236,15 ribu jiwa. Penurunan penduduk miskin daerah perkotaan di Provinsi Jawa Tengah merupakan yang terbesar di Indonesia, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Dengan perkembangan tersebut, penurunan penduduk miskin yang signifikan di Provinsi Jawa Tengah selanjutnya juga berdampak pada penurunan pangsa penduduk miskinnya terhadap nasional menjadi sebesar 14,84%; menurun dibandingkan pangsa periode yang sama pada tahun 2018 sebesar 15,07%.



Sumber : BPS, diolah

Grafik 6.9. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah

Tabel 6.6 Garis Kemiskinan Jawa Tengah Menurut Daerah

GARIS KEMISKINAN	SEP 2014	SEP 2015	SEP 2016	SEP 2017	MAR 2018	SEP 2018	MAR 2019	SEP 2019
KOTA	286,014	308,163	322,799	339,692	353,240	359,526	372,882	387,646
DESA	277,802	310,295	322,489	337,657	348,206	355,306	365,607	376,099
KOTA & DESA	281,750	309,314	322,748	338,815	350,875	357,600	369,385	381,992

Sumber : BPS, diolah

Sejalan dengan realisasi inflasi, garis kemiskinan terus mengalami peningkatan⁸, baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Jawa Tengah. Sesuai definisi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan akan digolongkan menjadi penduduk miskin. Peningkatan nilai garis kemiskinan di Jawa Tengah terutama didorong oleh peningkatan garis kemiskinan di perkotaan. Berdasarkan pembagian kelompok kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan, garis kemiskinan perkotaan di Jawa Tengah mengalami peningkatan tahunan sebesar 7,82% (yoy) dari Rp387.646 per kapita/bulan pada periode laporan, dari sebelumnya sebesar Rp359.526 per kapita/bulan pada September 2018. Sementara itu garis kemiskinan di perdesaan juga mengalami kenaikan sebesar 5,85% (yoy), dari sebesar Rp355.306 per kapita/bulan pada September 2018 menjadi Rp376.099 per kapita/bulan pada September 2019.

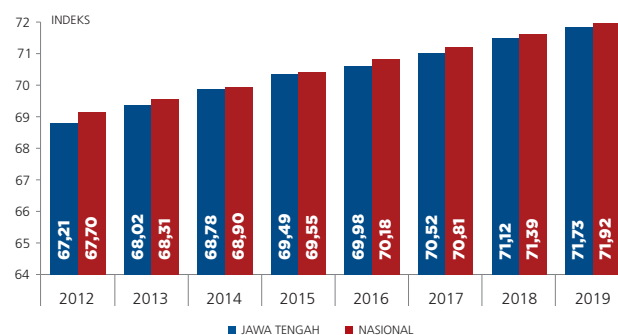
Laju peningkatan nilai garis kemiskinan Jawa Tengah baik untuk daerah perkotaan dan pedesaan, terhitung lebih tinggi dibandingkan laju inflasi umum di Jawa Tengah. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laju inflasi komoditas-komoditas utama pembentuk nilai garis kemiskinan, khususnya komoditas bahan makanan. Peningkatan laju garis kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan laju inflasi umum menunjukkan bahwa nilai barang-barang konsumsi masyarakat pra sejahtera meningkat lebih tinggi dibandingkan laju peningkatan nilai barang-barang konsumsi masyarakat menengah sejahtera.

Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, dikarenakan kenaikan garis kemiskinan berpotensi dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin.

6.5. PEMBANGUNAN MANUSIA⁹

Sejalan dengan perkembangannya di tingkat nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah terus mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, IPM Jawa Tengah tercatat sebesar 71,73; meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 71,12. Dengan perkembangan tersebut, status pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah sudah termasuk dalam kategori tinggi (nilai IPM 70 – 80). Namun capaian Jawa Tengah ini tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional dengan nilai IPM 71,92; yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 71,39.

Dibandingkan dengan provinsi se-Kawasan Pulau Jawa, IPM Jawa Tengah menempati urutan kedua terendah setelah Jawa Timur. Status pembangunan manusia di seluruh provinsi di kawasan Jawa telah berada pada kategori tinggi (nilai IPM 70-80) dengan indeks tertinggi pada provinsi DKI Jakarta sebesar 80,76.



Sumber : BPS Nasional

Grafik 6.10. Perkembangan IPM Jawa Tengah dan Nasional

8. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum yang harus dikeluarkan oleh satu orang.

9. Data IPM menggunakan metode perhitungan IPM standar tahun 2010, dengan komponen sebagai berikut:

- Kesehatan: Angka Harapan Hidup saat lahir (AHL)
- Pendidikan: i) Harapan Lama Sekolah (HLS); dan ii) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- Standar Hidup: PNB per kapita

Tabel 6.7 Perbandingan IPM Provinsi di Kawasan Pulau Jawa

PROVINSI	IPM			
	2016	2017	2018	2019
BANTEN	70,96	71,42	71,95	72,44
DKI JAKARTA	79,60	80,06	80,47	80,76
JAWA BARAT	70,05	70,69	71,30	72,03
JAWA TENGAH	69,98	70,52	71,12	71,73
DI YOGYAKARTA	78,38	78,89	79,53	79,99
JAWA TIMUR	69,74	70,27	70,77	71,50
NASIONAL	70,18	70,81	71,39	71,92

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6.8 IPM Jawa Tengah Menurut Komponen

DIMENSI	SATUAN	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
KESEHATAN					
ANGKA HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR (AHH)	thn	74.02	74.08	74.18	74.23
PENGETAHUAN					
HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)	thn	12.45	12.57	12.63	12.68
RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)	thn	7.15	7.27	7.35	7.53
STANDAR HIDUP LAYAK					
PENGELUARAN PER KAPITA DISESUIKAN	Rp.	10,153	10,377	10,777	11,102
IPM		69.98	70.52	71.12	71.73
PERTUMBUHAN IPM	%	0.71	0.77	0.85	0.85

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Peningkatan IPM Jawa Tengah terjadi di seluruh aspek baik kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup. Pada aspek pendidikan, komponen rata-rata lama sekolah oleh penduduk dewasa (lebih dari 25 tahun) di Jawa Tengah pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,53 tahun, dari sebelumnya terhitung sebesar 7,35 pada tahun 2018. Berdasarkan strata pendidikannya, angka tersebut masih relatif sama dengan capaian rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 yaitu 7,05 tahun atau setara dengan (Sekolah Menengah Pertama, tahun pertama. Namun demikian, peningkatan rata-rata lama sekolah tersebut merupakan yang tertinggi dalam 6 (enam) tahun terakhir, mengindikasikan bertambahnya penduduk dengan usia lebih dari 25 tahun dengan tingkat

**Gambar 6.1 IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

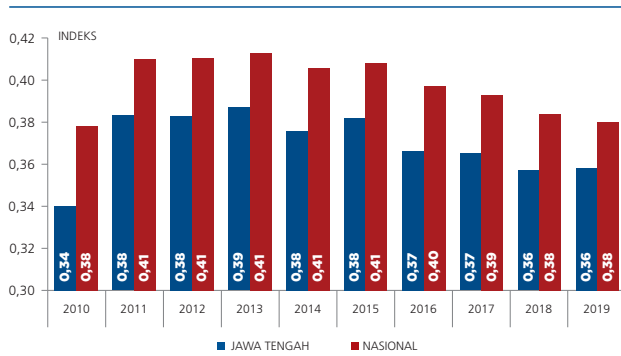
pendidikan yang lebih tinggi bergabung dengan angkatan kerja di Jawa Tengah.

Pada tahun 2019, perkembangan pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup beragam. Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah masih menjadi kota dengan IPM tertinggi dengan indeks sebesar 83,19, sementara kabupaten dengan IPM terendah bergeser ke Kabupaten Brebes (66,12). Perkembangan spasial menunjukkan bahwa terdapat 19 kabupaten/kota yang mencapai status IPM “tinggi” pada tahun 2019, sementara tiga daerah yang memiliki status IPM “sangat tinggi” masih sama seperti periode sebelumnya, yakni Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Selama periode 2018 – 2019, kemajuan IPM tercepat berlangsung di Kabupaten Tegal (1,35%), Kabupaten Banjarnegara (1,20%) dan Kabupaten Kebumen (1,16%).

6.6. PEMERATAAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK

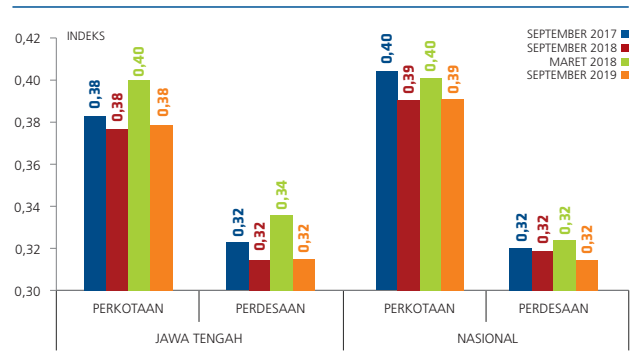
Secara tahunan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Tengah pada September 2019 relatif stabil. Hal ini tercermin dari koefisien Gini yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan melalui pengukuran yang berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna di dalam suatu daerah, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Pada September 2019, koefisien Gini Jawa Tengah tercatat sebesar 0,358; relatif sama dibandingkan September 2018 yang sebesar 0,357. Apabila dibandingkan dengan nasional, koefisien Gini Jawa Tengah tersebut masih lebih rendah dibandingkan koefisien Gini Nasional yang sebesar 0,380. Dengan demikian, tingkat pemerataan pendapatan di Jawa Tengah relatif lebih baik dibandingkan dengan nasional.

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Jawa, koefisien Gini Jawa Tengah masih mencatatkan yang terendah, diikuti oleh Banten dan Jawa Timur. Sementara itu, tingkat ketimpangan tertinggi terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Perbaikan tingkat ketimpangan tercepat yang berlangsung selama tahun 2019 dicatatkan oleh Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.



Sumber : BPS, diolah

Grafik 6.11. Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional



Sumber : BPS, diolah

Grafik 6.12. Perkembangan Koefisien Gini Berdasarkan Wilayah

Tabel 6.9 Perbandingan Koefisien Gini Provinsi Peers

PROVINSI	KOEFSIEN GINI							
	MAR-16	SEP-16	MAR-17	SEP-17	MAR-18	SEP-18	MAR-19	SEP-19
JAWA TENGAH	0.366	0.357	0.365	0.365	0.378	0.357	0.361	0.358
BANTEN	0.394	0.392	0.382	0.379	0.385	0.367	0.365	0.361
JAWA TIMUR	0.402	0.402	0.396	0.415	0.379	0.371	0.370	0.364
JAWA BARAT	0.413	0.402	0.403	0.393	0.407	0.405	0.402	0.398
DKI JAKARTA	0.411	0.397	0.413	0.409	0.394	0.390	0.394	0.391
DI YOGYAKARTA	0.420	0.425	0.432	0.440	0.441	0.422	0.423	0.428
INDONESIA	0.397	0.394	0.393	0.391	0.389	0.384	0.382	0.380

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Ditinjau berdasar wilayah, tingkat ketimpangan yang lebih tinggi berada di kawasan perkotaan. Pada Maret 2019, koefisien Gini perkotaan Jawa Tengah tercatat sebesar 0,383; lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 0,318. Tingkat ketimpangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan juga terjadi di tingkat nasional. Koefisien Gini perkotaan tingkat nasional sebesar 0,392; lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 0,317.



PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

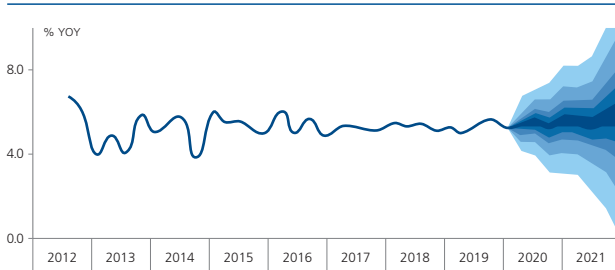
Kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah berpotensi meningkat ke depannya baik di triwulan II 2020 maupun keseluruhan tahun 2020.

- Ditinjau dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih akan kuat. Konsumsi pemerintah dan investasi mengalami akselerasi dalam mendukung percepatan pembangunan Jawa Tengah.
- Dari sisi lapangan usaha, perbaikan pertumbuhan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha perdagangan dan pertanian.
- Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan mengalami perbaikan, meski dibayangi dampak pelemahan ekonomi global akibat virus COVID-19.



7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN II 2020 DAN TAHUN 2020

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan II 2020 diperkirakan kembali tumbuh terakselerasi dibanding triwulan I 2020. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode tersebut diproyeksikan berada di kisaran 5,4%-5,8% (yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan pada triwulan II 2019 terutama didorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga sejalan dengan momen Ramadan dan Idulfitri yang berlangsung pada triwulan laporan. Selain itu, instruksi Presiden dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan konsumsi pemerintah dan investasi. Namun demikian, momen tersebut diperkirakan tertahan oleh perlambatan kinerja ekspor luar negeri akibat terhentinya industri di Tiongkok yang disebabkan penyebaran virus COVID-19. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan, sedangkan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan tumbuh melambat.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

Grafik 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada 2020 diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan 2019, meski relatif terbatas.

Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh pada rentang 5,4%-5,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 yang sebesar 5,41% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong masih kuatnya permintaan domestik, akselerasi konsumsi pemerintah dan investasi, serta permintaan produk ekspor Jawa Tengah yang masih cukup baik. Dari sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan.

7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Permintaan domestik diperkirakan masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dengan pangsa di atas 60%. Peningkatan permintaan terutama didorong oleh optimisme terhadap masih kuatnya permintaan domestik. Optimisme terhadap percepatan konsumsi rumah tangga ditopang oleh prospek inflasi yang rendah, penetapan peningkatan UMK 2020 sebesar 8,51%, serta dukungan belanja pemerintah melalui penyaluran bantuan sosial yang selanjutnya dapat berdampak pada peningkatan kinerja konsumsi.

Dukungan belanja pemerintah melalui penyaluran bansos seperti stimulus bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan subsidi

Tabel 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan

PENGELUARAN	2018**			2019**					2020p		
	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I _p	II _p	TOTAL _p
KONSUMSI RUMAH TANGGA	4.29	4.71	4.69	4.79	5.16	4.18	4.36	4.62	↑	↑	↑
KONSUMSI LNPR	9.20	9.87	7.62	13.85	13.64	8.23	8.15	10.90	↓	↓	↓
KONSUMSI PEMERINTAH	3.25	1.44	2.98	4.57	6.28	7.75	0.10	3.98	↑	↑	↑
PMTB	9.69	5.95	7.68	6.92	4.17	5.54	2.98	4.85	↑	↑	↑
EKSPOR LUAR NEGERI	12.40	7.10	11.77	3.75	-2.23	17.87	-0.62	4.92	↑	↓	↑
IMPOR LUAR NEGERI	47.81	21.73	32.61	6.13	-11.24	-19.14	-10.10	-9.33	↑	↑	↑
NET EKSPOR ANTARDAERAH	45.56	142.01	49.00	3.89	-5.12	-39.41	-0.14	-11.75	↑	↓	↑
PDRB	5.21	5.26	5.31	5.13	5.52	5.64	5.34	5.41	↑	↑	↑

Ket : * angka sementara, ** angka sangat sementara, p) proyeksi Bank Indonesia
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

energi; diperkirakan berperan dalam menjaga daya beli masyarakat sehingga selanjutnya berdampak pada peningkatan kinerja konsumsi. Pada tahun 2020, pemerintah secara nasional menaikkan anggaran bantuan sosial PKH menjadi Rp 58,09 triliun yang disalurkan mulai Januari 2020. Di samping itu, pagu anggaran dana desa tahun 2019 juga dinaikkan menjadi Rp72 triliun, sehingga diharapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Capaian inflasi yang rendah dan terkendali diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2020, yang selanjutnya dapat menjaga daya beli masyarakat. Rumah tangga masih optimis terhadap kondisi perekonomian ke depan, tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen dari hasil Survei Konsumen, yang didorong oleh masih kuatnya ekspektasi penghasilan dan kegiatan usaha 6 bulan ke depan. Namun demikian, terdapat risiko pencapaian risiko inflasi pada kelompok *administered prices*, khususnya terkait dengan rencana reformasi kebijakan fiskal subsidi energi, khususnya pada komoditas listrik dan bahan bakar gas. Kebijakan fiskal ini diperkirakan dapat menyebabkan inflasi yang tinggi pada tahun 2020, yang selanjutnya menjadi penahan konsumsi masyarakat.

Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia, serta komitmen dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur diperkirakan tetap mendukung pertumbuhan investasi pada 2020. Pemerintah periode 2019-2024 telah menyampaikan secara umum mengenai garis besar kebijakan fiskal dan pembangunan, terkait komitmen melanjutkan dan memperluas pembangunan infrastruktur

serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apalagi pasca penetapan Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2019 tanggal 20 November 2019, terjadi antusias kinerja aparatur sipil negara di Jawa Tengah semakin meningkat. Selain itu, investor semakin melirik berbagai lini sektor di Jawa Tengah karena melihat dukungan pemerintah yang besar.

Lebih lanjut, kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan semakin membaik pada tahun 2020. Belanja pemerintah diperkirakan meningkat didorong oleh pelaksanaan program-program kerja pemberdayaan sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan), serta berlanjutnya penyaluran stimulus fiskal dalam rangka perlindungan daya beli, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Lebih lanjut, pemerintah juga berkomitmen untuk menaikkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Secara keseluruhan tahun, belanja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (TA) 2020 ditetapkan sebesar Rp29,03 triliun atau meningkat 4,60% dari APBD 2019.

Sementara itu, pertumbuhan ekspor luar negeri pada tahun 2020 diperkirakan tetap tumbuh terbatas dibanding tahun 2019. Pertumbuhan penjualan ekspor diperkirakan relatif terbatas, yang disebabkan oleh penyebaran virus COVID-19 yang berdampak luas di seluruh dunia dan semakin meningkatkan risiko ketidakpastian perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tumbuh melandai, termasuk negara mitra dagang utama lainnya seperti Tiongkok, Eropa, dan Jepang. Rilis terakhir pada Februari 2020, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur di beberapa negara telah memasuki fase kontraksi seperti Tiongkok

Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

LAPANGAN USAHA	2018**			2019**					2020p		
	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I _p	II _p	TOTAL _p
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	3.31	2.12	2.62	1.13	4.65	-1.55	1.56	1.36	↑	↑	↑
INDUSTRI PENGOLAHAN	3.98	4.31	4.35	4.16	4.53	6.78	5.28	5.19	↑	↑	↑
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	5.91	6.56	5.77	6.80	6.55	6.59	4.05	5.98	↑	↑	↓
PDRB	5.21	5.26	5.31	5.13	5.52	5.64	5.34	5.41	↑	↑	↑

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank Indonesia
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

(35,7) dan Uni Eropa (49,2). *World Economic Outlook* (WEO) IMF Januari 2020 merevisi perkiraan volume perdagangan global menjadi 2,9% pada tahun 2020, atau lebih rendah 0,3% dari perkiraan sebelumnya. Selain itu, revisi juga terjadi untuk pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,3% pada 2020, atau lebih rendah 0,1% dari perkiraan semula.

7.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Pada sisi lapangan usaha, ekonomi Jawa Tengah masih ditopang oleh lapangan usaha industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik, permintaan terhadap produk Jawa Tengah diperkirakan mengalami peningkatan yang mendorong perbaikan kinerja lapangan usaha perdagangan. Perbaikan kinerja lapangan usaha tersebut didukung oleh faktor perbaikan akses konektivitas antarwilayah (Tol Trans Jawa) serta terjaganya daya beli masyarakat sebagai pengaruh inflasi yang terkendali dan adanya peningkatan pendapatan berupa penyesuaian UMK, stimulus fiskal/bansos serta kebijakan subsidi energi.

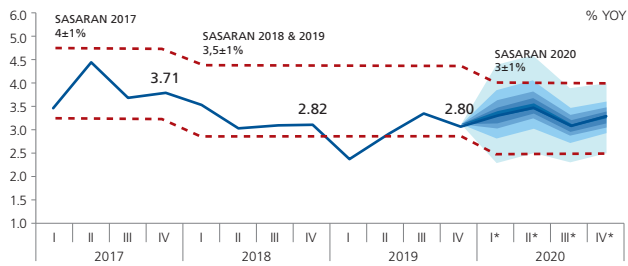
Namun demikian, kinerja lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan akan membaik pada tahun 2020 seiring dengan meningkatnya permintaan konsumsi domestik, sementara permintaan ekspor masih tumbuh terbatas. Permintaan impor akan kembali meningkat, khususnya pada kelompok bahan baku untuk memenuhi permintaan kapasitas produksi maupun stok industri pengolahan. Peningkatan impor nonmigas bahan baku terutama akan berlangsung pada komoditas serat tekstil dan produk tekstil, produk kimia dan plastik, serta benda-benda dari logam. Selanjutnya, kinerja lapangan usaha pertanian di tahun 2020 akan mengalami normalisasi, setelah mengalami gangguan iklim El-Nino yang terjadi pada tahun 2019. Selanjutnya, awal musim hujan 2019/2020 di sebagian besar wilayah di Jawa Tengah diperkirakan lebih lambat dari rata-ratanya, yaitu terjadi paling awal pada Oktober Dasarian I dan paling akhir pada Desember Dasarian II.

Pada sisi swasta, komitmen pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan usaha reformulasi regulasi di berbagai kementerian dan lembaga, di tingkat pusat dan daerah; serta integrasi sistem perizinan dan kemudahan berusaha diharapkan menjadi faktor pendukung dan berdampak signifikan pada perekonomian. Peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Tengah yang kompetitif juga menjadi faktor pendukung menariknya investasi ke Jawa Tengah. Adapun beberapa risiko yang perlu diwaspadai dapat menahan pertumbuhan ekonomi antara lain: (i) berlanjutnya ketegangan hubungan dagang AS dan Tiongkok serta sejumlah risiko geopolitik; (ii) pertumbuhan ekonomi dunia melambat, termasuk negara mitra dagang utama Jawa Tengah seperti AS, Tiongkok, dan Eropa; serta (iii) turunnya volume perdagangan dan harga komoditas global, termasuk harga minyak. Meningkatnya ketidakpastian global berpotensi mengganggu prospek kesinambungan pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan internasional.

7.2. PROSPEK INFLASI TRIWULAN II 2020 DAN KESELURUHAN TAHUN 2020

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan II 2020 diperkirakan mengalami peningkatan. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi berasal dari kelompok makanan; kelompok air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya; serta kelompok transportasi.

Inflasi kelompok makanan diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2020. Sesuai dengan pola historis, konsumsi masyarakat akan mengalami peningkatan seiring dengan perayaan hari raya Idul Fitri pada bulan Mei 2020 dan setelah hari raya. Konsumsi masyarakat cenderung akan terus meningkat hingga satu minggu setelah perayaan lebaran. Hal yang patut diwaspadai adalah pola siklikal untuk komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras yang cenderung tertahan satu bulan setelah puncak konsumsinya di Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, berakhirnya masa panen beberapa komoditas setelah mencapai puncaknya pada bulan Maret-April 2020 menimbulkan risiko berkurangnya pasokan beberapa komoditas pangan dan hortikultura.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 7.2 Proyeksi Inflasi Tahun 2020

Hal yang perlu diwaspadai adalah risiko peningkatan laju inflasi pada kelompok Transportasi. Hal tersebut seiring dengan perayaan hari raya pada triwulan II 2020 dan mencermati pola historis akan terjadi kenaikan pada tarif jasa angkutan udara dan tarif kereta api sebelum hingga 10 hari setelah hari raya.

Sesuai dengan mandatnya, Bank Indonesia akan berusaha menjaga capaian inflasi berada pada sasaran inflasi 2020, yaitu 3±1% (yoy). Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian tarif energi sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan komoditas pangan strategis, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah sudah mempersiapkan berbagai program pengendalian inflasi di tahun 2020. Diseminasi dan Sosialisasi penggunaan SISLOGDA untuk sinergi informasi pasokan pangan hulu-hilir, kebijakan pasar murah, operasi pasar, dan sidak lapangan di tingkat masyarakat ketika terjadi gejolak harga. TPID Jawa Tengah juga berupaya meningkatkan kelembagaan petani dengan penyusunan skema *Rice Market Center* serta untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi petani. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat tetap menjaga inflasi Jawa Tengah tahun 2020 pada level yang terkendali.